MERDEKA
BELAJAR

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Desy Anita Karolina Sembiring, S.Pd., M.Pd.
Nani Septiana, S.E., M.M.
Dr. Singgih Subiyantoro, M.Pd.
Ahmad Rosyid, M.Pd.I.
Dr. Isabel Coryunitha Panis, M.Pd.

MERDEKA BELAJAR

Mengupas Transformasi dalam Dunia Pendidikan

NAFAL
Publishing

MERDEKA BELAJAR

Mengupas Transformasi dalam Dunia Pendidikan

Penulis:

Desy Anita Karolina Sembiring, S.Pd., M.Pd.

Nani Septiana, S.E., M.M.

Dr. Singgih Subiyantoro, M.Pd.

Ahmad Rosyid, M.Pd.I.

Dr. Isabel Coryunitha Panis, M.Pd.

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh

Nafal Publishing

PT Nafal Global Nusantara

Jl. Utama 1 Metro 34112

Telp: +62823-7716-1512, +62 858-0920-7521

Email: nafalglobalnusantara@gmail.com

Anggota IKAPI No. 017/LPU/2024

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, September 2025

Editor: Bela Ardiyanti

Perancang sampul: Vins Vananda

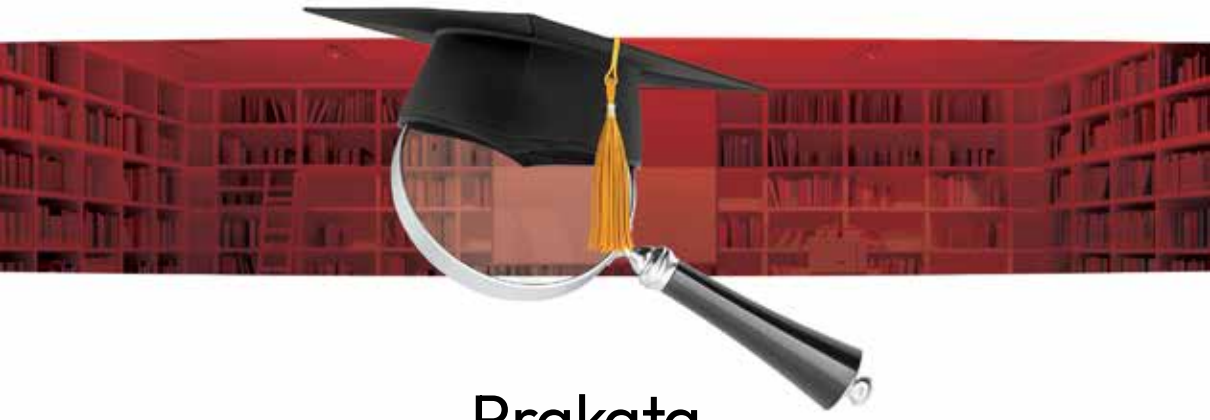
Penata letak: Vins Vananda

ISBN: 978-634-7241-60-3

E-ISBN: 978-634-7241-59-7

viii + 276 hlm ; 15,5x23 cm.

©September 2025



Prakata

Perubahan dalam dunia pendidikan merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Seiring dengan derasnya arus globalisasi, revolusi industri, serta kemajuan teknologi informasi, sistem pendidikan dihadapkan pada tantangan-tantangan baru yang menuntut penyesuaian secara menyeluruh di berbagai aspek. Dunia yang terus bergerak dinamis menuntut pembelajaran yang tidak hanya fokus pada penguasaan pengetahuan, tetapi juga pada pengembangan karakter, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis. Dalam konteks inilah, konsep merdeka belajar muncul sebagai sebuah respons terhadap kebutuhan akan transformasi pendidikan yang lebih relevan dan bermakna.

Merdeka belajar bukan sekadar perubahan kurikulum, tetapi merupakan sebuah gerakan yang membawa semangat pembaruan dalam dunia pendidikan. Ia mendorong pergeseran paradigma, dari sistem pembelajaran yang kaku dan seragam menuju pendekatan yang lebih fleksibel, inklusif, dan memerdekakan setiap individu untuk belajar sesuai dengan minat, bakat, serta kecepatan masing-masing. Pendidik tidak lagi diposisikan hanya sebagai sumber pengetahuan utama, melainkan sebagai fasilitator yang membimbing peserta didik untuk menggali potensi dirinya. Sementara itu, peserta didik diberikan ruang untuk berekspresi, bertanya, mencari tahu, dan membangun pengetahuan mereka secara mandiri dan kolaboratif.

Transformasi yang diusung merdeka belajar menyentuh berbagai dimensi pendidikan. Mulai dari perubahan dalam perumusan kebijakan kurikulum, penyesuaian metode evaluasi pembelajaran, peningkatan pemanfaatan teknologi digital, hingga penguatan peran keluarga dan masyarakat dalam mendukung proses belajar. Tak kalah penting, perubahan ini juga menuntut adanya pergeseran budaya belajar, di mana semua pihak dalam ekosistem pendidikan—baik pendidik, peserta didik, orang tua, hingga pemangku kebijakan—harus memiliki pola pikir yang terbuka, visioner, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Dalam buku ini memuat berbagai pemikiran, analisis kritis, dan refleksi mendalam mengenai pelaksanaan merdeka belajar di berbagai jenjang pendidikan. Pengalaman-pengalaman di lapangan yang disajikan memperlihatkan betapa kompleks dan beragamnya tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan perubahan. Namun, di balik tantangan tersebut tersimpan potensi besar untuk mendorong pendidikan Indonesia menjadi lebih maju, humanis, dan sesuai dengan kebutuhan zaman.



Daftar Isi

Prakata v
Daftar Isi vii

BAB I
KONSEP DASAR KURIKULUM 1
- Pendahuluan 1
- Pengertian Kurikulum 2
- Dimensi Kurikulum 6
- Karakteristik Kurikulum 9
- Komponen Kurikulum 13
- Fungsi Kurikulum 18
- Peranan Kurikulum 21

BAB II
PENGEMBANGAN KURIKULUM 27
- Pendahuluan 27
- Landasan dan Prinsip Pengembangan Kurikulum 29
- Komponen Pengembangan Kurikulum 38
- Model Pengembangan Kurikulum 42

BAB III

SEJARAH PERKEMBANGAN KURIKULUM 47
Pendahuluan 47
Kurikulum 1947 (Rentjana Pelajaran 1947) 48
Kurikulum 1952 (Rentjana Pelajaran Terurai 1952) 50
Kurikulum 1964 (Rentjana Pendidikan 1964) 52
Kurikulum 1968 54
Kurikulum 1984 (Penyempurnaan Kurikulum 1975) 56
Kurikulum 1994 dan Suplemen Kurikulum 1999 58
Kurikulum 2004 (Kurikulum Berbasis Kompetensi) 61
Kurikulum 2006 (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) 63
Kurikulum 2013 (K-13) 65
Kurikulum Merdeka 68

BAB IV

KONSEP DASAR KURIKULUM MERDEKA 73
Pendahuluan 73
Definisi dan Urgensi Kurikulum Merdeka 74
Landasan Kurikulum Merdeka 76
Prinsip dan Karakteristik Kurikulum Merdeka 84
Struktur dan Komponen Kurikulum Merdeka 87
Tujuan Kurikulum Merdeka 91

BAB V

IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA 93
Pendahuluan 93
Ciri Utama Kurikulum Merdeka 95
Struktur Kurikulum Merdeka 98
Strategi Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah 100
Peran Pendidik dalam Implementasi Kurikulum Merdeka 103
Tantangan dalam Implementasi Kurikulum Merdeka 104
Solusi dan Rekomendasi Strategis 105

BAB VI

PENILAIAN PADA KURIKULUM MERDEKA 107
Pendahuluan 107
Penilaian Diagnostik 108
Penilaian Formatif 115
Penilaian Sumatif 118

BAB VII

EVALUASI PADA KURIKULUM MERDEKA 123
Pendahuluan 123
Evaluasi Kurikulum Merdeka 125
Teknik dan Bentuk Evaluasi Pembelajaran
Kurikulum Merdeka 127
Prinsip Evaluasi Kurikulum Merdeka 131
Jenis Evaluasi Kurikulum Merdeka 133
Karakteristik Asesmen 136
Pelaksanaan Evaluasi 138

Daftar Pustaka 141
Profil Penulis 149



BAB I

KONSEP DASAR KURIKULUM

"The curriculum should be a reflection of the interests and needs of the students. It is not merely a document of content, but a living instrument that bridges the gap between what society values and what learners require for their holistic development."

- John Dewey

Pendahuluan

Pernahkah terlintas di benak kita, mengapa kurikulum terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu? Apakah perubahan tersebut sekadar bersifat administratif, ataukah merupakan upaya nyata untuk lebih memenuhi kebutuhan dan minat peserta didik? Kurikulum bukanlah dokumen yang kaku, melainkan instrumen hidup yang menjembatani nilai-nilai masyarakat dengan kebutuhan peserta didik. Prinsip ini semakin relevan di era kontemporer, ketika transformasi sosial, ekonomi, dan teknologi berlangsung dengan sangat cepat—termasuk dalam dunia pendidikan. Dalam konteks ini, kurikulum dituntut untuk menjadi lebih responsif dan adaptif.

Namun, di balik tuntutan untuk terus beradaptasi, perhatian sering kali terfokus pada aspek teknis implementasi. Akibatnya, pertanyaan mendasar justru terabaikan seperti apakah kurikulum benar-benar mencerminkan minat dan kebutuhan nyata peserta didik? Sudahkah kurikulum menjadi jembatan yang efektif antara nilai-nilai yang dijunjung masyarakat dengan kebutuhan peserta didik untuk tumbuh dan berkembang secara holistik?

Untuk menjawab berbagai pertanyaan tentang esensi kurikulum, perlu menjelajahi konsep dasarnya secara komprehensif. Bab ini akan mengupas berbagai aspek mendasar dari kurikulum—pengertian, dimensi, karakteristik, komponen, fungsi, dan peranan—yang menjadi landasan bagi inovasi pendidikan kontemporer. Dengan memahami hakikat kurikulum sebagai cerminan kebutuhan peserta didik, dapat lebih bijak dalam merancang dan mengimplementasikan kurikulum yang benar-benar memerdekakan potensi setiap individu.

Pengertian Kurikulum

Bayangkan seorang atlet yang berlari di lintasan stadion. Setiap langkahnya, setiap tikungan yang dilewati, hingga garis finis yang menjadi tujuan—semua telah ditentukan dengan cermat. Inilah makna dasar dari kata "kurikulum" yang berasal dari bahasa Latin *currere*, sebuah istilah yang awalnya merujuk pada lintasan pacuan yang harus ditempuh oleh para pelari dari titik awal hingga akhir.

Secara etimologis, *currere* berarti 'berlari' atau 'menempuh suatu jarak', yang kemudian berkembang menjadi *curriculum* dalam bahasa Inggris—bermakna perjalanan yang harus diselesaikan seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Metafora ini sangat relevan dalam dunia pendidikan, yaitu sebuah perjalanan terstruktur dengan titik awal, jalur yang jelas, dan tujuan yang pasti.

Seiring dengan berkembangnya pemahaman tentang pendidikan, konsep kurikulum juga mengalami evolusi yang signifikan sepanjang sejarah. Dari yang semula dipahami secara sederhana sebagai "daftar mata pelajaran" di era tradisional, kini kurikulum dimaknai sebagai pengalaman

belajar yang holistik di era modern. Perjalanan makna kurikulum ini mencerminkan transformasi cara pandang terhadap proses belajar-mengajar.

Pada ruang kelas tradisional era 1950-an, kurikulum dipahami sebatas serangkaian topik yang harus disampaikan kepada peserta didik—sebuah entitas statis berupa daftar mata pelajaran yang harus ditempuh demi memperoleh ijazah. Namun, seiring kemajuan ilmu pendidikan dan psikologi pembelajaran, definisi sempit tersebut tidak lagi memadai untuk menggambarkan kompleksitas sejati dalam proses pendidikan.

John Dewey, seorang filsuf pendidikan berpengaruh dari Amerika Serikat dalam karyanya yang berjudul *The Child and the Curriculum*, mendefinisikan kurikulum sebagai rangkaian pengalaman yang direkonstruksi secara berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa "*Education must be conceived as a continuing reconstruction of experience*; *that the process and the goal of education are one and the same thing*" (Dewey, 1902).

Pandangan revolusioner ini menekankan bahwa kurikulum adalah proses dinamis yang berpusat pada pengalaman peserta didik, bukan sekadar kumpulan konten yang ditetapkan oleh otoritas pendidikan. Pergeseran paradigma ini membuka jalan bagi reformasi pendidikan yang lebih menekankan pada pemenuhan kebutuhan perkembangan peserta didik secara holistik.

Sejalan dengan pemikiran Dewey tentang kurikulum sebagai rekonstruksi pengalaman, Ralph W. Tyler—yang dikenal sebagai Bapak Evaluasi Pendidikan—mengembangkan pendekatan sistematis terhadap kurikulum melalui karya monumentalnya yang berjudul *Basic Principles of Curriculum and Instruction*. Tyler menyatakan, "*The curriculum includes all of the learning experiences planned and directed by the school to attain its educational goals*" (Tyler, 1949).

Tyler mengajukan empat pertanyaan fundamental yang menjadi dasar pengembangan kurikulum: tujuan apa yang ingin dicapai? Pengalaman belajar apa yang perlu disediakan? Bagaimana pengalaman tersebut diorganisasikan? Dan bagaimana menilai efektivitasnya? Kerangka kerja

sistematis inilah yang kemudian menjadi fondasi utama dalam praktik pengembangan kurikulum modern.

Melanjutkan pemikiran sistematis Tyler tentang kurikulum, Hilda Taba—pionir pendekatan induktif dalam pengembangan kurikulum—memperluas pemahaman tentang kurikulum melalui bukunya yang berjudul *Curriculum Development: Theory and Practice*. Taba mendefinisikan kurikulum sebagai "*A plan for learning consisting of goals and objectives and content, of learning experiences, and of evaluation*" (Taba, 1962).

Definisi kurikulum menurut Taba menekankan bahwa kurikulum tidak hanya mencakup *apa* (konten), tetapi juga *mengapa* (tujuan) dan *bagaimana* (metode) proses pendidikan dilaksanakan. Pendekatan induktif Taba menekankan pentingnya keterlibatan pendidik dalam proses pengembangan kurikulum, bukan sekadar sebagai pelaksana, tetapi juga sebagai perancang aktif yang memahami kebutuhan peserta didiknya.

Di Indonesia, definisi kurikulum secara legal-formal ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 1 ayat 19 menyatakan bahwa "Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu." Definisi ini menjadi acuan resmi dalam pengembangan dan implementasi kurikulum di seluruh jenjang pendidikan, dengan menekankan kurikulum sebagai instrumen perencanaan yang komprehensif untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Sejalan dengan definisi kurikulum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Nurhayati dkk. (2022) dalam bukunya yang berjudul *Pengembangan Kurikulum* menguraikan evolusi konsep kurikulum dari pemahaman tradisional menuju perspektif modern yang lebih komprehensif. Dalam pandangan modern, kurikulum mencakup seluruh kegiatan dan pengalaman potensial yang disusun secara ilmiah—baik di dalam kelas, di halaman sekolah, maupun di luar sekolah—untuk mencapai tujuan

pendidikan. Konsep ini memperluas cakupan kurikulum hingga mencakup kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler.

Konsekuensinya, pendidik sebagai pengembang kurikulum dituntut untuk menggunakan berbagai strategi, pendekatan, dan sumber belajar yang bervariasi. Nurhayati dkk. (2022) menegaskan bahwa dalam paradigma modern, tujuan akhir kurikulum bukan sekadar memperoleh ijazah, melainkan pencapaian tujuan pendidikan yang lebih substantif dan holistik. Pandangan ini mencerminkan pergeseran dari kurikulum sebagai dokumen statis menjadi kurikulum sebagai pengalaman belajar yang dinamis dan melampaui batasan fisik sekolah.

Memperkuat perspektif modern tersebut, Masykur (2018) menekankan dimensi praktis dengan mendefinisikan kurikulum sebagai sejumlah pengalaman peserta didik yang direncanakan, diarahkan, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan oleh sekolah atau pendidik. Ia berpendapat bahwa perancangan dan implementasi kurikulum seharusnya menjadi tanggung jawab sekolah dan pendidik, sebagai pihak yang paling memahami kondisi peserta didik dengan berbagai latar belakangnya.

Masykur (2018) mengkritisi pendekatan *top-down* dan mendorong perubahan kurikulum yang berangkat dari kondisi lapangan, lalu diusulkan ke dinas pendidikan untuk memperoleh pengakuan dan kelayakan. Pada intinya, ia menegaskan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar.

Menelaah berbagai definisi kurikulum dari para ahli, dapat disimpulkan bahwa kurikulum telah mengalami evolusi makna yang signifikan—dari konsep sempit sebagai daftar mata pelajaran menjadi konsep luas yang mencakup seluruh pengalaman belajar yang dirancang dan difasilitasi oleh lembaga pendidikan. Evolusi ini, dari lintasan lari sederhana hingga ekosistem pembelajaran yang kompleks, menunjukkan bahwa kurikulum sejatinya adalah peta perjalanan pendidikan yang komprehensif.

Sebagai navigasi pendidikan, kurikulum mencakup keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengalaman belajar yang secara

sengaja diciptakan untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik. Lebih dari sekadar dokumen tertulis atau daftar materi ajar, kurikulum merupakan jembatan yang menghubungkan visi pendidikan dengan praktik pembelajaran sehari-hari. Ia berfungsi sebagai kompas yang mengarahkan seluruh proses pendidikan, memadukan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam satu kesatuan pengalaman belajar yang bermakna.

Dalam implementasinya, kurikulum bersifat kontekstual, responsif terhadap perubahan zaman, serta memperhatikan keberagaman potensi dan kebutuhan peserta didik. Sebagai produk budaya, kurikulum juga merefleksikan nilai-nilai dan aspirasi masyarakat, sekaligus menjadi agen perubahan yang mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi kompleksitas masa depan dengan kompetensi yang relevan.

Dimensi Kurikulum

Pengertian kurikulum senantiasa berkembang seiring dengan kemajuan teori dan praktik pendidikan. Dengan beragamnya pandangan mengenai kurikulum, secara teoretis cukup sulit untuk merumuskan satu definisi yang dapat mencakup seluruh pendapat tersebut. Sebagai respons terhadap kompleksitas ini, para ahli pendidikan telah mengembangkan kerangka konseptual tentang dimensi-dimensi kurikulum. Kerangka ini menawarkan perspektif yang lebih jernih dan komprehensif untuk memahami kurikulum sebagai fenomena pendidikan secara utuh.

Berbagai pakar kurikulum telah mengajukan kerangka konseptual untuk memahami dimensi-dimensi kurikulum secara lebih komprehensif. Glatthorn (1987) secara cermat mengidentifikasi enam dimensi kurikulum yang saling terkait, yaitu *recommended curriculum* (kurikulum yang direkomendasikan), *written curriculum* (kurikulum tertulis), *taught curriculum* (kurikulum yang diajarkan), *supported curriculum* (kurikulum yang didukung), *assessed curriculum* (kurikulum yang dinilai), dan *learned curriculum* (kurikulum yang dipelajari). Masing-masing dimensi ini merepresentasikan aspek berbeda dari kompleksitas realitas kurikulum.

Di sisi lain, Sukmadinata dan Syaodih (2012) menawarkan perspektif yang lebih makro dengan memandang kurikulum melalui tiga sudut pandang, yaitu sebagai ilmu yang terus berkembang, sebagai sistem yang terstruktur, dan sebagai rencana yang visioner. Pendekatan ini memberikan pemahaman yang lebih filosofis mengenai hakikat kurikulum, khususnya dalam konteks pendidikan di Indonesia.

Mengintegrasikan berbagai perspektif yang ada, Hasan (2021) bersama Brillian merumuskan pemikiran-pemikiran tersebut dan mengidentifikasi empat dimensi utama kurikulum sebagai kerangka pemahaman yang komprehensif serta terintegrasi. Keempat dimensi tersebut meliputi sebagai berikut.

1. Kurikulum sebagai ide atau gagasan
   Dimensi pertama memandang kurikulum sebagai sekumpulan ide yang menjadi landasan dalam pengembangan kurikulum selanjutnya. Pada tahap ini, kurikulum merupakan hasil pemikiran, perencanaan, dan perumusan para ahli pendidikan, yang mencakup landasan filosofis, psikologis, sosial-budaya, serta ilmiah. Dalam konteks merdeka belajar, dimensi ide tecermin dari pergeseran paradigma pendidikan yang menekankan kemerdekaan berpikir, fleksibilitas, serta pembentukan karakter peserta didik agar menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Pertanyaan-pertanyaan filosofis seperti "Apa tujuan pendidikan di era disrupsi?" dan "Kompetensi apa yang dibutuhkan generasi Indonesia untuk menghadapi tantangan masa depan?" menjadi titik awal refleksi yang melandasi konsep merdeka belajar.
2. Kurikulum sebagai rencana tertulis
   Dimensi kedua memposisikan kurikulum sebagai dokumen tertulis yang merepresentasikan gagasan kurikulum dalam bentuk konkret. Dimensi ini menampilkan kurikulum sebagai dokumen resmi yang memuat tujuan, materi, metode, dan evaluasi pembelajaran yang menjadi acuan bagi pendidik dalam melaksanakan proses belajar-mengajar. Secara operasional, ini mencakup silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), buku teks, serta pedoman teknis lainnya.

Dalam konteks kurikulum merdeka, dimensi ini tampak melalui penyusunan dokumen yang lebih sederhana dan fleksibel, memberikan ruang bagi pendidik untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik. Penyederhanaan administratif menjadi ciri khas kurikulum merdeka, yang bertujuan mengurangi beban birokrasi agar pendidik lebih fokus pada kualitas pembelajaran.

3. Kurikulum sebagai kegiatan atau aktivitas

   Dimensi ketiga memandang kurikulum sebagai kegiatan atau aktivitas nyata yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Dimensi ini sering disebut sebagai kurikulum sebagai realitas atau implementasi. Secara praksis, dimensi ini melampaui dokumen tertulis dan membentuk pengalaman belajar yang benar-benar dialami peserta didik setiap hari. Menariknya, apa yang terjadi di lapangan sering kali berbeda jauh dari apa yang tercantum dalam dokumen kurikulum.

   Seorang pendidik yang memiliki penguasaan materi yang kuat, kreativitas tinggi, serta pemahaman mendalam terhadap kebutuhan peserta didik dapat mengubah kurikulum tertulis yang sederhana menjadi pengalaman belajar yang luar biasa. Sebaliknya, kurikulum yang dirancang dengan inovatif bisa menjadi tidak bermakna jika pendidik tidak memiliki pemahaman, keterampilan, atau sumber daya yang memadai. Kesenjangan antara kurikulum tertulis dan kurikulum sebagai praktik inilah yang kerap menjadi tantangan utama dalam upaya reformasi pendidikan di berbagai negara.

4. Kurikulum sebagai hasil

   Dimensi terakhir, yakni kurikulum sebagai hasil merujuk pada pengalaman belajar yang benar-benar diperoleh dan di internalisasi oleh peserta didik. Dimensi ini merupakan produk akhir dari proses pendidikan—meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang tertanam dalam diri peserta didik. Ironisnya, meskipun menjadi yang paling esensial, dimensi ini justru paling sulit diukur secara akurat.

Tes standar mungkin mampu mengukur penguasaan konten, tetapi tidak serta-merta dapat menilai aspek-aspek seperti kreativitas, empati, atau kecintaan terhadap belajar. Oleh karena itu, kurikulum merdeka memandang hasil pembelajaran tidak hanya dari sisi capaian akademik, tetapi juga dari terbentuknya kompetensi dan karakter abad ke-21, seperti berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, komunikatif, serta memiliki karakter tangguh sebagai pembelajar sepanjang hayat.

Seorang pendidik perlu memahami keempat dimensi kurikulum agar dapat menghasilkan implikasi praktis yang mendalam. Dalam mengevaluasi keberhasilan suatu kurikulum, setiap dimensi—mulai dari ide filosofis, dokumen tertulis, pelaksanaan pembelajaran, hingga hasil belajar—perlu dianalisis secara menyeluruh. Kurikulum yang efektif menuntut adanya keselarasan antara dasar filosofis, rencana tertulis yang mengoperasionalkannya, praktik pembelajaran di lapangan, dan capaian belajar yang mencerminkan tujuan awal. Ketidakharmonisan pada salah satu dimensi dapat menyebabkan kegagalan implementasi kurikulum, sebagaimana kerap terjadi dalam berbagai upaya reformasi pendidikan.

Karakteristik Kurikulum

Sepanjang sejarah pendidikan, kurikulum telah mengalami transformasi yang mencerminkan pergeseran paradigma dalam memahami cara manusia belajar dan apa yang dianggap penting untuk dipelajari. Dari kurikulum berbasis pengetahuan yang kaku hingga pendekatan yang lebih holistik dan humanistik, evolusi ini menunjukkan upaya berkelanjutan untuk menjawab pertanyaan fundamental: pendidikan seperti apa yang paling efektif untuk mempersiapkan peserta didik menghadapi masa depan mereka?

Menurut Hamalik (2011), sebagai rancangan pendidikan, kurikulum yang baik memiliki sejumlah karakteristik yang dapat dijadikan tolok ukur untuk menilai efektivitasnya dalam mencapai tujuan pendidikan. Karakteristik tersebut adalah sebagai berikut.

1. Berorientasi pada tujuan

   Dalam praktiknya, tujuan kurikulum mencakup tiga ranah perkembangan peserta didik sebagaimana diidentifikasi oleh Bloom dalam taksonomi terkenalnya, yaitu ranah kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), dan psikomotorik (keterampilan). Keseimbangan antara ketiga ranah ini menjadi kunci dalam membentuk manusia yang utuh. Penekanan berlebihan pada aspek kognitif, misalnya, dapat menghasilkan individu yang cerdas secara intelektual, tetapi kurang berkembang dalam sikap dan keterampilan.

   Kurikulum merdeka menerjemahkan karakteristik berorientasi tujuan ini melalui pengembangan profil pelajar Pancasila yang komprehensif. Enam dimensi karakter yang dikembangkan—beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, serta kreatif—menjadi arah utama dalam proses pembelajaran. Berbeda dari pendekatan yang terlalu berfokus pada penguasaan konten, kurikulum merdeka menekankan pengembangan karakter dan kompetensi yang lebih menyeluruh serta relevan dengan tantangan abad ke-21.

2. Relevan

   Kurikulum harus memiliki relevansi terhadap tiga aspek utama kehidupan: kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan dan potensi peserta didik. Relevansi terhadap kebutuhan masyarakat berarti kurikulum harus mampu mempersiapkan peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam dinamika sosial. Oleh karena itu, kurikulum perlu membekali mereka dengan keterampilan yang relevan, seperti komunikasi, kolaborasi, dan literasi digital.

   Sementara itu, relevansi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi semakin krusial di era disrupsi. Bayangkan jika kurikulum masih mengajarkan teknologi yang telah usang, sementara dunia telah bergerak jauh ke depan—peserta didik akan memasuki dunia kerja dengan keterampilan yang tidak lagi relevan, ibarat

membawa pedang kayu ke medan perang modern. Oleh karena itu, kurikulum yang adaptif harus secara berkala memperbarui konten dan pendekatan pembelajarannya agar selaras dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini.

Adapun relevansi terhadap potensi peserta didik mengharuskan kurikulum untuk mengakomodasi keragaman kebutuhan, minat, dan bakat peserta didik. Kurikulum merdeka menjawab tantangan ini melalui konsep "materi esensial", yaitu dengan memfokuskan pembelajaran pada konten yang benar-benar penting dan bermakna serta menghindari beban informasi yang berlebihan dan cepat usang. Pendekatan *project-based learning* dalam projek penguatan profil pelajar Pancasila memungkinkan peserta didik menerapkan pengetahuan dalam konteks nyata yang relevan dengan kehidupan mereka.

3. Efisien dan efektif

   Efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya (waktu, tenaga, biaya) secara optimal dalam implementasi kurikulum. Sementara efektivitas merujuk pada tingkat ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan. Kurikulum yang baik harus mempertimbangkan ketersediaan sumber daya dan memaksimalkan dampaknya terhadap hasil belajar.

   Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Pusat Kurikulum dan Pembelajaran (2022), salah satu tantangan dalam implementasi kurikulum di Indonesia adalah ketidakseimbangan antara beban materi dengan alokasi waktu yang tersedia. Hal ini menyebabkan pembelajaran menjadi terburu-buru dan kurang mendalam sehingga mengurangi efektivitas pencapaian tujuan pembelajaran.

4. Fleksibel dan berkelanjutan

   Kurikulum harus cukup fleksibel untuk dapat menyesuaikan diri dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat dan ilmu pengetahuan tanpa kehilangan esensinya. Fleksibilitas ini mencakup kemampuan kurikulum untuk diadaptasi sesuai dengan kebutuhan lokal dan kapasitas peserta didik yang beragam. Sekolah di daerah perkotaan dan pedesaan atau di Jawa dan Papua, memiliki

tantangan dan sumber daya yang berbeda. Kurikulum yang kaku akan sulit diimplementasikan secara efektif di semua konteks tersebut.

5. Berkeseimbangan

   Kurikulum harus memberikan perhatian seimbang terhadap berbagai aspek perkembangan peserta didik, mencakup dimensi intelektual, sosial, emosional, dan fisik secara proporsional. Keseimbangan ini tecermin dalam perpaduan antara pengetahuan teoretis dan keterampilan praktis, antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara berbagai disiplin ilmu yang saling melengkapi.

   Salah satu kritik terhadap sistem pendidikan modern adalah kecenderungannya untuk terlalu menekankan aspek kognitif, sementara pengembangan karakter, kreativitas, dan kecerdasan emosional sering terabaikan. Keterampilan seperti kemampuan beradaptasi, kreativitas, dan kecerdasan emosional menjadi yang paling dibutuhkan dalam dunia kerja masa depan (Lemos, 2024).

   Kurikulum merdeka merespons tantangan ini melalui pengembangan profil pelajar Pancasila yang secara eksplisit menekankan keseimbangan antardimensi kompetensi. Enam dimensi karakter yang dikembangkan memberikan kerangka holistik yang mencakup aspek spiritual, sosial, dan intelektual secara seimbang. Pendekatan pembelajaran berbasis proyek memungkinkan peserta didik tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mengembangkan kemampuan kolaborasi, kreativitas, dan tanggung jawab sosial dalam satu pengalaman belajar yang utuh dan terintegrasi.

6. Terpadu

   Kurikulum harus mengintegrasikan berbagai komponen (tujuan, materi, metode, dan evaluasi) menjadi satu kesatuan utuh yang koheren dan bermakna bagi peserta didik. Dalam pendekatan terpadu, mata pelajaran tidak lagi berdiri sebagai pulau-pulau pengetahuan yang terpisah, melainkan terkoneksi dalam jejaring pemahaman yang saling melengkapi, merefleksikan realitas dunia yang tidak mengenal sekat-sekat disiplin ilmu. Kurikulum merdeka menerjemahkan prinsip

keterpaduan ini melalui projek penguatan profil pelajar Pancasila yang memungkinkan peserta didik mengintegrasikan berbagai pengetahuan dan keterampilan lintas disiplin untuk mengatasi tantangan dunia nyata.

Dalam perkembangan terbaru dunia pendidikan Indonesia, kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi meluncurkan kurikulum merdeka sebagai bagian dari kebijakan "merdeka belajar". Kurikulum ini hadir sebagai respons terhadap berbagai tantangan dan tuntutan pendidikan di era kontemporer.

Kurikulum merdeka memiliki sejumlah karakteristik utama yang membedakannya dari kurikulum sebelumnya, yaitu sebagai berikut.

1. Fokus pada materi esensial, yang menekankan pembelajaran mendalam pada konsep-konsep penting daripada cakupan materi yang luas namun dangkal.
2. Fleksibilitas dalam pembelajaran, dengan memberikan keleluasaan bagi satuan pendidikan untuk menyesuaikan kurikulum dengan konteks dan kebutuhan lokal.
3. Pengembangan karakter dan *soft skills*, melalui profil pelajar Pancasila yang mencakup enam dimensi utama karakter.
4. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, dengan menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif dan pendidik sebagai fasilitator dalam proses belajar.
5. Pembelajaran kolaboratif dan gotong royong, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem pendidikan.

Komponen Kurikulum

Kurikulum sebagai sistem pendidikan tidak hanya berwujud dokumen tertulis, tetapi terdiri atas berbagai komponen yang saling terkait dan membentuk satu kesatuan utuh. Dalam analogi bangunan, komponen-komponen tersebut bagaikan fondasi, tiang, dinding, dan atap yang saling menopang untuk membentuk struktur yang kokoh. Meskipun

masing-masing komponen memiliki fungsi dan peran yang spesifik, semuanya bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan pendidikan.

Memahami komponen-komponen kurikulum sangat penting dalam proses pengembangan, implementasi, dan evaluasi program pendidikan secara efektif. Berikut ini adalah lima komponen utama kurikulum.

1. Tujuan

   Tujuan merupakan arah yang ingin dicapai melalui implementasi kurikulum. Ibarat kompas bagi seorang pelaut, tujuan menjadi pedoman yang mengarahkan seluruh aktivitas pembelajaran. Tujuan kurikulum dirumuskan berdasarkan landasan filosofis, psikologis, sosial-budaya, dan ilmiah yang mendasari pengembangan kurikulum. Di Indonesia, tujuan kurikulum mengacu pada tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, dengan hierarki dari tujuan pendidikan nasional, institusional, kurikuler, hingga tujuan pembelajaran.

2. Isi atau materi

   Isi atau materi kurikulum mencakup bahan ajar yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan kurikulum. Materi ini meliputi pengetahuan (fakta, konsep, prinsip, dan teori), keterampilan, serta nilai atau sikap yang perlu dikuasai oleh peserta didik. Dalam pemilihannya, terdapat empat kriteria penting yang harus diperhatikan, yaitu signifikansi (kebermaknaan materi), kegunaan (utilitas dalam kehidupan), minat peserta didik, dan perkembangan manusiawi (Sukmadinata, 2005).

   Pendekatan modern dalam pengembangan materi kurikulum mengintegrasikan empat dimensi utama: pengetahuan, keterampilan, karakter, dan metakognisi, sebagai elemen penting dalam kurikulum abad ke-21. Hal ini mencerminkan pandangan bahwa pendidikan bukan sekadar proses transfer pengetahuan, melainkan juga proses pembentukan individu secara holistik.

3. Metode atau strategi

   Metode atau strategi merujuk pada pendekatan yang digunakan untuk menyampaikan isi kurikulum kepada peserta didik, yang mencakup berbagai metode pembelajaran, media, dan sumber belajar. Pemilihan metode pembelajaran harus mempertimbangkan tiga aspek penting, yaitu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, bahan pelajaran yang akan disampaikan, serta karakteristik kegiatan belajar yang diharapkan.

   Pergeseran paradigma pembelajaran ke arah pendekatan yang kolaboratif, personal, dan berbasis teknologi menjadi tren utama dalam menjawab tantangan abad ke-21. Dalam konteks ini, integrasi antara pembelajaran tatap muka dan pembelajaran digital melalui model *blended learning* menjadi semakin relevan, terutama setelah pandemi yang telah mengubah lanskap pendidikan secara global.

4. Organisasi kurikulum

   Organisasi kurikulum merujuk pada struktur dan pengaturan berbagai komponen kurikulum, termasuk pengelompokan materi, alokasi waktu, serta jadwal pembelajaran. Secara umum, terdapat tiga bentuk organisasi kurikulum, yaitu berbasis mata pelajaran; berbasis kebutuhan anak; dan berbasis masalah-masalah dalam masyarakat. Masing-masing pendekatan memiliki kelebihan sekaligus tantangan dalam implementasinya.

   Tren organisasi kurikulum kontemporer cenderung bergerak ke arah model hibrida, yang mengintegrasikan berbagai pendekatan sesuai dengan konteks dan kebutuhan spesifik satuan pendidikan. Salah satu bentuk organisasi yang semakin populer adalah kurikulum spiral, di mana topik yang sama dikaji ulang secara berkala dengan tingkat kedalaman yang meningkat. Pendekatan ini memungkinkan pengembangan pemahaman yang lebih progresif dan mendalam, serta membantu peserta didik membangun pengetahuan secara bertahap dan bermakna.

5. Evaluasi

   Evaluasi merupakan salah satu komponen penting dalam kurikulum yang berfungsi untuk menilai ketercapaian tujuan pembelajaran. Evaluasi mencakup berbagai bentuk penilaian, baik formatif (dilakukan selama proses pembelajaran) maupun sumatif (dilakukan di akhir pembelajaran).

   Berbeda dari sekadar pengukuran, evaluasi bersifat komprehensif dan melibatkan pertimbangan nilai (*value judgment*) terhadap keseluruhan proses serta hasil pembelajaran. Seiring perkembangan pendidikan, paradigma evaluasi telah bergeser dari *assessment of learning* menuju *assessment for learning* dan *assessment as learning*, yang menempatkan evaluasi sebagai bagian integral dari proses pembelajaran itu sendiri.

   Dalam konteks ini, asesmen formatif berperan sebagai proses berkelanjutan yang memberikan umpan balik konstruktif untuk perbaikan pembelajaran. Selain itu, evaluasi masa kini juga dituntut untuk mampu mengukur kapasitas belajar sepanjang hayat, guna mempersiapkan peserta didik menghadapi ketidakpastian dan tantangan di masa depan.

Kelima komponen kurikulum juga diterapkan ke kurikulum merdeka yang dirancang untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan abad ke-21. Komponen-komponen ini merupakan pengembangan dan adaptasi dari komponen kurikulum tradisional, tetapi dengan pendekatan yang lebih fleksibel, kontekstual, dan berpusat pada peserta didik.

1. Modul ajar

   Modul ajar dalam kurikulum merdeka merupakan perangkat pembelajaran yang menggantikan RPP dengan format yang lebih sederhana dan fleksibel. Modul ini berkaitan erat dengan komponen isi atau materi dan metode atau strategi dalam komponen kurikulum tradisional, tetapi dengan pendekatan yang lebih berfokus pada esensi pembelajaran. Dengan mengurangi beban administratif yang berlebihan,

pendidik memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan pembelajaran yang bermakna dan mengembangkan kreativitas dalam proses belajar-mengajar.

2. Alur tujuan pembelajaran

   Alur tujuan pembelajaran (ATP) merupakan perencanaan pembelajaran yang berfokus pada tahapan-tahapan yang harus dilalui peserta didik untuk mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. ATP berkaitan erat dengan komponen tujuan dan organisasi kurikulum.

   Berbeda dengan kurikulum sebelumnya yang cenderung kaku dalam menentukan urutan materi, ATP menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel. Fleksibilitas ini memungkinkan pendidik mengadaptasi alur pembelajaran sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik.

   ATP disusun berdasarkan prinsip penahapan (*scaffolding*) dan kebersinambungan (*continuity*). Dengan demikian, memungkinkan peserta didik membangun pemahaman secara bertahap—dari konsep yang sederhana menuju konsep yang lebih kompleks.

3. Media pembelajaran

   Media pembelajaran dalam kurikulum merdeka berperan sebagai alat bantu bagi pendidik untuk menyampaikan materi secara efektif, berkaitan dengan komponen metode atau strategi kurikulum. Kurikulum ini mendorong pemanfaatan teknologi dan media pembelajaran yang bervariasi untuk mengakomodasi berbagai gaya belajar dan meningkatkan keterlibatan peserta didik. Penggunaan teknologi digital seperti video pembelajaran, simulasi, dan alat bantu visual menjadi salah satu ciri khas yang mengakui pentingnya literasi digital dalam mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan masa depan.

4. *Learning community*

   Learning community atau komunitas belajar merupakan salah satu komponen dalam kurikulum merdeka yang berkaitan dengan metode atau strategi serta organisasi kurikulum. Komponen ini menekankan pentingnya kolaborasi dan interaksi sosial dalam proses pembelajaran.

Melalui komunitas belajar, peserta didik didorong untuk bertukar ide, berkolaborasi dalam menyelesaikan tugas, dan belajar dari pengalaman satu sama lain. Dalam konteks ini, pendidik berperan sebagai fasilitator yang menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi terjadinya interaksi bermakna antarpeserta didik, bukan sebagai satu-satunya sumber pengetahuan.

5. *Authentic assessment* dan refleksi
   Penilaian autentik dalam kurikulum merdeka berkaitan dengan komponen evaluasi, mengukur kemampuan peserta didik dalam konteks dunia nyata melalui proyek, portofolio, atau presentasi. Format penilaian ini tidak hanya mengukur apa yang peserta didik ketahui, tetapi juga apa yang dapat mereka lakukan dengan pengetahuan tersebut. Sementara itu, refleksi mendorong peserta didik untuk merenungkan proses dan hasil belajar, mengembangkan kesadaran metakognitif yang penting untuk pembelajaran mandiri dan sepanjang hayat.

Fungsi Kurikulum

Kurikulum dalam dunia pendidikan bukan sekadar dokumen statis, melainkan instrumen dinamis yang menjalankan berbagai fungsi vital dalam ekosistem pendidikan. Menurut Sanjaya (2008), terdapat enam fungsi utama kurikulum yang menjadi fondasi sistem pendidikan dan saling melengkapi dalam mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional. Adapun keenam fungsi tersebut adalah sebagai berikut.

1. Fungsi penyesuaian (*the adjustive function*)
   Kurikulum berfungsi membantu peserta didik beradaptasi dengan lingkungan yang terus berubah—baik lingkungan fisik, sosial, maupun budaya. Dalam masyarakat modern dengan percepatan perubahan teknologi, ekonomi, dan nilai-nilai sosial, kurikulum yang adaptif mempersiapkan peserta didik tidak hanya untuk bertahan, tetapi juga berkembang di tengah arus perubahan.

   Di Indonesia, fungsi penyesuaian ini diwujudkan melalui muatan lokal yang memungkinkan pembelajaran kontekstual sesuai kebutuhan

daerah. Kurikulum merdeka memperkuat fungsi ini dengan memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk mengadaptasi pembelajaran sesuai konteks lokal.

2. Fungsi integrasi (*the integrating function*)
   Kurikulum berfungsi untuk membekali peserta didik dengan kemampuan dan kesadaran agar dapat menjadi bagian yang terintegrasi dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai Pancasila dan kebinekaan yang diintegrasikan ke dalam berbagai mata pelajaran, merefleksikan fungsi ini dengan memungkinkan peserta didik menginternalisasi nilai-nilai persatuan dalam konteks kehidupan berbangsa yang majemuk. Dalam paradigma "merdeka belajar", fungsi integrasi ini semakin diperkuat melalui profil pelajar Pancasila, yang menggabungkan pengembangan aspek kognitif, sosial, emosional, dan spiritual secara menyeluruh.
3. Fungsi diferensiasi (*the differentiating function*)
   Keberagaman potensi, minat, dan bakat adalah realitas yang tak terbantahkan dalam dunia pendidikan. Kurikulum berfungsi mengakomodasi keberagaman tersebut dengan memberikan pengalaman belajar yang sesuai dengan keunikan masing-masing peserta didik. Fungsi diferensiasi tecermin dalam program peminatan, ekstrakurikuler, dan sistem penjurusan yang memungkinkan peserta didik mengembangkan potensi uniknya. Kurikulum merdeka menjalankan fungsi ini melalui pembelajaran berpusat kepada peserta didik dan fleksibilitas bagi pendidik untuk menyesuaikan pengalaman belajar sesuai karakteristik peserta didik.
4. Fungsi persiapan (*the propaedeutic function*)
   Kurikulum berfungsi membekali peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau memasuki dunia kerja. Pemikiran Toffler (1970) tentang pentingnya kemampuan belajar ulang di era perubahan pesat menjadi sangat relevan—bahwa tantangan literasi abad ke-21 bukan sekadar kemampuan membaca dan menulis,

tetapi juga kemampuan untuk terus belajar, mengubah pemahaman lama, dan mempelajari hal-hal baru.

Kurikulum dirancang dengan mempertimbangkan kontinuitas antarjenjang pendidikan, di mana muatan dasar menjadi fondasi bagi tahap pembelajaran berikutnya. Dalam kurikulum merdeka, fungsi persiapan ini ditekankan melalui penguasaan kompetensi esensial. Selain itu, pembelajaran berbasis proyek dirancang untuk mengembangkan kemampuan pemecahan masalah dan kolaborasi secara kontekstual.

5. Fungsi pemilihan (*the selective function*)
   Kurikulum memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membuat pilihan sesuai minat, bakat, dan aspirasi mereka. Dewey (1902) menyatakan, "Pendidikan bukan persiapan untuk hidup; pendidikan adalah hidup itu sendiri," menekankan pentingnya memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengeksplorasi ketertarikan dan membuat pilihan autentik.

   Fungsi pemilihan ini diwujudkan melalui sistem peminatan, program keahlian, dan kegiatan ekstrakurikuler yang memungkinkan peserta didik mengejar minatnya secara lebih terarah. Kurikulum merdeka memperkuat fungsi ini melalui projek penguatan profil pelajar Pancasila, yang memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan proyek berdasarkan minat dan potensi mereka.

6. Fungsi diagnostik (*the diagnostic function*)
   Kurikulum berfungsi mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan peserta didik sebagai dasar untuk merancang intervensi serta dukungan yang tepat. Berbagai bentuk asesmen dalam kurikulum membantu pendidik mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian khusus. Dalam kurikulum merdeka, fungsi diagnostik diperkuat melalui "asesmen kompetensi minimum" yang memberikan informasi diagnostik tentang kemampuan literasi dan numerasi peserta didik.

Fungsi-fungsi kurikulum yang telah diuraikan menunjukkan bahwa kurikulum bukan sekadar dokumen teknis pendidikan, melainkan

merupakan instrumen transformatif yang menjembatani berbagai kebutuhan dan tujuan pendidikan. Dalam implementasinya, keenam fungsi tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi saling melengkapi dan terintegrasi dalam suatu sistem yang dinamis.

Kurikulum yang efektif adalah kurikulum yang mampu menyeimbangkan seluruh fungsi tersebut sesuai dengan konteks, kebutuhan, dan tantangan zaman. Transformasi pendidikan melalui kurikulum merdeka menegaskan pentingnya keseimbangan tersebut dengan memberikan ruang fleksibilitas yang lebih luas bagi ekosistem pendidikan untuk beradaptasi, sekaligus tetap mempertahankan struktur yang memberikan arah dan kepastian.

Dengan pemahaman yang komprehensif tentang fungsi-fungsi kurikulum, pengembangan dan implementasinya dapat diarahkan secara lebih fokus dan terarah. Hal ini memungkinkan kurikulum memenuhi kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan bangsa dalam menghadapi tantangan masa kini maupun masa depan.

Peranan Kurikulum

Dalam diskursus pengembangan pendidikan, kurikulum menempati posisi strategis sebagai instrumen yang tidak hanya memengaruhi praktik pembelajaran di kelas, tetapi juga memainkan peran penting dalam pembentukan identitas bangsa, kemajuan masyarakat, dan pengembangan sumber daya manusia. Pemahaman mendalam tentang peranan kurikulum membantu pendidik, pengembang kurikulum, dan pemangku kepentingan untuk merancang, mengimplementasikan, serta mengevaluasi kurikulum secara lebih terarah dan bermakna.

Sukmadinata dan Syaodih (2012) mengklasifikasikan lima peranan kurikulum yang membentuk kerangka konseptual komprehensif untuk memahami fungsi kurikulum dalam sistem pendidikan.

1. Peranan konservatif

   Kurikulum berperan sebagai penjaga warisan budaya dengan mentransmisikan nilai-nilai, keyakinan, dan praktik budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di era globalisasi, peran ini menjadi sangat penting untuk mencegah erosi identitas budaya. Muatan nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal dalam kurikulum nasional mencerminkan fungsi konservatif ini.

   Dalam konteks Indonesia yang multikultur, peran konservatif kurikulum seharusnya tidak hanya melestarikan budaya dominan, tetapi juga mengapresiasi keberagaman budaya dari berbagai kelompok etnis, agama, dan komunitas. Dengan demikian, pelestarian budaya dalam kurikulum bukan sekadar mempertahankan status quo, melainkan menjadi bentuk perayaan pluralitas yang memperkaya khazanah budaya bangsa serta membangun fondasi bagi dialog antarbudaya yang produktif.

2. Peranan kritis atau evaluatif

   Kurikulum mendorong evaluasi kritis terhadap nilai dan praktik sosial, memungkinkan peserta didik untuk mengenali aspek-aspek yang perlu dipertahankan maupun diubah. Contoh konkret dari peranan ini adalah pendidikan antikorupsi dan pendidikan lingkungan hidup, yang mendorong peserta didik menganalisis akar permasalahan serta merancang solusi yang relevan. Paradigma pendidikan kontemporer semakin memperkuat peranan ini melalui pendekatan pembelajaran berbasis inkuiri dan pengembangan kemampuan bernalar kritis.

   Dalam konteks era digital dan keterbukaan informasi, fungsi evaluatif kurikulum perlu dikembangkan lebih jauh. Tidak hanya terbatas pada analisis konten, kurikulum juga harus mampu mengajak peserta didik untuk mengkritisi proses, sistem, dan struktur kekuasaan yang memengaruhi produksi serta distribusi pengetahuan. Kurikulum yang benar-benar bersifat kritis akan membantu peserta didik mengidentifikasi serta menantang asumsi-asumsi yang selama ini diterima begitu saja. Selain itu, kurikulum juga membekali mereka

dengan kemampuan untuk mengenali bias dan ketidakadilan sistemik dalam kehidupan sosial.

3. Peranan kreatif

   Dalam dunia yang terus berubah dengan cepat, kurikulum berperan penting dalam mengembangkan kemampuan kreatif peserta didik sebagai bekal untuk menghadapi berbagai tantangan masa depan. Pendekatan pembelajaran berbasis proyek serta integrasi STEAM (*science*, *technology*, *engineering*, *and mathematics*) mendorong peserta didik untuk merancang solusi inovatif terhadap permasalahan nyata di sekitar mereka.

   Lebih dari sekadar keterampilan artistik, peran kreatif kurikulum mencakup pembentukan pola pikir yang mampu menghasilkan ide-ide orisinal lintas disiplin. Hal ini mencakup kemampuan menggabungkan konsep secara tidak konvensional, mempertanyakan asumsi, dan berani mengambil risiko intelektual. Di tengah era disrupsi teknologi, kreativitas menjadi modal utama untuk menghadapi jenis pekerjaan yang belum tercipta dan menyelesaikan masalah yang belum terbayangkan saat ini.

4. Peranan sosial

   Kurikulum memfasilitasi proses sosialisasi peserta didik dalam masyarakat serta mempersiapkan mereka menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Pendidikan kewarganegaraan dan berbagai program pembelajaran kolaboratif turut memperkuat identitas nasional sekaligus membangun kesadaran global. Di tengah meningkatnya polarisasi sosial-politik dan tantangan kohesi sosial, peranan sosial kurikulum menjadi semakin penting untuk menumbuhkan literasi kemasyarakatan.

   Ini mencakup kemampuan hidup berdampingan dalam keberagaman, menyelesaikan konflik secara damai, dan berkontribusi terhadap kesejahteraan bersama. Kurikulum yang menjalankan fungsi sosial secara efektif tidak hanya menyampaikan teori tentang kehidupan bermasyarakat, tetapi juga menyediakan ruang bagi praktik langsung

dalam lingkungan sekolah sebagai cerminan miniatur masyarakat demokratis.

5. Peranan transformatif

   Melengkapi keempat peranan sebelumnya, peranan transformatif kurikulum menjadi semakin penting, khususnya dalam konteks masyarakat yang sedang mengalami perubahan mendasar. Peranan ini menekankan bahwa kurikulum bukan hanya alat untuk merespons perubahan sosial, melainkan juga sarana untuk membentuk dan mengarahkan arah perubahan tersebut. Kurikulum transformatif memberi ruang bagi peserta didik untuk membayangkan masa depan yang lebih adil, berkelanjutan, dan manusiawi, serta membekali mereka dengan kompetensi untuk mewujudkannya.

   Ini mencakup pengembangan kesadaran ekologis, komitmen terhadap keadilan sosial, dan rasa tanggung jawab global. Dalam konteks Indonesia yang tengah bergerak menuju masyarakat berbasis pengetahuan dan menghadapi tantangan pembangunan berkelanjutan, peranan transformatif kurikulum sangat relevan untuk membentuk generasi yang tidak hanya mampu beradaptasi terhadap perubahan, tetapi juga menjadi penggerak perubahan demi kebaikan bersama.

Kelima peranan kurikulum—konservatif, kritis, kreatif, sosial, dan transformatif—membentuk sinergi yang menjadikan kurikulum lebih dari sekadar panduan pembelajaran teknis. Saat dikelola dengan tepat, peranan-peranan ini menciptakan ekosistem pendidikan yang seimbang: memelihara akar budaya sambil mendorong pembaruan, menumbuhkan inovasi sambil memperkuat kohesi sosial, dan mengembangkan kemampuan beradaptasi sambil memfasilitasi transformasi.

Tantangan bagi pengembang kurikulum di era disrupsi bukan sekadar memilih antara melestarikan atau memperbarui, melainkan bagaimana mengharmonisasikan keduanya dalam proporsi yang dinamis sesuai dengan konteks. Keseimbangan antara berbagai peranan kurikulum tidak dapat bersifat statis, melainkan harus terus dikalibrasi ulang seiring dengan

perubahan kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan, dan tuntutan zaman.

Inilah esensi dari filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang "memerdekakan manusia secara lahir, batin, dan pikiran"—yakni menciptakan keseimbangan antara pelestarian warisan masa lalu, kekritisan terhadap kondisi masa kini, kreativitas untuk masa depan, kepekaan terhadap lingkungan sosial, serta keberanian untuk bertransformasi.



BAB II
PENGEMBANGAN KURIKULUM

Pendahuluan

Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu *curir* yang berarti pelari dan *curare* yang berarti tempat berpacu. Istilah ini awalnya digunakan dalam dunia olahraga pada masa Romawi Kuno di Yunani, yang merujuk pada jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start hingga garis *finish*. Dalam bahasa Arab, istilah kurikulum dikenal dengan *manhaj*, yang berarti jalan terang yang ditempuh manusia dalam berbagai bidang kehidupan.

Adapun secara istilah sebagaimana dikemukakan oleh S. Nasution, kurikulum merupakan suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar-mengajar. Proses ini berlangsung di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf pengajarnya.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Bab I Ketentuan Umum, menyatakan sebagaimana berikut.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pada Bab II tentang Dasar, Fungsi, dan Tujuan Pendidikan, Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan sebagai berikut.

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pada sistem pendidikan yang diamanatkan oleh undang-undang, kurikulum merupakan bagian terpenting demi terwujudnya tujuan yang telah dirumuskan. Mengingat kurikulum itu sendiri merupakan seperangkat rencana dan pengaturan yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dalam kurikulum mencakup tujuan, isi, bahan pelajaran, dan cara yang digunakan untuk mengajar.

Dengan demikian, pengembangan kurikulum yang merupakan suatu proses perencanaan, pembuatan strategi, dan penyusunan perangkat pembelajaran yang berkelanjutan mencakup beberapa aspek penting terkait dengan tujuan, materi, strategi pembelajaran, serta evaluasi yang dilakukan dalam proses pembelajaran itu sendiri. Pengembangan kurikulum ini juga bertujuan untuk menciptakan sistem pembelajaran yang efektif dan relevan dengan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan tujuan dari pendidikan nasional.

Dalam perjalanannya, kurikulum tidak bersifat statis. Kurikulum dapat diubah atau dimodifikasi secara dinamis sesuai dengan arah perkembangan

zaman. Proses perubahan dan modifikasi ini disebut sebagai proses pengembangan. Istilah *pengembangan* merujuk pada suatu kegiatan yang menghasilkan alat atau cara baru. Pengembangan kurikulum dapat dihentikan atau tidak dilanjutkan apabila penyempurnaan yang dilakukan telah sesuai dengan sistem dan kultur yang berlaku.

Menurut Sukmadinata beberapa sumber pengembangan kurikulum adalah sebagai berikut.

1. Kehidupan dan pekerjaan orang dewasa, di mana isi kurikulum disesuaikan sebagai bekal bagi anak untuk mempersiapkan diri menjalani kehidupan dan pekerjaan di masa dewasa.
2. Budaya masyarakat, yang mencakup seluruh disiplin ilmu sebagai pengetahuan ilmiah, nilai-nilai, perilaku, benda material, serta unsur-unsur kebudayaan lainnya.
3. Anak, sebagai pusat dan sumber kegiatan pembelajaran. Dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum, fokusnya bukan pada apa yang akan diberikan kepada anak, melainkan bagaimana potensi yang dimiliki anak dapat dikembangkan secara optimal.
4. Pengalaman penyusunan kurikulum sebelumnya, baik berupa catatan negatif maupun hasil evaluasi positif dari pelaksanaan kurikulum yang telah dijalankan.
5. Tata nilai dalam masyarakat, termasuk nilai-nilai yang akan diajarkan di sekolah melalui pelaksanaan kurikulum.
6. Kekuasaan sosial-politik, mencakup lembaga-lembaga terkait, arah kebijakan, serta produk-produk politik berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Landasan dan Prinsip Pengembangan Kurikulum

Landasan pendidikan di Indonesia berpedoman pada falsafah Pancasila. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa "Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Pendidikan nasional berfungsi untuk

mengembangkan kemampuan serta membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab (Pasal 2 dan 3). Dengan landasan yang jelas, yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para pengelola pendidikan, seperti guru, dosen, kepala sekolah, pengawas pendidikan, serta seluruh pihak yang terlibat dalam perumusan kebijakan pendidikan di Indonesia.

Robert S. Zais (1976) mengemukakan empat landasan pokok dalam pengembangan kurikulum, yaitu *philosophy and the nature of knowledge*, *society and culture*, *the individual*, dan *learning theory*. Berdasarkan keempat landasan tersebut, perancangan dan pengembangan kurikulum—meliputi pengembangan tujuan (*aims*, *goals*, *objectives*), isi atau materi (*content*), proses pembelajaran (*learning activities*), serta komponen evaluasi (*evaluation*)—harus didasarkan pada landasan filosofis, psikologis, sosiologis, serta ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).

Dalam perspektif Islam, kurikulum berkaitan erat dengan perencanaan pendidikan yang dilakukan secara kontinu. Landasan pengembangan kurikulum dalam Islam berakar pada ajaran Islam itu sendiri, yang mencakup landasan teologis, filosofis, sosiologis, psikologis, dan IPTEK. Prinsip-prinsip yang relevan dalam pengembangan kurikulum Islam antara lain prinsip berasaskan Islam, relevansi, fleksibilitas, efektivitas, dan kontinuitas.

Adapun menurut Permendikbud Nomor 61 Tahun 2014 dan Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024, landasan pengembangan kurikulum meliputi aspek filosofis, psikologis, sosiologis, serta IPTEK. Prinsip-prinsip pengembangannya meliputi relevansi, fleksibilitas, efektivitas, dan inovasi untuk menghasilkan kurikulum yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Berikut ini tiga landasan utama dalam pengembangan kurikulum.

1. Landasan filosofis

Landasan filosofis mencerminkan pengalaman hidup peserta didik, termasuk kebiasaan, latar belakang sosial ekonomi, pendidikan, dan keyakinan. Filsafat sebagai "cinta akan kebijaksanaan" (*love of wisdom*) melibatkan proses berpikir yang mendalam, logis, dan sistematis. Dalam pengertian umum, filsafat adalah cara berpikir secara radikal, menyeluruh, dan mendalam, sebagaimana dikemukakan oleh Socrates. Sementara itu, Plato menyebut filsafat sebagai ilmu pengetahuan tentang kebenaran.

Adapun yang dimaksud dengan landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum adalah asumsi-asumsi atau rumusan yang diperoleh dari hasil berpikir secara mendalam, analitis, logis, dan sistematis (filosofis) dalam merencanakan, melaksanakan, membina, serta mengembangkan kurikulum. Penggunaan filsafat ini berlaku baik dalam pengembangan kurikulum dalam bentuk program (tertulis) maupun dalam bentuk pelaksanaan (operasional) di sekolah.

Kajian filosofis mempelajari hakikat manusia sehingga muncul beberapa asumsi, misalnya bahwa manusia adalah makhluk religius, makhluk sosial, dan makhluk yang berbudaya. Dari telaahan tersebut, filsafat menyoroti tiga pokok persoalan utama, yaitu:

a. hakikat benar dan salah (logika);
b. hakikat baik dan buruk (etika); serta
c. hakikat indah dan jelek (estetika).

Pada dasarnya, pandangan hidup manusia mencakup ketiga aspek tersebut. Oleh karena itu, ketiganya sangat dibutuhkan dalam pendidikan, terutama dalam pengembangan kurikulum. Ketiga aspek ini menjadi landasan dalam menentukan arah dan tujuan pendidikan, isi atau materi pembelajaran, metode atau proses pembelajaran, serta sistem evaluasi untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil pendidikan.

Isi kurikulum atau sumber pengetahuan dirancang untuk mengembangkan kemampuan berpikir manusia dan menyiapkan

keterampilan kerja melalui program serta proses pendidikan yang bersifat praktis. Implikasinya, para pendidik memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi terselenggaranya pendidikan yang bermutu. Pendidik juga dituntut memiliki keunggulan kompetitif, baik secara intelektual maupun moral sehingga dapat menjadi panutan bagi peserta didik.

Dalam filosofi pengembangan kurikulum terdapat beberapa landasan yang digunakan, salah satunya adalah filsafat idealisme. Filsafat ini memandang bahwa kenyataan atau realitas pada hakikatnya bersifat spiritual dan mental, bukan fisik atau material. Oleh karena itu, manusia dipandang sebagai makhluk spiritual, makhluk yang cerdas, dan memiliki tujuan. Pikiran manusia memiliki kemampuan rasional yang memungkinkan untuk menentukan pilihan hidupnya secara sadar.

Berdasarkan pandangan idealisme, tujuan pendidikan seharusnya diarahkan pada pembentukan karakter, pengembangan bakat insani, dan penanaman kebajikan sosial sesuai dengan hakikat kemanusiaan. Tujuan pendidikan ini harus tecermin mulai dari perumusan tujuan pendidikan tingkat pusat (ideal) hingga tujuan operasional dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, kurikulum harus dirancang untuk mendukung pengembangan karakter, potensi, dan nilai-nilai kemanusiaan peserta didik secara utuh.

2. Landasan realisme

Landasan berikutnya adalah landasan realisme, yang berpandangan bahwa manusia harus belajar mengenal realitas kehidupan karena realitas merupakan sumber pengetahuan dan kebenaran. Dalam konteks ini, tujuan pendidikan adalah mengajarkan kepada anak tentang hal-hal yang telah diketahui dan terbukti, dengan mengutamakan pengetahuan yang sudah mantap sebagai hasil dari penelitian ilmiah yang dituangkan secara sistematis dalam berbagai disiplin ilmu.

Sebagai contoh, hewan-hewan dapat dipelajari melalui mata pelajaran zoologi. Aliran realisme menempatkan hal-hal yang umum dan

abstrak pada posisi tertinggi dalam hierarki kurikulum. Konsep dan sistem pengetahuan diorganisasikan ke dalam mata pelajaran seperti etika, politik, dan ekonomi.

Dalam pandangan realisme, pendidik berperan sebagai pusat pendidikan. Pendidik bertanggung jawab sebagai mediator antara peserta didik dan pengetahuan, serta memiliki peran penting dalam mengajarkan realitas dunia kepada anak. Oleh karena itu, sekolah memiliki tanggung jawab untuk mewariskan nilai-nilai dan pengetahuan yang telah teruji kebenarannya melalui proses pendidikan yang terstruktur.

Filsafat realisme dapat dikatakan sebagai kebalikan dari filsafat idealisme. Filsafat realisme memandang bahwa dunia atau realitas bersifat materi, terbentuk dari kesatuan yang nyata, substansial, dan material. Sebaliknya, filsafat idealisme memandang bahwa realitas bersifat mental dan spiritual.

Menurut pandangan realisme, hakikat manusia terletak pada apa yang dilakukannya. Karena segala sesuatu dianggap bersifat materi, tujuan pendidikan sebaiknya dirumuskan untuk membantu peserta didik menyesuaikan diri dengan kehidupan nyata serta melaksanakan tanggung jawab sosialnya.

Oleh karena itu, kurikulum yang didasarkan pada filsafat realisme harus dikembangkan secara komprehensif, mencakup pengetahuan yang bersifat ilmiah (sains), sosial, dan nilai-nilai. Isi kurikulum akan lebih efektif bila diorganisasikan dalam bentuk mata pelajaran (*subject-centered*) karena pendekatan ini, sesuai dengan orientasi realisme yang menekankan pada struktur pengetahuan yang sistematis dan dapat diuji.

3. Landasan pragmatisme

   Landasan pengembangan kurikulum pragmatisme berpandangan bahwa tidak ada sesuatu pun yang dapat dipahami secara intelektual, kecuali dalam hubungannya dengan konteks atau pola tertentu. Dalam pendekatan ini, metode pembelajaran yang ideal bukan berfokus

pada apa yang akan diajarkan kepada peserta didik, melainkan pada kemampuan peserta didik untuk berpikir kritis dan memecahkan permasalahan yang dihadapi. Proses mengajar lebih bersifat eksploratif daripada sekadar menjelaskan.

Dalam aliran pragmatisme, metode lebih diutamakan daripada isi atau mata pelajaran. Perkembangan ilmu pengetahuan pada abad ke-20, banyak dipengaruhi oleh aliran ini karena pendekatannya yang berbasis pada fenomena dan pengalaman nyata sehingga lebih diterima dibandingkan idealisme serta realisme.

Tokoh penting dalam aliran ini adalah Charles Peirce, seorang ahli Matematika, dan William James, seorang psikolog. Mereka mengembangkan prinsip-prinsip utama pragmatisme, yaitu:

a. menolak dogma tentang kebenaran dan nilai-nilai abadi yang telah ada sebelumnya; dan
b. mempromosikan metode pengujian dan verifikasi sebagai dasar penemuan kebenaran.

Menurut pragmatisme, kebenaran tidak bersifat absolut, melainkan dibuktikan melalui keterkaitannya dengan kenyataan, pengalaman, dan perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip-prinsip dasar dalam pengembangan kurikulum sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut ini.

a. Prinsip relevansi

   Relevansi memiliki makna sesuai atau serasi. Jika mengacu pada prinsip relevansi, setidaknya kurikulum harus memperhatikan aspek internal dan eksternal. Secara internal, kurikulum memiliki relevansi antara komponen kurikulum (tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi). Sedangkan secara eksternal komponen itu memiliki relevansi dengan tuntutan sains dan teknologi (relevansi epistemologis), tuntutan dan potensi peserta didik (relevansi psikologis), serta tuntutan dan kebutuhan pengembangan masyarakat (relevansi sosiologis).

b. Prinsip fleksibilitas

Prinsip fleksibilitas menekankan bahwa kurikulum harus memiliki sifat lentur atau dapat disesuaikan. Kurikulum yang baik memuat materi yang solid dan terstruktur, tetapi tetap memungkinkan penyesuaian dalam pelaksanaannya sesuai dengan kondisi regional, waktu, kemampuan, serta latar belakang peserta didik.

Kurikulum ini dirancang untuk mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan masa kini dan masa depan. Fleksibilitas kurikulum memungkinkan penerapannya di berbagai konteks, termasuk bagi peserta didik dengan latar belakang dan kemampuan yang berbeda sehingga pengembangan kurikulum tetap dapat dilakukan sesuai kebutuhan.

c. Prinsip kontinuitas

Kontinuitas dalam pengembangan kurikulum mengacu pada adanya keterkaitan yang konsisten antara kurikulum di berbagai jenjang pendidikan. Hal ini bertujuan untuk menghindari pengulangan materi atau ketidakharmonisan dalam pembelajaran, yang dapat menyebabkan kejenuhan baik bagi pendidik maupun peserta didik.

Selain keterkaitan antarjenjang pendidikan, kurikulum juga harus terintegrasi antarbidang studi sehingga satu bidang dapat melengkapi dan memperkaya pemahaman dalam bidang lainnya. Dengan demikian, kurikulum menjadi lebih terpadu, sistematis, dan bermakna.

d. Prinsip efisiensi

Efisiensi merupakan salah satu prinsip penting yang harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum agar perencanaan yang dibuat benar-benar selaras dengan tujuan yang ingin dicapai. Jika suatu program pembelajaran dapat dilaksanakan dalam waktu satu bulan dan mampu memenuhi seluruh tujuan yang telah ditetapkan, hal tersebut tidak menjadi masalah.

Justru hal ini memberi kesempatan bagi peserta didik untuk mengikuti program pembelajaran lain. Prinsip efisiensi menekankan pentingnya pemanfaatan sumber daya pendidikan secara optimal, cermat, dan tepat sehingga hasil pembelajaran yang diperoleh menjadi maksimal serta memadai.

e. Prinsip efektivitas

Pengembangan kurikulum pendidikan perlu mempertimbangkan prinsip efektivitas, yaitu sejauh mana rencana program pembelajaran dapat dicapai atau diimplementasikan dengan baik. Dalam prinsip ini, terdapat dua aspek penting yang harus diperhatikan, yaitu efektivitas mengajar pendidik dan efektivitas belajar peserta didik. Keduanya saling berkaitan dan berkontribusi terhadap keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran secara keseluruhan.

Sedangkan prinsip khusus, sebagaimana dikemukakan oleh Sukmadinata mencakup lima hal berikut.

a. Prinsip penentuan tujuan pendidikan

Tujuan pendidikan mencakup tujuan yang bersifat umum dan khusus. Dalam perumusan tujuan pendidikan didasarkan pada sumber-sumber, seperti ketentuan dan kebijakan pemerintah, survei mengenai persepsi masyarakat tentang kebutuhan, survei tentang pandangan para ahli dalam bidang-bidang tertentu, survei tentang kualitas sumber daya manusia, serta pengalaman negara lain dalam menghadapi masalah yang sama.

b. Prinsip pemilihan isi pendidikan atau kurikulum

Dalam menentukan isi kurikulum, terdapat beberapa pertimbangan yang dapat dijadikan dasar acuan. *Pertama*, tujuan pendidikan perlu dijabarkan ke dalam bentuk perilaku hasil belajar yang spesifik dan sederhana. *Kedua*, isi bahan pelajaran harus mencakup tiga aspek utama, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. *Ketiga*, unit-unit kurikulum harus disusun dalam urutan yang logis dan sistematis sehingga ketiga ranah pembelajaran tersebut

dapat diberikan secara simultan dalam situasi belajar yang berkesinambungan.

c. Prinsip pemilihan proses belajar-mengajar

Dalam proses belajar-mengajar, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut.

1) Kecocokan metode atau teknik pembelajaran dengan materi pelajaran yang akan disampaikan.
2) Variasi metode atau teknik pembelajaran yang digunakan untuk mengakomodasi perbedaan individu peserta didik.
3) Keefektifan metode atau teknik pembelajaran dalam mengaktifkan peserta didik serta mendorong berkembangnya kemampuan baru.

Dengan memperhatikan ketiga aspek tersebut, proses pembelajaran diharapkan menjadi lebih bermakna, interaktif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

d. Prinsip pemilihan media dan alat pengajaran

Dalam proses pemilihan media dan alat pengajaran, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

1) melakukan perencanaan dan inventarisasi terhadap media atau alat bantu pembelajaran yang tersedia; dan
2) mengorganisasikan alat dan media tersebut ke dalam bahan pembelajaran, baik dalam bentuk modul maupun buku paket.

Dengan perencanaan dan pengorganisasian yang tepat, media dan alat pengajaran dapat digunakan secara optimal untuk menunjang efektivitas proses belajar-mengajar.

e. Prinsip berkenaan dengan penilaian

Penilaian merupakan tahap akhir dalam kegiatan belajar-mengajar. Dalam proses penilaian, terdapat tiga hal dasar yang perlu diperhatikan.

1) Merencanakan alat penilaian
   Tahap merencanakan alat penilaian mencakup penentuan karakteristik kelas dan usia peserta didik, pemilihan bentuk tes atau ujian, serta jumlah butir soal yang akan disusun.
2) Menyusun alat penilaian
   Langkah-langkah untuk menyusun alat penilaian, yaitu merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan tiga ranah (kognitif, afektif, dan psikomotorik), mendeskripsikan tujuan dalam bentuk perilaku yang dapat diamati, mengaitkannya dengan materi pelajaran, dan menyusun butir-butir soal yang sesuai.
3) Mengelola hasil penilaian
   Dalam tahap ini, penting untuk memperhatikan prinsip-prinsip penilaian, termasuk norma yang digunakan dalam pengolahan hasil tes serta penerapan skor standar.

Dengan memperhatikan ketiga aspek tersebut, penilaian akan memberikan gambaran yang objektif dan menyeluruh terhadap pencapaian hasil belajar peserta didik.

Komponen Pengembangan Kurikulum

Komponen dalam pengembangan kurikulum memiliki kaitan erat dengan tujuan yang ingin dicapai dalam proses pendidikan. Setiap komponen saling mendukung untuk menciptakan pembelajaran yang terarah, efektif, dan bermakna.

Berikut ini merupakan penjelasan mengenai komponen-komponen kurikulum.

1. Komponen tujuan
   Komponen tujuan dalam kurikulum berkaitan erat dengan arah atau hasil akhir yang ingin dicapai melalui proses pendidikan. Dalam skala makro, rumusan tujuan kurikulum sangat dipengaruhi oleh filsafat hidup atau sistem nilai yang dianut oleh masyarakat. Bahkan, tujuan

tersebut mencerminkan masyarakat ideal yang ingin diwujudkan melalui pendidikan.

Tujuan pendidikan memiliki berbagai tingkatan, mulai dari tujuan yang sangat umum hingga tujuan yang lebih khusus, spesifik, dan dapat diukur yang kemudian dikenal sebagai kompetensi. Secara umum, tujuan pendidikan diklasifikasikan menjadi empat tingkatan sebagai berikut.

a. Tujuan pendidikan nasional (TPN)
   Tujuan pendidikan nasional yang bersumber dari sistem nilai Pancasila secara tegas dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3. Disebutkan bahwa "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwakepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab."

b. Tujuan institusional (TI)
   Tujuan institusional adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. Tujuan ini merupakan tujuan antara dalam rangka mencapai tujuan umum pendidikan nasional, yang dirumuskan dalam bentuk kompetensi lulusan pada setiap jenjang pendidikan. Contohnya, meliputi standar kompetensi untuk jenjang pendidikan dasar, menengah, kejuruan, dan pendidikan tinggi.

c. Tujuan kurikuler (TK)
   Tujuan kurikuler adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. Tujuan kurikuler juga pada dasarnya merupakan tujuan antara untuk mencapai tujuan lembaga pendidikan. Dengan demikian, setiap tujuan kurikuler

harus dapat mendukung dan diarahkan untuk mencapai tujuan institusional.

d. Tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran (TP)
Tujuan pembelajaran merupakan bagian dari tujuan kurikuler, dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik setelah mempelajari suatu bahasan tertentu dalam bidang studi tertentu, dalam satu kali pertemuan. Karena pendidik adalah pihak yang paling memahami kondisi di lapangan, termasuk karakteristik peserta didik di sekolah tempat ia mengajar maka perumusan tujuan pembelajaran merupakan tanggung jawab pendidik.

2. Komponen isi atau materi pelajaran
Isi kurikulum merupakan komponen yang berkaitan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki oleh peserta didik. Isi kurikulum mencakup seluruh aspek, baik yang berkaitan dengan pengetahuan atau materi pelajaran—yang biasanya tecermin dalam setiap mata pelajaran—maupun aktivitas dan kegiatan peserta didik. Baik materi maupun aktivitas tersebut disusun dan diarahkan secara sistematis untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

3. Komponen metode atau strategi
Strategi dan metode merupakan komponen yang sangat penting dalam proses pengembangan kurikulum. Perumusan strategi pembelajaran harus disesuaikan dengan berbagai kondisi dan situasi yang ada, termasuk karakteristik peserta didik, materi pelajaran, serta tujuan yang ingin dicapai. Penyesuaian ini penting agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal dan proses belajar menjadi lebih efektif dan bermakna.

4. Komponen evaluasi
Tujuan evaluasi yang komprehensif dapat ditinjau dari tiga dimensi berikut.

a. Dimensi I

1) Formatif

Evaluasi dilakukan sepanjang pelaksanaan kurikulum. Data dikumpulkan dan dianalisis untuk menemukan masalah serta mengadakan perbaikan sedini mungkin.

2) Sumatif

Evaluasi dilakukan pada akhir jangka waktu tertentu, seperti akhir semester, akhir tahun pelajaran, atau periode lima tahunan. Tujuannya adalah untuk menilai efektivitas kurikulum secara keseluruhan dengan memanfaatkan seluruh data yang dikumpulkan selama proses implementasi.

b. Dimensi II

1) Proses

Evaluasi difokuskan pada metode dan proses pelaksanaan kurikulum. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana proses dan strategi yang digunakan telah mendukung implementasi kurikulum secara efektif.

2) Produk

Evaluasi difokuskan pada hasil nyata dari pelaksanaan kurikulum. Hal ini mencakup dokumen seperti silabus, satuan pelajaran, dan media pembelajaran yang disusun oleh pendidik, serta hasil karya peserta didik seperti tes, karangan, makalah, tesis, dan sejenisnya.

c. Dimensi III

1) Operasi

Evaluasi dilakukan terhadap keseluruhan proses pengembangan kurikulum, mulai dari perencanaan, desain, implementasi, administrasi, pengawasan, pemantauan, hingga penilaian. Termasuk pula aspek pendukung seperti biaya, tenaga pengajar, penerimaan peserta didik, dan keseluruhan kegiatan operasional lembaga pendidikan.

2) Hasil belajar peserta didik

Evaluasi difokuskan pada capaian hasil belajar peserta didik yang berkaitan dengan tujuan kurikulum. Penilaian dilakukan berdasarkan standar yang telah ditentukan serta mempertimbangkan determinan kurikulum, misi lembaga pendidikan, dan tuntutan dari pemangku kepentingan eksternal (konsumen luar).

Model Pengembangan Kurikulum

Berikut adalah model-model pengembangan kurikulum yang umum digunakan dalam dunia pendidikan.

1. Model Tyler

   Model Tyler merupakan salah satu model yang paling dikenal dalam pengembangan kurikulum, terutama karena fokus utamanya pada fase perencanaan. Gagasan ini dijelaskan dalam bukunya yang berjudul *Basic Principles of Curriculum and Instruction*. Dalam model ini, dikenal istilah *The Tyler Rationale*, yaitu suatu proses pemilihan tujuan pendidikan yang secara luas diterapkan dalam pengembangan kurikulum.

   Meskipun Tyler mengajukan model yang bersifat komprehensif, bagian pertama dari model ini—yakni pemilihan tujuan—mendapat perhatian paling besar dari para pendidik. Tyler menyarankan agar perencana kurikulum memperhatikan beberapa hal penting dalam proses perencanaan tersebut.

   a. Mengidentifikasi tujuan umum dengan mengumpulkan data dari tiga sumber utama, yaitu peserta didik, kehidupan di luar sekolah, dan mata pelajaran.
   b. Menyaring tujuan-tujuan umum tersebut melalui dua filter, yakni filsafat pendidikan dan psikologi belajar untuk memastikan kesesuaiannya dengan nilai-nilai serta prinsip pembelajaran.

c. Tujuan-tujuan umum yang lolos dari proses penyaringan ini kemudian dirumuskan menjadi tujuan-tujuan pengajaran yang lebih spesifik, yaitu sebagai berikut.

1) Kebutuhan dan minat peserta didik
   Dengan meneliti kebutuhan serta minat peserta didik, pengembang kurikulum dapat mengidentifikasi serangkaian tujuan pendidikan yang potensial.

2) Analisis kehidupan kontemporer
   Menganalisis kehidupan masyarakat, baik di lingkungan lokal maupun dalam skala yang lebih luas merupakan langkah penting dalam merumuskan tujuan umum. Dari kebutuhan masyarakat inilah dapat muncul berbagai tujuan pendidikan yang relevan.

3) Mata pelajaran
   Materi pelajaran yang diajarkan di sekolah juga menjadi sumber penting dalam merumuskan tujuan-tujuan pendidikan.

2. Model Nicholis

Terdapat lima langkah atau tahapan yang diperlukan dalam proses pengembangan kurikulum secara berkelanjutan (*continuous curriculum process*). Langkah-langkah tersebut menurut Nicholls adalah sebagai berikut:

a. *situational analysis* (analisis situasional);
b. *selection of objectives* (pemilihan tujuan);
c. *selection and organization of content* (pemilihan dan pengorganisasian isi);
d. *selection and organization of methods* (pemilihan dan pengorganisasian metode); dan
e. *evaluation* (evaluasi).

3. Model Skilbek

Model Skilbeck menekankan bahwa pengembangan kurikulum harus bersifat dinamis dan interaktif sehingga memungkinkan penyesuaian

dengan konteks lokal, perkembangan zaman, dan kondisi tertentu. Model ini memberikan fleksibilitas untuk memulai proses pengembangan kurikulum dari elemen mana pun, tanpa harus mengikuti urutan yang kaku seperti pada model rasional—misalnya dapat dimulai dari analisis situasi, perumusan tujuan, atau penyusunan program.

Menurut Skilbeck langkah-langkah pengembangan kurikulum adalah sebagai berikut:

a. menganalisis situasi;
b. memformulasikan tujuan;
c. menyusun program;
d. interpretasi dan implementasi; dan
e. monitoring, *feedback*, penilaian, dan rekonstruksi.

4. Model administratif (*line staff*)

Model administratif atau garis-komando memiliki langkah-langkah sebagai berikut.

a. Administrator pendidikan atau *top administrative officers* (pemimpin) membentuk komisi pengarah.
b. Komisi pengarah (*steering committee*) bertugas merumuskan rencana umum, mengembangkan prinsip-prinsip sebagai pedoman, serta menyiapkan pernyataan filosofi dan tujuan-tujuan untuk seluruh wilayah sekolah.
c. Dibentuk komisi kerja pengembangan kurikulum yang bertugas mengembangkan kurikulum secara operasional, mencakup seluruh komponen kurikulum dengan mempertimbangkan landasan serta prinsip-prinsip pengembangan kurikulum.
d. Komisi pengarah kemudian memeriksa hasil kerja komisi kerja dan menyempurnakan bagian-bagian tertentu jika dianggap perlu. Karena pengembangan kurikulum dengan model administratif ini didasarkan pada konsep, inisiatif, dan arahan dari atas ke bawah, prosesnya memerlukan waktu yang cukup lama hingga dapat berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh tuntutan untuk mempersiapkan para pelaksana kurikulum secara menyeluruh.

5. Model dari bawah (*gross-roats*)

   Berikut ini adalah model pengembangan kurikulum dari bawah (*gras-sroots model*) yang menekankan inisiatif dan partisipasi aktif dari para pendidik di tingkat pelaksana.

   a. Inisiatif pengembangan datangnya dari bawah (para pengajar).
   b. Tim pengajar dari beberapa sekolah ditambah narasumber lain dan orang tua peserta didik atau masyarakat luas yang relevan.
   c. Pihak atasan memberikan bimbingan dan dorongan.
   d. Untuk pemantapan konsep pengembangan yang telah dirintisnya diadakan lokakarya untuk mencari input yang diperlukan.



BAB III

SEJARAH PERKEMBANGAN KURIKULUM

Pendahuluan

Perjalanan pendidikan di Indonesia tidak terlepas dari dinamika sosial, politik, dan kebutuhan zaman yang terus berkembang. Sejak Indonesia merdeka, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menyusun kurikulum pendidikan nasional yang sesuai dengan tujuan pembentukan karakter bangsa, peningkatan mutu sumber daya manusia, serta penyesuaian terhadap tantangan global.

Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Oleh karena itu, perubahan dan pembaruan kurikulum menjadi hal yang wajar dan diperlukan seiring perubahan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi.

Sejak diberlakukannya Rentjana Pelajaran 1947 sebagai kurikulum pertama pascakemerdekaan, Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan kurikulum. Perubahan tersebut antara lain terjadi pada tahun 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, 2013, hingga yang terbaru yakni kurikulum merdeka. Setiap kurikulum hadir dengan pendekatan, fokus, dan karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan konteks sosial serta kebijakan pendidikan pada masanya.

Dalam pembahasan ini, akan diuraikan perjalanan sejarah perubahan kurikulum di Indonesia mulai dari tahun 1947 hingga kurikulum merdeka, dengan menyoroti latar belakang, tujuan, ciri khas, serta keunggulan dan kelemahan masing-masing kurikulum sebagai bagian dari proses transformasi pendidikan nasional.

Kurikulum 1947 (Rentjana Pelajaran 1947)

Kurikulum 1947 merupakan kurikulum pendidikan nasional pertama yang disusun dan diterapkan setelah Indonesia merdeka (Fuziawati, 2024: 160—178). Pada masa sebelum kemerdekaan, sistem pendidikan yang berlaku di Indonesia disusun oleh pemerintah kolonial Belanda dan Jepang, yang secara substansi tidak mencerminkan nilai-nilai kebangsaan Indonesia (Ramdan dan Manurung, 2019: 88—95). Setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, pemerintah Indonesia memandang penting untuk menyusun sistem pendidikan nasional yang merdeka termasuk dalam hal kurikulum.

Rentjana Pelajaran 1947 lahir dalam situasi sosial-politik dan ekonomi yang belum stabil. Pada saat itu, Indonesia masih berada dalam masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari Belanda yang berusaha kembali menguasai wilayah Indonesia. Kendati demikian, semangat untuk membentuk sistem pendidikan nasional tetap menjadi prioritas. Kurikulum ini mulai dirancang pada tahun 1946 dan diberlakukan pada tahun 1947, dengan mengadopsi dan memodifikasi sistem pendidikan Belanda yang sebelumnya telah ada, tetapi disesuaikan dengan cita-cita pendidikan nasional.

Kurikulum 1947 memiliki beberapa karakteristik utama sebagai berikut.

1. Menekankan pada pembentukan karakter dan kebangsaan. Kurikulum ini bertujuan membentuk manusia Indonesia merdeka yang berkepribadian dan berwatak kebangsaan.
2. Belum berbentuk kurikulum dalam arti yang lengkap. Rentjana Pelajaran 1947 lebih menyerupai daftar mata pelajaran dan jam pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik di berbagai jenjang pendidikan.
3. Isi materi pelajaran masih bersifat akademik dan teoritis. Hal ini menunjukkan bahwa kurikulum masih banyak mengambil model pendidikan kolonial.
4. Pendekatan pengajaran bersifat *subject-centered*. Proses belajar masih berpusat pada penguasaan materi pelajaran oleh peserta didik, bukan pada pengembangan keterampilan atau sikap.
5. Kurikulum masih memiliki ruang lingkup yang sangat terbatas karena penyusunan dan penerapannya terkendala oleh situasi perang, kekurangan tenaga pendidik, serta minimnya infrastruktur pendidikan.

Struktur Rentjana Pelajaran 1947 disusun dalam bentuk mata pelajaran inti. Tabel berikut memperlihatkan contoh struktur kurikulum di jenjang sekolah rakyat (setara SD saat ini).

Mata Pelajaran	Keterangan
Membaca dan Menulis	Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dasar
Berhitung	Dasar aritmetika
Pengetahuan Umum	Geografi, Sejarah, dan Alam
Pendidikan Agama	Disesuaikan dengan agama peserta didik
Kesenian	Musik, menggambar, dan kesenian daerah
Kewarganegaraan	Pendidikan moral dan kebangsaan
Kegiatan Praktik	Kegiatan tangan, keterampilan dasar

Meskipun belum menyeluruh, kurikulum ini telah mencoba mengenalkan pelajaran yang berhubungan dengan nilai kebangsaan dan keterampilan praktis.

Berikut adalah beberapa kelebihan kurikulum 1947.

1. Kurikulum 1947 merupakan dasar pertama bagi sistem pendidikan Indonesia yang berorientasi pada kepentingan dan kebutuhan nasional.
2. Nilai-nilai kebangsaan dan semangat perjuangan menjadi landasan utama dalam penyusunan kurikulum, mencerminkan aspirasi bangsa yang baru merdeka.
3. Kurikulum 1947 menunjukkan kemampuan bangsa Indonesia dalam memodifikasi sistem pendidikan warisan kolonial agar sesuai dengan kebutuhan dan karakter masyarakat Indonesia.

Namun, kurikulum 1947 juga memiliki berbagai kelemahan yang tidak dapat diabaikan antara lain sebagai berikut.

1. Kurikulum 1947 belum mencakup tujuan, isi, strategi, dan evaluasi secara menyeluruh.
2. Banyak pendidik belum memiliki kemampuan pedagogis yang memadai untuk menerapkan kurikulum dengan efektif.
3. Kurikulum lebih banyak diarahkan pada pengajaran berbasis pengetahuan teoretis, belum menekankan pada aspek keterampilan dan nilai kehidupan.

Kurikulum 1952 (Rentjana Pelajaran Terurai 1952)

Kurikulum 1952 dikenal sebagai Rentjana Pelajaran Terurai karena kurikulum ini merupakan hasil penyempurnaan dari kurikulum 1947 yang sebelumnya masih sangat sederhana dan bersifat umum. Disusun pada masa awal stabilitas politik Indonesia setelah pengakuan kedaulatan dari Belanda, kurikulum ini menandai langkah awal pemerintah Indonesia dalam memperjelas arah pendidikan nasional secara lebih sistematis dan terstruktur (Febriyenti, 2023: 195—214).

Pada masa ini, pemerintah mulai menyadari pentingnya pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada penguasaan pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan sikap dan keterampilan. Oleh karena itu, kurikulum

1952 dirancang dengan tujuan untuk memperjelas dan memperluas isi kurikulum serta mempertegas peran pendidik dalam proses pembelajaran.

Ciri-ciri utama kurikulum 1952 adalah sebagai berikut.

1. Kurikulum 1952 mencantumkan dengan jelas tujuan pendidikan nasional, yang antara lain untuk membentuk manusia Indonesia yang cerdas, terampil, dan berbudi pekerti luhur.
2. Setiap mata pelajaran disusun dalam bentuk satuan pelajaran yang disebut "rencana pelajaran terurai", memuat topik, pokok bahasan, dan cakupan waktu.
3. Pendekatan pengajaran masih *subject-centered*, tetapi mulai memberi ruang pada pendekatan yang lebih kontekstual sesuai dengan kehidupan peserta didik.
4. Bahasa pengantar dalam pembelajaran menggunakan Bahasa Indonesia, yang pada masa sebelumnya masih bercampur dengan bahasa Belanda.
5. Penekanan pada pendidikan moral dan agama sebagai bagian dari upaya membentuk watak bangsa.

Struktur kurikulum disusun dalam mata pelajaran pokok dengan rincian waktu dan bahan ajar yang lebih sistematis dibandingkan kurikulum sebelumnya. Salah satu ciri utamanya adalah adanya Rencana Pelajaran Terurai, sebagaimana tergambarkan dalam tabel berikut.

Mata Pelajaran	Keterangan
Bahasa Indonesia	Menjadi bahasa pengantar dan mata pelajaran utama
Ilmu Bumi dan Sejarah	Pengetahuan sosial yang ditanamkan sejak dini
Ilmu Alam	Materi lebih lengkap dan mulai dikenalkan secara praktis
Pendidikan Agama	Diberikan sesuai dengan agama peserta didik, lebih terstruktur
Kewarganegaraan	Berisi nilai moral, hukum dasar negara, dan tata negara
Kesenian dan Olahraga	Penekanan pada pengembangan jasmani dan estetika

Kerajinan Tangan dan Kegiatan Praktis	Mengarah pada pendidikan keterampilan dasar

Berikut adalah beberapa kelebihan kurikulum 1952.

1. Tujuan pendidikan dirumuskan secara jelas sehingga menjadi panduan yang lebih tegas bagi pendidik dalam mengelola pembelajaran.
2. Materi pelajaran lebih rinci dan terstruktur sehingga dapat memudahkan pendidik dalam merencanakan kegiatan belajar-mengajar.
3. Penggunaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar menjadi bagian dari upaya memperkuat identitas nasional.
4. Nilai moral dan agama ditekankan, sejalan dengan semangat membentuk karakter bangsa yang berbudaya dan beriman.

Namun, kurikulum 1952 juga memiliki berbagai kelemahan yang tidak dapat diabaikan antara lain sebagai berikut.

1. Pendekatan masih berpusat pada pendidik dan isi pelajaran, belum mengutamakan partisipasi aktif peserta didik dalam belajar.
2. Beban materi cukup padat sehingga pendidik cenderung menekankan penyampaian materi tanpa cukup ruang untuk eksplorasi atau pengembangan keterampilan berpikir kritis.
3. Pelaksanaan sangat tergantung pada kesiapan pendidik dan sarana prasarana, yang pada saat itu masih terbatas di berbagai daerah.

Kurikulum 1964 (Rentjana Pendidikan 1964)

Kurikulum 1964 atau yang dikenal dengan sebutan Rentjana Pendidikan 1964 lahir dalam konteks sosial-politik Indonesia yang sedang mengalami perubahan signifikan. Masa ini merupakan periode akhir kepemimpinan Presiden Soekarno dengan ideologi Nasakom (nasionalisme, agama, dan komunisme) yang memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk sistem pendidikan.

Kurikulum ini disusun dengan semangat untuk membentuk "manusia Pancasilais sejati", yaitu individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara ideologis (Ananda dan Hudaidah, 2021: 102—108). Pemerintah berupaya membentuk peserta didik yang seimbang dalam

aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Oleh karena itu, kurikulum ini memberikan perhatian besar pada keseimbangan isi pendidikan melalui konsep Pancawardhana.

Salah satu ciri khas utama dari kurikulum 1964 adalah pengelompokan isi pendidikan ke dalam lima bidang utama yang dikenal dengan istilah Pancawardhana, yaitu:

1. pengembangan moral;
2. pengembangan kecerdasan;
3. pengembangan emosional atau perasaan;
4. pengembangan keterampilan (karya); dan
5. pengembangan jasmani.

Konsep Pancawardhana ini diimplementasikan dalam kurikulum sebagai upaya menyusun pendidikan yang menyeluruh (holistik). Selain itu, kurikulum ini menekankan pentingnya kegiatan praktik dan keterlibatan aktif peserta didik dalam proses pembelajaran.

Karakteristik lainnya mencakup beberapa hal berikut.

1. Muatan nasionalisme dan ideologi negara sangat dominan dalam materi pelajaran.
2. Penekanan pada pendidikan dasar enam tahun sebagai fondasi utama pendidikan nasional.
3. Mata pelajaran disusun dalam kelompok bidang yang terintegrasi, bukan hanya sebagai unit-unit terpisah.

Berikut adalah gambaran pengelompokan mata pelajaran menurut Pancawardhana.

Bidang Pancawardhana	Contoh Mata Pelajaran
Pengembangan moral	Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan
Pengembangan kecerdasan	Bahasa, Ilmu Alam, dan Ilmu Sosial
Pengembangan emosional	Seni Musik, Seni Rupa, dan Sastra
Pengembangan keterampilan	Kegiatan tangan, Kerajinan, dan Praktik pertanian atau industri
Pengembangan jasmani	Olahraga dan Kesehatan

Setiap mata pelajaran diharapkan mendukung pembentukan manusia Indonesia yang utuh, dengan penekanan pada praktik dan keterlibatan langsung peserta didik dalam proses pembelajaran.

Berikut adalah beberapa kelebihan kurikulum 1964.

1. Mengusung pendekatan holistik dalam pendidikan, melalui konsep Pancawardhana yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara seimbang.
2. Menekankan pendidikan karakter dan nasionalisme sesuai dengan semangat ideologi negara saat itu.
3. Lebih fokus pada kegiatan praktik, termasuk dalam bidang keterampilan dan jasmani yang membekali peserta didik dengan kecakapan hidup dasar.

Namun, kurikulum 1964 juga memiliki berbagai kelemahan yang tidak dapat diabaikan antara lain sebagai berikut.

1. Terlalu kental dengan muatan ideologi politik sehingga rentan terhadap perubahan kebijakan jika terjadi pergeseran kekuasaan.
2. Penerapannya kurang efektif di daerah, terutama karena keterbatasan sarana dan tenaga pendidik yang mampu mengelola pendekatan integratif.
3. Konsep Pancawardhana sulit diterapkan secara konkret dalam proses pembelajaran karena belum tersedia panduan teknis yang memadai.

Kurikulum 1968

Kurikulum 1968 lahir dalam masa awal pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Transisi kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru membawa serta arah baru dalam sistem pemerintahan, termasuk bidang pendidikan (Marzuqi dan Ahid, 2023: 99—116). Salah satu reaksi terhadap kurikulum 1964 adalah pengurangan muatan ideologis yang terlalu dominan, disertai dengan upaya menyusun kembali struktur pendidikan agar lebih stabil dan sistematis.

Pemerintah Orde Baru menekankan pentingnya pembangunan nasional yang terencana dan pendidikan dianggap sebagai sarana utama untuk

menciptakan manusia pembangunan. Oleh karena itu, kurikulum 1968 dirancang untuk menekankan keseimbangan antara pembentukan watak (sikap), pengetahuan (kognitif), dan keterampilan (psikomotorik), sekaligus memperjelas struktur jenjang pendidikan formal di Indonesia.

Ciri utama kurikulum 1968 adalah pendekatan yang lebih terstruktur dan pragmatis, dengan muatan ideologis yang lebih netral dibanding kurikulum sebelumnya. Beberapa karakteristik pentingnya antara lain sebagai berikut.

1. Pemisahan jenjang pendidikan secara tegas menjadi pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.
2. Penekanan pada pembentukan manusia Pancasila yang taat beragama, berakhlak mulia, cerdas, terampil, dan sehat jasmani.
3. Pembelajaran berbasis mata pelajaran dengan penguatan pada materi inti (Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, serta Pendidikan Moral Pancasila).
4. Fokus pada pengetahuan dasar serta pengurangan beban ideologis seperti yang terdapat dalam kurikulum 1964.
5. Penggunaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar utama, menguatkan semangat nasionalisme dan identitas kebangsaan.

Struktur kurikulum didesain secara sistematis dengan pengelompokan pelajaran inti dan pelajaran tambahan. Berikut contoh struktur mata pelajaran di jenjang SD.

Kelompok Mata Pelajaran	Contoh Mata Pelajaran
Pelajaran Pokok	Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, dan Ilmu Sosial
Pelajaran Moral dan Keagamaan	Pendidikan Moral Pancasila dan Pendidikan Agama
Pengembangan Jasmani dan Seni	Pendidikan Jasmani dan Kesenian
Kegiatan Keterampilan	Kerajinan Tangan dan Prakarya

Berikut adalah beberapa kelebihan kurikulum 1968.

1. Lebih netral secara ideologis sehingga kurikulum ini relatif stabil dalam implementasi jangka panjang.
2. Struktur pembelajaran lebih jelas dan terorganisasi, memudahkan pendidik dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran.
3. Penekanan pada ilmu pengetahuan dasar membantu peserta didik membangun fondasi akademik yang kuat.
4. Memperkuat Pendidikan Moral Pancasila sebagai dasar pembentukan karakter bangsa yang sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan.

Namun, kurikulum 1968 juga memiliki berbagai kelemahan yang tidak dapat diabaikan antara lain sebagai berikut.

1. Fokus utama masih pada hafalan dan penguasaan materi, bukan pada pengembangan berpikir kritis dan pemecahan masalah.
2. Kurang memberi ruang untuk keberagaman dan potensi lokal karena kurikulum dirancang secara terpusat serta seragam di seluruh Indonesia.
3. Pendekatan pembelajaran masih *teacher-centered* sehingga partisipasi aktif peserta didik dalam proses belajar belum optimal.
4. Kurangnya integrasi lintas bidang, menyebabkan mata pelajaran terkesan terpisah-pisah (fragmentaris).

Kurikulum 1984 (Penyempurnaan Kurikulum 1975)

Kurikulum 1984 muncul sebagai respons atas berbagai kritik terhadap kurikulum 1975, yang dianggap terlalu menekankan aspek kognitif dan membebani pendidik dengan administrasi pembelajaran yang rumit. Penyempurnaan ini dilakukan melalui pendekatan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada proses belajar peserta didik.

Pemerintah pada masa itu menyadari bahwa pembelajaran tidak cukup hanya berorientasi pada pencapaian tujuan yang bersifat mekanistik, tetapi juga perlu menekankan proses dan keterlibatan aktif peserta didik dalam kegiatan belajar (Setiyorini dan Setiawan, 2023: 1—12). Oleh karena itu,

kurikulum 1984 dikenal luas sebagai kurikulum yang berorientasi pada pendekatan belajar aktif peserta didik atau lebih dikenal dengan istilah CBSA (cara belajar siswa aktif) (Mawaddah, 2019: 293—296).

Kurikulum 1984 membawa sejumlah inovasi dalam pendekatan dan pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Beberapa karakteristik penting kurikulum ini antara lain sebagai berikut.

1. Pendekatan belajar aktif yang mendorong peserta didik untuk aktif mencari, menemukan, dan mengkonstruksi pengetahuannya sendiri.
2. Pendekatan proses yang menekankan tidak hanya pada hasil belajar, tetapi juga pada bagaimana proses belajar berlangsung.
3. Pendekatan spiral, di mana materi pelajaran disusun dari yang sederhana ke kompleks dan dari konkret ke abstrak, serta disampaikan secara berulang dengan kedalaman bertahap.
4. Pengintegrasian antarmata pelajaran meskipun tetap dibedakan per mata pelajaran, tetapi terdapat usaha mengaitkan satu pelajaran dengan pelajaran lain secara tematik
5. Perencanaan yang efisien, yaitu dengan mengurangi beban administrasi pendidik dibandingkan kurikulum 1975, tetapi tetap mempertahankan unsur perencanaan pembelajaran.

Struktur kurikulum disusun berdasarkan prinsip pendekatan spiral dan dikembangkan untuk setiap jenjang pendidikan secara berkesinambungan. Kurikulum ini tetap mempertahankan pengelompokan mata pelajaran inti, dengan adanya integrasi antara pendidikan umum dan pendidikan karakter.

Berikut ini contoh struktur kurikulum untuk jenjang sekolah dasar.

Kelompok Mata Pelajaran	Contoh Mata Pelajaran
Pendidikan Agama dan Moral	Pendidikan Agama dan Pendidikan Moral Pancasila
Bahasa dan Sastra	Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah
Ilmu Pengetahuan	Matematika, IPA, dan IPS
Pendidikan Jasmani dan Seni	Pendidikan Jasmani dan Seni Budaya
Keterampilan	Kerajinan dan Prakarya

Berikut adalah beberapa kelebihan kurikulum 1984.

1. Mendorong partisipasi aktif peserta didik sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan tidak sekadar hafalan.
2. Memberikan ruang pada kreativitas peserta didik karena pembelajaran tidak lagi terpaku pada instruksi yang kaku.
3. Lebih menekankan aspek proses daripada hasil, sesuai dengan prinsip pendidikan yang humanistik.
4. Mengakomodasi perbedaan gaya belajar peserta didik karena mendorong penggunaan berbagai metode pembelajaran.

Namun, kurikulum 1984 juga memiliki berbagai kelemahan yang tidak dapat diabaikan antara lain sebagai berikut.

1. Implementasi CBSA belum seragam di seluruh wilayah karena masih banyak pendidik yang belum memahami pendekatan ini secara mendalam.
2. Sarana dan prasarana belum mendukung pembelajaran aktif, terutama di sekolah-sekolah dengan keterbatasan sumber daya.
3. Beberapa pendidik merasa kesulitan mengelola kelas aktif sehingga cenderung kembali ke metode ceramah.
4. Evaluasi belum sepenuhnya selaras dengan pendekatan proses karena sistem ujian masih berfokus pada hasil akhir.

Kurikulum 1994 dan Suplemen Kurikulum 1999

Kurikulum 1994 disusun sebagai hasil evaluasi terhadap kurikulum 1984 yang dalam pelaksanaannya menghadapi berbagai kendala, terutama dalam penerapan CBSA. Banyak pendidik kesulitan menerapkan pembelajaran aktif karena keterbatasan pelatihan, sarana prasarana, serta belum matangnya pemahaman terhadap strategi pembelajaran yang sesuai. Selain itu, terjadi ketimpangan antara beban belajar peserta didik dengan kemampuan mereka serta adanya tumpang tindih materi pelajaran (Shinta, 2021: 3—5).

Dengan demikian, kurikulum 1994 hadir dengan semangat penyederhanaan dan penyelarasan. Pemerintah mencoba memadukan unsur positif dari kurikulum sebelumnya sambil mengatasi kelemahan-kelemahan yang

muncul. Empat tahun setelah diberlakukan, kurikulum ini disempurnakan melalui suplemen kurikulum 1999 sebagai tanggapan atas perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat.

Kurikulum 1994 menekankan pada penyampaian materi pelajaran secara padat dan sistematis, dengan pengaturan waktu yang cukup ketat. Beberapa karakteristik utama kurikulum ini antara lain sebagai berikut.

1. Pembelajaran klasikal, di mana kegiatan belajar-mengajar masih dominan menggunakan metode ceramah dengan pendekatan yang terpusat pada pendidik.
2. Sistem semester, menggantikan sistem caturwulan yang sebelumnya digunakan dalam proses pembelajaran.
3. Materi yang padat dan luas dengan muatan pelajaran yang disusun secara lengkap dan mendalam, tetapi sering dinilai membebani peserta didik.
4. Penjurusan di tingkat menengah, yaitu mulai diberlakukannya pemilihan jurusan (IPA, IPS, dan Bahasa) di SMA sejak kelas II.
5. Muatan lokal dan pendidikan lingkungan yang mengakomodasi kebutuhan lokal melalui mata pelajaran khusus sesuai dengan konteks daerah.

Suplemen kurikulum 1999 hadir sebagai penyesuaian terhadap kondisi sosial dan kemajuan teknologi, dengan menambahkan penguatan pada beberapa mata pelajaran seperti TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi), serta menyempurnakan alokasi waktu dan substansi pelajaran tertentu. Struktur kurikulum disusun berdasarkan jenjang pendidikan, dengan porsi waktu yang ditentukan secara ketat. Mata pelajaran inti dan lokal diorganisasi dalam format yang memuat target kompetensi dan bahan ajar.

Berikut adalah contoh struktur umum untuk jenjang sekolah menengah pertama (SMP).

Kelompok Mata Pelajaran	Contoh Mata Pelajaran
Pendidikan Umum	Agama, Pancasila, dan Kewarganegaraan
Bahasa	Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris
Matematika dan IPA	Matematika dan IPA
IPS	IPS Terpadu (Geografi, Sejarah, dan Ekonomi)
Pendidikan Jasmani dan Kesenian	PJOK dan Seni Budaya
Keterampilan dan Muatan Lokal	Keterampilan Hidup, Bahasa Daerah, dan TIK (setelah 1999)

Berikut adalah beberapa kelebihan kurikulum 1994.

1. Struktur lebih rapi dan sistematis, terutama dengan penggunaan sistem semester.
2. Memuat pelajaran yang luas dan variatif sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.
3. Mengakomodasi muatan lokal sehingga lebih kontekstual dengan kebutuhan daerah.
4. Memberikan arah penjurusan pada pendidikan menengah yang memberi kejelasan arah pengembangan karier peserta didik.

Namun, kurikulum 1994 juga memiliki berbagai kelemahan yang tidak dapat diabaikan antara lain sebagai berikut.

1. Beban belajar peserta didik sangat tinggi karena banyaknya mata pelajaran dan padatnya isi materi.
2. Masih berorientasi pada penguasaan materi, bukan pengembangan kompetensi.
3. Pendidik tetap menjadi pusat pembelajaran, pendekatan pembelajaran masih sangat *teacher-centered*.
4. Evaluasi pembelajaran menekankan hasil akhir, bukan pada proses dan perkembangan peserta didik.

Kurikulum 2004 (Kurikulum Berbasis Kompetensi)

Kurikulum 2004 yang lebih dikenal sebagai kurikulum berbasis kompetensi (KBK) merupakan perubahan mendasar dari kurikulum-kurikulum sebelumnya, yang lebih berorientasi pada isi (*content-based*) menjadi berorientasi pada kompetensi (*competency-based*). Kurikulum ini mulai diuji coba secara terbatas pada tahun 2002 dan secara nasional diberlakukan pada tahun 2004 (Nurwahyuni dan Hudaidah, 2021: 53—59).

Lahirnya KBK dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Secara internal, kebutuhan akan kurikulum yang mampu menjawab tantangan globalisasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tuntutan dunia kerja semakin mendesak. Sementara secara eksternal, KBK juga merupakan respons terhadap reformasi pendidikan yang mengarah pada desentralisasi dan otonomi daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000—2004.

Kurikulum berbasis kompetensi memiliki sejumlah karakteristik utama yang membedakannya dari kurikulum sebelumnya, yaitu sebagai berikut.

1. Berbasis kompetensi dengan fokus utama pada pengembangan kompetensi dasar yang harus dimiliki peserta didik, mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
2. Pendekatan pembelajaran aktif dan kontekstual, di mana pembelajaran dirancang agar peserta didik aktif membangun pengetahuan melalui proses yang bermakna, relevan, serta sesuai konteks.
3. Evaluasi autentik (*authentic assessment*), yaitu penilaian yang tidak hanya mengukur hasil, tetapi juga proses serta mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.
4. Fleksibilitas pelaksanaan, di mana sekolah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk menyesuaikan proses pembelajaran dengan kondisi lokal melalui pengembangan silabus dan rencana pembelajaran sendiri.

5. Integrasi mata pelajaran, dengan mendorong keterkaitan antarmata pelajaran dan situasi kehidupan nyata.

Struktur kurikulum 2004 mencakup beberapa hal sebagai berikut.

1. Kompetensi inti, yaitu kemampuan umum yang menjadi arah pembelajaran.
2. Kompetensi dasar, yaitu kemampuan yang lebih spesifik dan harus dicapai oleh peserta didik dalam setiap mata pelajaran.
3. Indikator pencapaian kompetensi, yaitu ukuran untuk mengetahui tingkat ketercapaian kompetensi.

Contoh struktur KBK pada jenjang SMP adalah sebagai berikut.

Mata Pelajaran	Kompetensi Dasar	Indikator
Bahasa Indonesia	Menyimpulkan isi teks narasi	Menyebutkan ide pokok paragraf narasi
IPA	Menjelaskan perubahan wujud zat	Menjelaskan contoh perubahan fisik dan kimia
IPS	Menjelaskan peran pelaku ekonomi	Mengidentifikasi pelaku ekonomi dalam kehidupan

Berikut ini adalah kelebihan dari kurikulum 2004.

1. Mengembangkan kompetensi secara holistik, mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.
2. Mendorong pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan sesuai dengan prinsip pendidikan modern.
3. Fleksibel dan kontekstual, memungkinkan pengembangan pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi sekolah dan daerah.
4. Menerapkan penilaian yang lebih autentik dan menyeluruh, tidak hanya terpaku pada nilai ujian akhir.

Namun, kurikulum 2004 juga memiliki berbagai kelemahan yang tidak dapat diabaikan antara lain sebagai berikut.

1. Pelatihan pendidik belum merata sehingga banyak pendidik kesulitan memahami dan menerapkan konsep KBK secara tepat.

2. Beban administratif cukup tinggi karena pendidik harus menyusun silabus, RPP, dan instrumen penilaian sendiri.
3. Perbedaan pemahaman antarsekolah dan pendidik menyebabkan ketidakkonsistenan dalam penerapan kurikulum.
4. Evaluasi yang kompleks dan belum efisien, membuat pendidik kewalahan dalam penilaian berbasis portofolio dan autentik.

Kurikulum 2006 (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan)

Kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) mulai diberlakukan secara nasional pada tahun 2006. Kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum 2004 (kurikulum berbasis kompetensi) dan menjadi wujud konkret dari amanat desentralisasi pendidikan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam undang-undang tersebut, Pasal 36 ayat 2 menyebutkan bahwa "Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik."

KTSP menandai transisi penting dalam sistem pendidikan Indonesia karena untuk pertama kalinya pengembangan kurikulum tidak lagi bersifat sentralistik (Ananda, 2021: 365—378). Pemerintah pusat hanya menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum, sementara sekolah memiliki kewenangan penuh untuk menyusun dan mengembangkan kurikulum sesuai dengan konteks lokal dan karakteristik peserta didiknya.

Kurikulum 2006 memiliki karakteristik yang khas dibanding kurikulum sebelumnya, yaitu sebagai berikut.

1. Desentralisasi kurikulum, di mana KTSP disusun oleh masing-masing satuan pendidikan dengan mengacu pada standar isi (SI) dan standar kompetensi lulusan (SKL) yang ditetapkan oleh pemerintah.
2. Fleksibel dan kontekstual, memungkinkan sekolah menyesuaikan isi kurikulum dengan kebutuhan dan potensi lokal.

3. Berbasis kompetensi, tetap mengacu pada pendekatan kompetensi seperti dalam kurikulum 2004 dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
4. Peran pendidik dan sekolah yang sentral, di mana pendidik tidak hanya sebagai pelaksana, tetapi juga sebagai perancang dan pengembang kurikulum.
5. Penilaian berbasis proses dan hasil, mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik melalui berbagai teknik, termasuk penilaian portofolio dan proyek.

Struktur KTSP mengikuti jenjang pendidikan dan mata pelajaran yang telah ditentukan pemerintah. Setiap sekolah wajib menyusun dokumen kurikulum dalam dua bagian utama.

1. Dokumen I berisi visi, misi, tujuan sekolah, struktur kurikulum, dan kalender pendidikan.
2. Dokumen II berisi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) untuk setiap mata pelajaran.

Contoh format struktur kurikulum pada jenjang SMP adalah sebagai berikut.

No	Mata Pelajaran	Jumlah JP
1.	Pendidikan Agama	2
2.	Pendidikan Kewarganegaraan	2
3.	Bahasa Indonesia	4
4.	Bahasa Inggris	4
5.	Matematika	4
6.	Ilmu Pengetahuan Alam	4
7.	Ilmu Pengetahuan Sosial	3
8.	Seni Budaya	2
9.	Pendidikan Jasmani dan Kesehatan	2
10.	Keterampilan/TIK	2
	Total	**29**

Berikut ini adalah kelebihan dari kurikulum KTSP.

1. Memberikan kebebasan kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kondisi peserta didik dan lingkungan.
2. Mendorong kreativitas pendidik dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran.
3. Fleksibilitas pembelajaran tinggi sehingga pembelajaran bisa lebih bermakna dan kontekstual.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pendidikan karena sekolah melibatkan komite sekolah dalam penyusunan kurikulum.

Namun, kurikulum KTSP juga memiliki berbagai kelemahan yang tidak dapat diabaikan antara lain sebagai berikut.

1. Ketimpangan kapasitas antarsekolah, terutama antara sekolah di kota dan di daerah menyebabkan kualitas implementasi KTSP tidak merata.
2. Tidak semua pendidik siap dan terlatih untuk menyusun silabus dan RPP secara mandiri.
3. Minimnya pengawasan dan pendampingan membuat implementasi KTSP cenderung formalitas di banyak sekolah.
4. Potensi penurunan mutu pendidikan nasional karena standar pelaksanaan yang berbeda-beda di tiap satuan pendidikan.

Kurikulum 2013 (K-13)

Kurikulum 2013 (K-13) diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2013 sebagai langkah baru dalam sistem pendidikan nasional. Kurikulum ini lahir sebagai hasil evaluasi terhadap KTSP dan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Kurikulum terdahulu dinilai belum sepenuhnya mengakomodasi tuntutan perkembangan zaman, termasuk peningkatan kualitas pendidikan serta relevansi dengan kebutuhan dunia kerja dan kehidupan sosial.

Kurikulum 2013 dirancang untuk mengatasi berbagai tantangan yang muncul, seperti menurunnya kualitas pendidikan, rendahnya daya saing pendidikan Indonesia di tingkat global, serta kebutuhan akan pendidikan yang lebih berbasis kompetensi (Fithriani dkk., 2021: 240—255).

Kurikulum ini juga berusaha mengintegrasikan berbagai konsep baru, seperti pembelajaran berbasis kompetensi, pengembangan karakter, dan pembelajaran berbasis proyek, yang dianggap lebih relevan dengan tuntutan perkembangan zaman.

Beberapa alasan utama diluncurkannya kurikulum 2013 antara lain untuk meningkatkan karakter peserta didik, memperbaiki kualitas pembelajaran, dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Selain itu, kurikulum ini juga dirancang sebagai respons terhadap perubahan global yang terjadi di dunia pendidikan.

Kurikulum 2013 memiliki sejumlah karakteristik yang membedakannya dari kurikulum sebelumnya.

1. Pendekatan saintifik, di mana pembelajaran berfokus pada proses mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengomunikasikan, dengan tujuan mengembangkan keterampilan berpikir kritis serta kreatif peserta didik.
2. Berbasis kompetensi dan karakter tidak hanya menekankan pada aspek kognitif, tetapi juga pada pembentukan karakter seperti disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian sosial.
3. Integrasi pengetahuan, sikap, dan keterampilan, dengan menggabungkan kompetensi kognitif, afektif, serta psikomotorik secara menyeluruh dalam proses pembelajaran.
4. Pembelajaran tematik, khususnya di jenjang SD yang mengintegrasikan beberapa mata pelajaran dalam satu tema untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan kontekstual.
5. Penilaian autentik yang dilakukan secara holistik dan berkelanjutan, mencakup proses dan perkembangan peserta didik, tidak hanya berfokus pada hasil akhir ujian.
6. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, melalui program pelatihan yang lebih intensif dan berkelanjutan dalam mendukung implementasi kurikulum.

Kurikulum 2013 memiliki struktur yang cukup sistematis dengan pembagian waktu dan mata pelajaran yang jelas. Pada setiap jenjang

pendidikan (SD, SMP, dan SMA/SMK), terdapat pembagian waktu yang berfokus pada kompetensi inti dan kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik.

Pada jenjang SD, kurikulum dibagi dalam tema-tema yang mengintegrasikan berbagai mata pelajaran. Misalnya, tema "Matahari" akan mencakup pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, Matematika, Seni, dan lain-lain yang semuanya terintegrasi dalam tema yang sama.

Untuk jenjang SMP dan SMA mata pelajaran tetap terpisah, tetapi fokus pada pengembangan kompetensi yang lebih mendalam dan penguatan pembelajaran berbasis proyek serta praktik. Contoh pembagian mata pelajaran pada tingkat SMP adalah sebagai berikut.

No	Mata Pelajaran	Kompetensi Inti	JP
1.	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	Mengembangkan keimanan, ketakwaan, dan budi pekerti	2
2.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	Memahami nilai-nilai Pancasila dan tanggung jawab sebagai warga negara	2
3.	Bahasa Indonesia	Mengembangkan kemampuan berbahasa secara lisan dan tulisan	4
4.	Matematika	Menguasai konsep matematika dan penerapannya	4
5.	Ilmu Pengetahuan Alam	Mengembangkan pemahaman tentang fenomena alam dan ilmu pengetahuan	4
6.	Ilmu Pengetahuan Sosial	Mengembangkan pemahaman tentang masyarakat dan sejarahnya	3
7.	Seni Budaya	Mengembangkan kreativitas dalam seni dan budaya	2
8.	Pendidikan Jasmani dan Kesehatan	Mengembangkan keterampilan jasmani dan pemahaman tentang hidup sehat	2
9.	Teknologi Informasi dan Komunikasi	Menguasai keterampilan dasar dalam TIK	2

Berikut ini adalah kelebihan dari kurikulum 2013.

1. Berfokus pada pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik secara holistik, tidak hanya mengukur hasil akademik, tetapi juga aspek moral dan sosial.
2. Pendekatan pembelajaran yang lebih aktif, memungkinkan peserta didik untuk lebih terlibat dalam proses belajar melalui eksperimen, proyek, dan diskusi.
3. Penilaian autentik memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kemampuan dan perkembangan peserta didik karena mengukur hasil belajar secara menyeluruh, termasuk proses pembelajaran.
4. Keterlibatan orang tua dan masyarakat lebih besar dalam pendidikan anak-anak, dengan adanya pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya pendidikan karakter.

Namun, kurikulum 2013 juga memiliki berbagai kelemahan yang tidak dapat diabaikan antara lain sebagai berikut.

1. Implementasi yang tidak merata, di mana beberapa daerah masih menghadapi kesulitan karena kurangnya fasilitas dan dukungan yang memadai.
2. Kurangnya pelatihan bagi pendidik, dengan banyak pendidik yang belum sepenuhnya terlatih untuk mengimplementasikan pendekatan saintifik dan pembelajaran berbasis proyek secara efektif.
3. Beban administrasi yang tinggi karena pendidik dituntut menyusun RPP, melakukan penilaian autentik, dan mencatat perkembangan peserta didik secara berkala yang menambah beban kerja.
4. Keterbatasan materi ajar, terutama pada beberapa mata pelajaran yang belum sepenuhnya memiliki materi sesuai dengan kurikulum, khususnya untuk tema-tema pembelajaran yang lebih kompleks.

Kurikulum Merdeka

Kurikulum merdeka diperkenalkan oleh kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi Indonesia pada tahun 2022 sebagai bagian dari upaya untuk merespons tantangan yang dihadapi oleh dunia pendidikan

Indonesia, terutama setelah masa pandemi Covid-19. Kurikulum ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada satuan pendidikan dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang lebih relevan, kontekstual, serta mendukung pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik (Sihombing dkk., 2021: 35—48).

Kurikulum merdeka dirancang dengan filosofi "kebebasan dalam belajar", yang memberikan keleluasaan lebih besar kepada pendidik dan sekolah untuk menentukan materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, minat, dan potensi peserta didik. Pada prinsipnya, kurikulum ini memberikan kebebasan kepada sekolah untuk mengembangkan proses pembelajaran yang lebih inovatif, dengan memperhatikan perkembangan zaman dan kebutuhan dunia kerja yang semakin berubah dengan cepat.

Penerapan kurikulum merdeka turut didorong oleh kebijakan merdeka belajar yang telah diperkenalkan sebelumnya. Kebijakan ini mengutamakan pencapaian kompetensi peserta didik secara menyeluruh, mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kurikulum merdeka memiliki sejumlah karakteristik yang membedakannya dari kurikulum sebelumnya antara lain sebagai berikut.

1. Fleksibilitas pembelajaran
   Fleksibilitas pembelajaran memberikan keleluasaan bagi satuan pendidikan untuk menentukan pendekatan, metode, dan media pembelajaran yang sesuai dengan konteks serta kebutuhan peserta didik. Hal ini mendorong pengembangan pembelajaran yang lebih personal dan relevan.
2. Pembelajaran berbasis projek
   Pembelajaran berbasis projek, yaitu pembelajaran yang berfokus pada penyelesaian proyek nyata yang menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Pembelajaran berbasis proyek juga mendorong pengembangan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif.

3. Pengenalan profil pelajar Pancasila
   Kurikulum merdeka menekankan pembentukan karakter dan kompetensi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bertujuan untuk mencetak peserta didik yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral dan sosial.
4. Penguatan pendidikan karakter
   Pendidikan tidak hanya berfokus pada pencapaian kompetensi akademik, tetapi juga pada pengembangan sikap dan karakter peserta didik, seperti gotong-royong, tanggung jawab, dan kepedulian sosial.
5. Pemberdayaan pendidik dan satuan pendidikan
   Pendidik diberikan kebebasan lebih dalam merancang dan mengelola pembelajaran. Selain itu, lebih banyak diberi pelatihan dan pendampingan untuk mengoptimalkan potensi peserta didik.
6. Sistem penilaian yang menyeluruh
   Penilaian tidak hanya berbasis tes atau ujian, tetapi juga dilakukan secara holistik melalui penilaian formatif yang lebih mencakup proses pembelajaran, perkembangan karakter, dan keterampilan yang dimiliki peserta didik.

Kurikulum merdeka memiliki struktur yang lebih fleksibel dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya. Pada tingkat SD, SMP, dan SMA, mata pelajaran tetap ada, tetapi ada lebih banyak ruang bagi sekolah untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan lokal serta potensi peserta didik. Beberapa komponen utama dari struktur kurikulum merdeka adalah sebagai berikut.

1. Mata pelajaran inti terdiri dari mata pelajaran wajib, seperti Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, serta Pendidikan Jasmani dan Kesehatan.
2. Mata pelajaran pilihan dapat ditawarkan oleh sekolah berdasarkan minat dan bakat peserta didik, seperti Seni Budaya, TIK, atau Keterampilan.
3. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila bertujuan memperkuat pembentukan karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila melalui

kegiatan luar kelas, seperti pengabdian masyarakat, kewirausahaan, dan sebagainya.

4. Pengembangan diri diberikan melalui kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung penguatan kompetensi dan karakter peserta didik. Selain itu, memberikan ruang untuk mengembangkan potensi mereka secara optimal.

Berikut ini adalah kelebihan dari kurikulum merdeka.

1. Fleksibilitas, memberikan kebebasan yang lebih besar kepada sekolah dan pendidik untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik serta kondisi lokal.
2. Pendekatan pembelajaran yang relevan, dengan menggunakan pembelajaran berbasis proyek dan konteks kehidupan sehari-hari sehingga materi menjadi lebih relevan serta aplikatif.
3. Penguatan karakter, melalui penekanan pada profil pelajar Pancasila yang bertujuan mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berbudi pekerti dan memiliki karakter yang kuat.
4. Pemberdayaan pendidik, dengan memberikan ruang bagi pendidik untuk lebih kreatif dan inovatif dalam merancang pembelajaran serta meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan dan pendampingan.

Namun, kurikulum merdeka juga memiliki berbagai kelemahan yang tidak dapat diabaikan antara lain sebagai berikut.

1. Tantangan dalam implementasi, di mana meskipun memberikan fleksibilitas kurikulum merdeka memerlukan dukungan sumber daya yang memadai, seperti fasilitas yang layak dan peningkatan kompetensi pendidik secara berkelanjutan.
2. Kesulitan dalam penilaian karena sistem penilaian yang lebih holistik dan berbasis proses menuntut kesiapan pendidik dalam melakukan penilaian yang akurat dan objektif terhadap perkembangan peserta didik.
3. Ketimpangan sumber daya, yang dapat menyebabkan kesenjangan kualitas pendidikan antara daerah dengan sumber daya memadai dan daerah yang memiliki keterbatasan.

4. Perubahan yang cepat, menuntut pendidik dan sekolah untuk mampu beradaptasi dengan dinamika kurikulum serta berbagai aspek kebijakan yang terus berkembang.

Dengan demikian, kurikulum merdeka mengusung konsep pendidikan yang lebih fleksibel, berbasis karakter dan kompetensi, serta memberikan ruang yang lebih besar bagi kreativitas dan inovasi dalam dunia pendidikan Indonesia. Diharapkan dengan implementasi kurikulum ini, peserta didik dapat berkembang secara optimal sesuai dengan minat dan potensi mereka serta dapat berkontribusi lebih baik dalam masyarakat.



BAB IV

KONSEP DASAR KURIKULUM MERDEKA

Pendahuluan

Kurikulum merupakan instrumen pendidikan yang berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan proses pembelajaran agar mampu mencapai tujuan pendidikan. Adapun tujuan pendidikan tidak lepas dari konsep dasar yang telah ditetapkan. Sebagai elemen penting dalam pendidikan, sudah tentu bahwa penyusunan kurikulum akan membutuhkan banyak pertimbangan dan landasan teoris. Aspek dasar dalam menyusun kurikulum seperti prinsip, karakter, dan landasan filosofis menjadi pilar penting untuk pegangan dalam pengimplementasiannya di satuan pendidikan. Dengan adanya konsep dasar yang jelas tersebut, dapat mendorong keberhasilan pendidikan dan mengoptimalkan proses belajar sesuai dengan yang diinginkan melalui kurikulum yang berlaku.

Kurikulum merdeka telah diproyeksikan menjadi kurikulum pendidikan berskala nasional sejak tahun 2020, yang dikembangkan oleh

kementrian pendidikan, budaya, riset dan teknologi (Kemendikburistek) pada masa kepemimpinan Menteri Nadiem Anwar Makarim. Setelah diterapkan dibeberapa sekolah dan dievaluasi secara bertahap sejak 2021, pada 2024 Kemendikburistek secara resmi menetapkan landasan hukum berupa Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Kemendikbudristek, t.t). Peraturan menteri inilah yang menjadi payung hukum bagi pelaksanaan serta implementasi kurikulum merdeka diseluruh satuan pendidikan di Indonesia.

Dengan ditetapkannya Permendikbudristek tersebut, kurikulum merdeka wajib diselenggarakan di semua satuan pendidikan. Untuk membantu pemahaman terhadap kurikulum merdeka, dibutuhkan sumber yang dapat memberikan informasi terkait konsep dasar kurikulum merdeka secara komprehensif. Mengingat bahwa konsep dasarlah yang memengaruhi jalannya implementasi agar selaras dengan tujuan pendidikan di kurikulum merdeka.

Definisi dan Urgensi Kurikulum Merdeka

Menurut *Buku Saku Tanya Jawab Kurikulum Merdeka*, kurikulum merdeka adalah kurikulum yang memuat pembelajaran intrakurikuler yang beragam. Kurikulum ini memberikan keleluasaan kepada pendidik untuk memilih berbagai perangkat dan metode pembelajaran agar peserta didik dapat memahami konsep serta meningkatkan kompetensi sesuai kebutuhan dan minat mereka (Kemendikbudristek, t.t).

Sedangkan menurut Kon Olive Tunas & Richard Daniel Herdi Pangkey, kurikulum merdeka merupakan kerangka kurikulum fleksibel yang dirancang untuk mengunggulkan kualitas pembelajaran dengan menyerahkan kebebasan dan kebermaknaan kepada peserta didik dan pendidik (Tunas dan Pangkey, 2024). Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kurikulum merdeka merupakan kurikulum yang berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Kurikulum ini memberikan

kebebasan kepada pendidik untuk merancang metode dan perangkat pembelajaran berdasarkan pendekatan yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Lahirnya kurikulum merdeka dilatar belakangi oleh krisis pembelajaran yang terjadi cukup lama. Berbagai studi menunjukkan banyaknya anak Indonesia yang tidak mampu memahami bacaan sederhana (literasi) atau menerapkan konsep matematika dasar (numerasi). Selain itu, terdapat pula kesenjangan pendidikan antarwilayah dan kelompok sosial. Diperparah dengan pandemi Covid-19 maka dilakukanlah perubahan yang sistemik untuk mengatasi krisis-krisis tersebut, salah satunya melalui perubahan dalam kurikulum.

Perubahan sistemik dalam kurikulum tentunya akan diikuti oleh perubahan-perubahan pada aspek lain yang beririsan. Terlebih kurikulum mencakup berbagai aspek pembelajaran, seperti materi yang diajarkan, kecepatan penyampaian materi dan masa belajar, hingga metode mengajar yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan peserta didik. Perubahan paradigma pendidikan di Indonesia merupakan salah satu alasan dari dibentuknya kurikulum merdeka ini (Salamah, Listiyani, dan Mustafiyanti, 2024).

Pendekatan paradigma pendidikan yang mendasari kurikulum merdeka antara lain pembelajaran yang lebih kontekstual, inklusif, dan berpusat pada peserta didik. Dengan menempatkan kebutuhan peserta didik sebagai tolak ukur penetapan capaian dan metode belajar, menaruh kepentingan peserta didik pada prioritas utama dalam segala upaya pendidikan adalah hal yang harus dilakukan.

Perkembangan zaman yang semakin maju dan cepat menjadi salah satu alasan agar kurikulum pendidikan tidak menjadi penghambat langkah pertumbuhan anak-anak dalam meghadapi era yang sangat dinamis. Oleh karena itu, dengan mengintegrasikan produk perkembangan zaman dengan fleksibilitas kurikulum diharapkan mampu membawa solusi yang efisien dalam pendidikan Indonesia. Adapun fleksibilitas dalam kurikulum menjadi salah satu upaya untuk mampu menyesuaikan kebutuhan peserta

didik didaerah masing-masing ataupun kondisi yang tidak terprediksi saat implementasinya. Dengan demikian, kurikulum yang fleksibel dapat memungkinkan tiap satuan pendidikan membentuk sendiri taraf capaian yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran anak didiknya.

Kurikulum yang fleksibel mendorong pendidik untuk fokus pada penyampiaan materi esensial dan pembentukan karakter serta kompetensi supaya mampu bertahan serta beradaptasi dengan lingkungannya. Upaya tersebut dalam kurikulum merdeka terwadahi pada tiga bentuk kegiatan pembelajaran antara lain intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler. Oleh karena itu, kurikulum merdeka membutuhkan dan menumbuhkan semangat gotong royong serta kolaborasi dari seluruh instrumen pendidik, baik di dalam maupun di luar satuan pendidikan.

Landasan Kurikulum Merdeka

Kurikulum merdeka disusun berdasarkan beberapa landasan penting yang mencerminkan kebutuhan zaman, hakikat pendidikan, serta kebijakan nasional. Adapun landasan tersebut meliputi sebagai berikut.

1. Landasan filosofis

   Filosofis berasal dari kata "filsafat" yang secara terminologis berarti 'mencintai kebijaksanaan'. Sementara itu, landasan merupakan titik tolak atau dasar pijakan, baik yang bersifat material maupun konseptual (Rasid, 2018). Oleh karena itu, landasan filosofis dapat diartikan sebagai sudut pandang yang mencerminkan nilai, hakikat, atau esensi dari suatu hal, dalam konteks ini adalah pendidikan.

   Kurikulum sebagai bagian penting dari pendidikan juga memerlukan landasan filosofis sebagai pijakan dalam pengembangannya. Landasan filosofis pendidikan berkaitan dengan pertanyaan mendasar mengenai apa dan mengapa pendidikan diperlukan serta tujuan yang seharusnya dicapai oleh pendidikan.

   Landasan utama dari kurikulum merdeka adalah cita-cita kemerdekaan dan falsafah Pancasila pada Pembukaan Undang-Undang

Dasar 1945, yang tertulis dalam Permendikbudristek Nomor 12 tahun 2024 sebagai berikut.

> *Bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan kehidupan manusia dan masyarakat Indonesia yang berdasar pada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.*

Pancasila sebagai falsafah utama dalam bernegara merupakan aspek yang penting dan tidak dapat terlepas dari dunia pendidikan. Selian itu, semangat cita-cita kemerdekaan merupakan amanat yang perlu dijadikan visi dalam dunia pendidikan sebagai wadah pembentukan generasi yang cerdas dan nasionalis.

Selain cita-cita kemerdekaan dan falsafah Pancasila, filosofi pendidikan dari kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara juga menjadi dasar dalam pengembangan kurikulum merdeka. Kemerdekaan merupakan salah satu dari lima asas dalam pendidikan yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara, yang dikenal dengan konsepsi Panca Dharma. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, asas kemerdekaan diartikan sebagai kepemilikan penuh atas hak asasi untuk hidup dan menyelenggarakan kehidupan sebagai anugerah dari Tuhan (Solehan, 2010).

Dalam kurikulum merdeka, asas ini berkaitan dengan upaya membangun manusia merdeka, yakni individu yang secara lahir maupun batin tidak bergantung pada orang lain melainkan bertumpu pada kekuatan diri sendiri. Menurut Efendi dkk., prinsip kemerdekaan dalam kurikulum merdeka selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menekankan pentingnya kemandirian peserta didik.

Pendidikan tidak semata-mata menjadi proses transfer pengetahuan, tetapi juga memberi ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilannya secara mandiri, dengan bimbingan dari pendidik dan dukungan orang tua (Efendi, Muhtar,

dan Herlambang, 2023). Dengan demikian, pembelajaran harus diarahkan untuk memerdekakan, membangun kemandirian, dan kedaulatan peserta didik, tetapi tetap menghormati otoritas pendidik.

Terdapat delapan poin penting yang tercantum dalam Lampiran Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. *Pertama*, pendidikan nasional Indonesia bertujuan mendorong kemajuan dengan tetap berpijak pada konteks dan akar budaya bangsa. *Kedua*, pendidikan diarahkan untuk membentuk manusia Indonesia secara holistik sehingga mampu mengoptimalkan potensi dirinya demi tujuan yang lebih luas dan bermakna. *Ketiga*, pendidikan harus responsif terhadap dinamika perubahan sosial, ekonomi, politik, dan budaya.

Keempat, diperlukan keseimbangan antara penguasaan kompetensi dan pembentukan karakter peserta didik. *Kelima*, satuan pendidikan diberikan keleluasaan dalam menyusun dan mengimplementasikan kurikulum sesuai dengan konteks masing-masing. *Keenam*, pembelajaran harus melayani keberagaman dan disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik.

Ketujuh, pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan dalam suasana yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk aktif berpartisipasi, serta memberikan ruang bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik maupun psikologis mereka. *Kedelapan*, pendidik memiliki otoritas dalam mendidik peserta didik serta dalam mengimplementasikan kurikulum dalam proses pembelajaran.

Kedelapan poin tersebut menjadi dasar penting dalam pengembangan kurikulum merdeka di satuan pendidikan. Aspek peserta didik difasilitasi agar dapat mengoptimalkan potensi diri sesuai dengan kompetensi dan karakternya, tanpa mengabaikan budaya tempat ia tinggal. Di sisi lain, satuan pendidikan dituntut untuk responsif namun

tetap memiliki keleluasaan dalam merancang dan mengimplementasikan kurikulumnya.

Bagi pendidik, kurikulum merdeka memberikan hak atas otoritas dalam pengelolaan pembelajaran di kelas, disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Sementara itu, proses pembelajaran dirancang untuk menjunjung keberagaman, bersifat inklusif, serta mendorong perkembangan fisik dan psikologis peserta didik secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa kurikulum merdeka disusun dengan landasan kebebasan dan inklusivitas.

2. Landasan sosiologis

Pada dasarnya, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak hanya berinteraksi antar-individu, tetapi juga dengan masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Interaksi antar-individu dalam skala besar melahirkan konsep budaya serta membentuk norma, hukum, dan adat istiadat yang harus ditaati bersama.

Dalam konteks ini, pendidikan berperan penting dalam memelihara dan mendorong proses sosial serta perubahan kebudayaan. Selain itu, pendidikan juga memiliki fungsi sebagai kontrol sosial. Oleh karena itu, kurikulum merdeka hadir sebagai salah satu upaya untuk merespons dan turut serta memecahkan berbagai permasalahan sosial.

Kurikulum merdeka berupaya menyiapkan peserta didik yang sensitif dengan hal-hal dan isu mulai dari lingkungan sekitar hingga global. Dengan prinsip fleksibilitas dalam pembelajarannya, peserta didik didorong untuk mempelajari hal-hal yang relevan dengan lingkungannya termasuk mengenal keberagaman budaya. Diharapkan, hal ini dapat membentuk peserta didik menjadi agen perdamaian terutama dalam menghadapi isu-isu terkait suku, agama, ras, antargolongan, kesetaraan gender, dan isu-isu sosial lainnya. Kurikulum merdeka juga menekankan pembelajaran yang ekologis, interdisiplin, dan interkultural untuk transformasi sosial yang adil serta berkelanjutan.

Dalam konteks perkembangan zaman, melalui kurikulum merdeka, peserta didik dipersiapkan untuk memiliki pengetahuan, etika, dan kompetensi yang mampu bersaing di tengah derasnya arus Revolusi Industri 4.0 serta masyarakat 5.0. Peserta didik membutuhkan lingkungan belajar yang saling terhubung, yang mampu menginspirasi imajinasi, memicu kreativitas, dan memberikan motivasi.

Oleh karena itu, muatan kurikulum yang mencakup penguatan karakter, nilai-nilai, etos kerja, cara berpikir ilmiah, dan akal sehat perlu mendapat penekanan. Perubahan kurikulum yang diarahkan untuk lebih adaptif terhadap perkembangan zaman akan memfasilitasi transformasi pendidikan ke arah yang lebih maju. Selain itu, menciptakan peserta didik yang mampu bertahan (*survive*) dan berkontribusi melalui nilai serta kompetensi yang telah dibekalkan di satuan pendidikan.

3. Landasan psikopedagogis

Proses pembelajaran tidak terlepas dari peran pendidik dan peserta didik dalam membangun interaksi, baik antara peserta didik dengan pendidik, antarpeserta didik, maupun antara peserta didik dengan lingkungan sekitarnya. Untuk memaksimalkan pembelajaran dan pencapaian kompetensi peserta didik, pendidik perlu memahami dan mempertimbangkan aspek psikopedagogis. Terlebih dalam kurikulum merdeka, di mana peserta didik menjadi pusat dari proses belajar, pemahaman terhadap kondisi psikologis peserta didik sangat penting dalam penyusunan program pembelajaran. Hal ini bertujuan agar pendidik dapat memberikan bimbingan, motivasi, dan inspirasi yang tepat dalam membentuk perilaku peserta didik sesuai dengan tujuan pendidikan.

Penyatuan aspek psikologi dan pedagogi dalam pendidikan sangat diperlukan, mengingat peserta didik tidak hanya berperan sebagai penerima ilmu, tetapi juga mengalami proses perkembangan jiwa. Psikologi merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia dan secara khusus, psikologi belajar memiliki keterkaitan erat dengan

pengembangan kurikulum, terutama dalam hal bagaimana kurikulum disampaikan kepada peserta didik dan bagaimana peserta didik seharusnya mempelajarinya (strategi pelaksanaan kurikulum).

Sementara itu, pedagogi adalah ilmu yang berkaitan dengan prinsip dan strategi mengajar yang harus dikuasai oleh pendidik dalam membimbing serta menyampaikan pengetahuan kepada peserta didik. Penggabungan antara teori psikologi perkembangan dan pedagogi bertujuan untuk memastikan bahwa pengalaman belajar disesuaikan dengan kebutuhan serta kapasitas peserta didik.

Kurikulum merdeka menekankan pada prinsip kemerdekaan dan keleluasaan, baik bagi pendidik maupun peserta didik dalam mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal. Dengan demikian, peserta didik dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebutuhannya tanpa adanya paksaan.

Untuk mengakomodasi perbedaan perkembangan individu peserta didik, pendidik perlu menggunakan metode yang tepat dalam memfasilitasi proses belajar. Salah satu metode yang dapat diterapkan dalam model pembelajaran kurikulum merdeka adalah pembelajaran berdiferensiasi yang relevan dengan visi pedagogis Ki Hadjar Dewantara. Dalam pendekatan ini, pembelajaran dikelola berdasarkan latar belakang peserta didik, meliputi minat, kesiapan, dan profil belajar masing-masing.

Berdasarkan Lampiran Permendikbud Nomor 12 Tahun 2024, teori yang melandasi psikopedagogi kurikulum merdeka antara lain (1) teori perkembangan, (2) teori pembelajaran, (3) teori kompetensi emosional atau kejiwaan, dan (4) teori motivasi. Teori perkembangan merujuk pada pemikiran Piaget yang menekankan pada perkembangan kognitif yang berurutan dan pentinngnya keaktifan peserta didik dalam mengeksplorasi pembelaaran. Kurikulum merdeka dikembangkan untuk mampu memamdu peran interaksi sosial dan kolaborasi dalam pembelajaran, serta mengatasi tantangan dan peluang yang ada pada tiap fase perkembangan psikososial.

Teori pembelajaran yang menjadi landasan psikopedagogis dalam kurikulum merdeka berfokus pada tiga teori utama.

a. Teori behaviorisme

   Teori behaviorisme yang menitikberatkan pada peran rangsangan lingkungan dan konsekuensinya dalam membentuk serta memodifikasi perilaku. Dari perspektif ini, karakter peserta didik dapat dibentuk melalui pembiasaan atau perlakuan yang diberikan secara konsisten.

b. Teori konstruktivisme

   Teori konstruktivisme yang memandang peserta didik bukan sekadar penerima informasi secara pasif, melainkan sebagai pelaku aktif dalam proses pembelajaran. Dalam pandangan ini, belajar bukan sekadar proses transfer informasi, melainkan proses mengonstruksi pengetahuan baru berdasarkan input yang diterima, digabungkan dengan pengetahuan sebelumnya, motivasi, umpan balik, dan konteks individual yang dimiliki setiap peserta didik.

c. Teori konektivisme

   Teori konektivisme yang mulai banyak diterapkan untuk menjawab tantangan pembelajaran terutama sejak pandemi Covid-19. Teori ini memperluas spektrum pembelajaran, tidak hanya dari apa yang tersedia di lingkungan sekitar, tetapi juga dari berbagai sumber digital seperti media sosial, situs web, blog, dan basis data informasi.

   Perspektif ini mendorong peserta didik untuk mengintegrasikan berbagai pemikiran, teori, dan informasi secara bijak sehingga bermanfaat bagi proses belajarnya. Selain itu, akses terhadap beragam sumber juga mendorong kolaborasi dan membuka ruang diskusi antara peserta didik dan pendidik.

Teori kompetensi emosional atau kejiwaan berkaitan dengan kondisi psikologis peserta didik selama proses pembelajaran, yang dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan secara menyeluruh

(*wellbeing*), kesadaran emosi (*emotional awareness*), pengaturan emosi (*emotional regulation*), kompetensi sosial, serta kemandirian emosi. Dengan memahami sejauh mana pengaruh aspek-aspek tersebut hadir dalam diri peserta didik, diperlukan fokus khusus pada penguatan perkembangan emosional dan sosial agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif.

Teori terakhir yang menjadi landasan psikopedagogis dalam kurikulum merdeka adalah teori motivasi. Teori ini merujuk pada perubahan yang terjadi atas dasar dorongan dari dalam diri peserta didik. Kurikulum merdeka perlu mendorong peserta didik untuk memiliki pola pikir berkembang (*growth mindset*) ke arah yang positif. Dengan demikian, mampu meningkatkan pencapaian tujuan belajar serta memiliki kesadaran dalam menentukan masa depannya secara mandiri.

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa landasan psikopedagogis dalam pengembangan kurikulum merdeka memberikan pemahaman bahwa proses pendidikan harus memperhatikan aspek kemanusiaan, seiring dengan aspek teknis dalam pengimplementasian kurikulumnya.

Melalui pembiasaan yang tepat serta terbukanya akses terhadap pembelajaran yang aktif dan komunikatif, peserta didik dapat berkembang menjadi individu yang kritis dan kreatif. Dengan demikian, kurikulum merdeka dapat dikembangkan ke dalam proses pembelajaran yang lebih efektif dan menyenangkan sehingga mendorong perkembangan kompetensi serta pertumbuhan kognitif secara optimal.

Ketiga landasan dalam pengembangan kurikulum merdeka telah mengelaborasikan berbagai faktor penting. Landasan filosofis menyoroti nilai-nilai dan semangat yang mendasari kurikulum, sementara landasan sosiologis merangkum peran dan *output* yang diharapkan dari peserta didik dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun landasan psikopedagogis menggambarkan aspek teknis dan suasana pembelajaran yang ideal untuk mendukung proses belajar. Dengan adanya ketiga landasan tersebut, satuan

pendidikan memiliki pegangan nilai yang kuat dalam menyelenggarakan pembelajaran yang sejalan dengan tujuan kurikulum merdeka.

Prinsip dan Karakteristik Kurikulum Merdeka

Prinsip Kurikulum Merdeka

Setelah memahami landasan-landasan yang menjadi pilar terbentuknya kurikulum merdeka, langkah selanjutnya adalah mengetahui prinsip-prinsip utama yang menjadi acuan dalam perancangannya. Berdasarkan Permendikbud Nomor 12 Tahun 2024, terdapat tiga prinsip utama dalam kurikulum merdeka, yaitu pengembangan karakter dan kompetensi, fleksibilitas, serta fokus pada muatan esensial.

Dalam kurikulum merdeka, aspek karakter dan kompetensi dipandang sebagai dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam membentuk pribadi peserta didik secara utuh. Kompetensi yang dimaksud mencakup kemampuan literasi dan numerasi di semua mata pelajaran serta kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan sosial.

Sementara itu, karakter mencerminkan bagaimana peserta didik tidak hanya mampu menawarkan solusi, tetapi juga melakukannya dengan cara yang empati, bebas prasangka dan bias, membiasakan diri untuk berperilaku baik, serta aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Pengembangan karakter juga mencakup peningkatan kompetensi spiritual, moral, sosial, dan emosional peserta didik. Hal ini dapat dilakukan melalui pengalokasian waktu khusus maupun secara terintegrasi dalam proses pembelajaran.

Fleksibilitas atau keleluasaan sangat dibutuhkan agar pembelajaran dalam kurikulum merdeka tetap relevan dengan kondisi lingkungan, mengikuti isu-isu kontemporer, serta sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Satuan pendidikan diberikan ruang untuk mengadaptasi dan menambah materi pelajaran serta menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan peserta didik, visi dan misi satuan pendidikan, serta kearifan lokal. Dengan demikian, peran kementerian bukan lagi sebagai pengatur utama kurikulum secara terpusat dari atas ke bawah, melainkan sebagai

fasilitator yang memberikan contoh, tahapan implementasi, serta dukungan dan bantuan bagi satuan pendidikan yang masih memerlukan pendampingan dalam mengembangkan kurikulumnya secara mandiri.

Dalam Awalludin dkk. (2024), dirangkum bahwa fleksibilitas dalam pengembangan kurikulum menurut Sukmadinata mencakup muatan pelajaran yang solid, tetapi pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi regional, waktu, dan latar belakang kemampuan peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum harus memberikan ruang kebebasan bagi pendidik untuk mengembangkan program pembelajaran secara kreatif dan kontekstual.

Prinsip ketiga dalam pengembangan kurikulum merdeka adalah keberfokusan pada muatan esensial. Prinsip ini berkaitan dengan penyelarasan antara alokasi waktu dan kompetensi yang ingin diajarkan kepada peserta didik. Dengan demikian, muatan mata pelajaran tidak menjadi terlalu padat sehingga peserta didik memiliki kesempatan untuk memahami materi secara lebih mendalam dan meminimalkan risiko ketertinggalan.

Dalam merespons isu-isu kontemporer, sering kali dilakukan penambahan bab atau capaian pembelajaran yang justru menyebabkan materi menjadi semakin padat. Oleh karena itu, salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah penyesuaian struktur kurikulum agar lebih ringkas dan fokus.

Penyesuaian ini menjadikan proses pembelajaran dalam kurikulum merdeka tidak hanya terbatas pada kegiatan intrakurikuler, tetapi juga mencakup kegiatan kokurikuler dalam bentuk projek penguatan profil pelajar Pancasila. Projek ini bertujuan untuk membantu peserta didik mencapai kompetensi umum yang telah dirumuskan dalam profil tersebut. Strategi lainnya adalah dengan menyederhanakan kompetensi dan materi esensial yang terdapat dalam struktur kurikulum sehingga pembelajaran menjadi lebih relevan, efektif, dan bermakna.

Karakteristik Pembelajaran Kurikulum Merdeka

Pembelajaran merupakan ujung tombak dari realisasi kurikulum yang telah dirancang dengan landasan dan prinsip yang matang. Proses pembelajaran

yang melibatkan banyak pihak, terutama pendidik dan peserta didik secara langsung sangat menentukan tercapainya tujuan pendidikan. Oleh karena itu, penting untuk memahami karakteristik pembelajaran yang relevan dengan kurikulum merdeka.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024, terdapat beberapa karakter utama pembelajaran dalam kurikulum merdeka, yaitu sebagai berikut.

1. Pemanfaatan penilaian (asesmen) secara menyeluruh, dimulai dari asesmen awal pembelajaran, dilanjutkan dengan asesmen selama proses pembelajaran, hingga asesmen akhir.
2. Penyesuaian pembelajaran berdasarkan pemahaman pendidik terhadap kebutuhan dan kondisi peserta didik. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan sesuai dengan konteks masing-masing individu.
3. Fokus pada kemajuan belajar peserta didik, bukan semata-mata pada cakupan dan ketuntasan materi kurikulum. Prioritas utama adalah perkembangan dan pemahaman peserta didik.
4. Pembelajaran berbasis refleksi, yaitu dengan melakukan evaluasi terhadap kemajuan peserta didik secara berkelanjutan dan kolaboratif bersama pendidik lainnya.

Dengan karakteristik tersebut, pembelajaran dalam kurikulum merdeka diharapkan mampu menciptakan proses belajar yang adaptif, partisipatif, dan berorientasi pada perkembangan holistik peserta didik.

Karakteristik pembelajaran dalam kurikulum merdeka berperan penting dalam mendukung upaya pemulihan pendidikan, terutama karena kurikulum ini lahir bertepatan dengan masa pandemi Covid-19 yang sempat menghambat kegiatan pembelajaran. Menurut Nazwa Ningsih dan Sartika (2023), pemulihan pembelajaran melalui kurikulum merdeka diwujudkan melalui implementasi pembelajaran berbasis proyek (*project-based learning*). Tujuannya adalah untuk memperkaya keterampilan sosial dan karakter peserta didik, sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila.

Selain itu, penekanan pada materi yang esensial memberikan waktu yang lebih memadai bagi peserta didik untuk mencapai pemahaman yang mendalam terhadap keterampilan dasar seperti literasi dan numerasi. Karakter kurikulum merdeka yang memberikan fleksibilitas juga mendorong pendidik untuk mengadaptasi metode pembelajaran sesuai dengan perbedaan kemampuan peserta didik serta menyesuaikannya dengan konteks dan kebutuhan lokal.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa karakteristik pembelajaran dalam kurikulum merdeka menekankan pentingnya analisis dan evaluasi secara bertahap, yang dilakukan sebelum, selama, dan setelah penyampaian materi pembelajaran. Kurikulum ini juga mendorong relevansi dalam penyusunan materi dan metode pembelajaran oleh pendidik agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Selain itu, kurikulum merdeka berorientasi pada kemajuan peserta didik, bukan semata-mata pada ketuntasan penyampaian muatan pembelajaran. Evaluasi terhadap jalannya proses pembelajaran pun dilakukan tidak hanya oleh pendidik, tetapi juga melibatkan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses belajar peserta didik. Dengan pendekatan tersebut, kurikulum merdeka mendorong terwujudnya peserta didik yang mencerminkan profil pelajar Pancasila, dibekali dengan kompetensi akademik dan sosial yang mendalam melalui pembelajaran yang fleksibel dan metode yang tepat guna.

Struktur dan Komponen Kurikulum Merdeka

Sebelum mengimplementasikan suatu kurikulum, penting untuk memahami terlebih dahulu struktur kurikulum tersebut. Hal ini krusial karena struktur kurikulum merupakan bentuk pengorganisasian dan pengalokasian kompetensi, beban belajar, serta muatan pembelajaran yang akan diterima oleh peserta didik pada setiap jenjang pendidikan. Struktur kurikulum tidak hanya mengatur jumlah jam belajar yang dibutuhkan untuk mencapai kompetensi tertentu, tetapi juga mengatur susunan materi yang akan disampaikan kepada peserta didik.

Materi tersebut mencakup sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang harus dikuasai, dengan mempertimbangkan kebutuhan belajar peserta didik. Kompetensi sendiri merupakan kesatuan dari sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang perlu dipelajari oleh peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2021, struktur kurikulum merupakan salah satu kerangka dasar yang wajib ada dalam kurikulum merdeka. Secara umum, struktur dalam kurikulum merdeka terdiri atas kegiatan pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler berupa proyek penguatan profil pelajar Pancasila, serta kegiatan ekstrakurikuler yang disesuaikan dengan karakteristik satuan pendidikan. Setiap bentuk kegiatan dalam struktur kurikulum tersebut mencakup kompetensi, muatan pembelajaran, dan beban ajar dengan capaian, bentuk, serta karakteristik kegiatan yang berbeda-beda.

Alokasi jam pelajaran dalam struktur kurikulum dinyatakan secara total untuk satu tahun, disertai dengan saran alokasi mingguan apabila disampaikan secara reguler. Perubahan menuju kurikulum merdeka tidak mengubah jumlah total jam pelajaran; yang berubah adalah wadah pelaksanaannya. Pembelajaran tidak hanya dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler, tetapi juga melalui kegiatan kokurikuler sehingga jam pelajaran tampak berkurang secara formal (Anggara, 2023).

Pembelajaran intrakurikuler mencakup kegiatan belajar yang dilaksanakan di dalam kelas, dengan memuat kompetensi berupa capaian pembelajaran, muatan pembelajaran, dan beban belajar yang dirancang sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik peserta didik. Capaian pembelajaran dalam kegiatan intrakurikuler terbagi ke dalam tujuh fase sebagai berikut.

1. Fase fondasi untuk pendidikan anak usia dini (PAUD).
2. Fase A untuk kelas I hingga II di SD/MI/Paket A atau yang sederajat.
3. Fase B untuk kelas III hingga IV di SD/MI/Paket A atau yang sederajat.
4. Fase C untuk kelas V hingga VI di SD/MI/Paket A atau yang sederajat.
5. Fase D untuk tingkat SMP/MTs/Paket B atau yang sederajat.
6. Fase E untuk kelas X di SMA/MA/SMK/MAK/Paket C atau yang sederajat.

Setiap fase dalam kurikulum merdeka mencerminkan tahapan perkembangan peserta didik serta menjadi dasar dalam merancang pembelajaran yang relevan dan kontekstual. Capaian pembelajaran pada Fase F diperuntukkan bagi kelas XI hingga XII di SMA/MA/Paket C atau yang sederajat, serta kelas XI hingga XIII di SMK/MAK dengan program 4 tahun.

Muatan pembelajaran pada setiap jenjang pendidikan dirumuskan dengan pendekatan yang berbeda. Pada tingkat PAUD, muatan pembelajaran disusun secara terintegrasi dengan kompetensi yang ingin dibangun. Sementara itu, pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, muatan pembelajaran dirumuskan dalam bentuk mata pelajaran. Adapun untuk SMK dan MAK, muatan pembelajaran mencakup mata pelajaran keahlian yang disusun berdasarkan program dan konsentrasi keahlian sesuai spektrum yang ditetapkan oleh menteri. Terkait beban belajar, perumusannya dinyatakan dalam bentuk alokasi waktu selama satu tahun pelajaran.

Pembelajaran kokurikuler merupakan kegiatan di luar pembelajaran intrakurikuler yang tetap memuat kompetensi, muatan pembelajaran, dan beban belajar. Bentuk paling minimal dari kegiatan kokurikuler ini adalah projek penguatan profil pelajar Pancasila (P5). Namun, bentuk projek ini tidak berlaku bagi pendidikan kesetaraan, yang kemudian diarahkan pada bentuk kegiatan pemberdayaan dan keterampilan berbasis profil pelajar Pancasila.

Menurut Permendikbud Nomor 12 Tahun 2024, projek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu yang digunakan sebagai pendekatan dalam merumuskan isu atau permasalahan yang relevan untuk dijadikan topik projek. Isu-isu tersebut harus kontekstual dan relevan dengan kebutuhan serta lingkungan peserta didik.

Pelaksanaan projek ini disesuaikan dengan sumber daya yang tersedia di satuan pendidikan serta mengikuti panduan yang ditetapkan oleh pimpinan tingkat madya bidang kurikulum. Beban belajar untuk projek penguatan profil pelajar Pancasila dialokasikan dalam rentang satu tahun pelajaran.

Kompetensi yang harus dicapai dalam kegiatan ini mencakup enam dimensi utama berikut:

1. beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia;
2. berkebinekaan global;
3. bergotong royong;
4. mandiri;
5. bernalar kritis; dan
6. kreatif.

Muatan pembelajaran dalam projek ini disusun dalam bentuk tema besar, yang kemudian dikembangkan menjadi topik-topik sesuai dengan konteks sosial budaya satuan pendidikan serta karakteristik peserta didik.

Kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler ditujukan sebagai wadah pengembangan minat dan bakat peserta didik dengan menyesuaikan sumber daya yang ada pada satuan pendidikan. Satuan pendidikan dari jenjang dasar dan menengah jalur formal hingga pendidikan usia dini dan kesetaraan dapat mennyelenggarakan ekstrakurikuler.

Adapun dalam proses pengembangannya harus mengacu pada bagaimana komponen, jenis dan format kegiatan, prinsip pengembangan, mekanisme, evaluasi, daya dukung, dan pihak-pihak yang terlibat. Pembelajaran ekstrakurikuler bagi para peserta didik juga bersifat sukarela. Dengan demkian, peserta didik dapat memilih muatan kompetensi apa yang ingin dikuasai sesuai dengan *passion* dan keinginannya.

Dari pemaparan mengenai tiga bentuk kegiatan pembelajaran dalam kurikulum merdeka, dapat diketahui bahwa kurikulum ini mendukung terjadinya transformasi pendidikan yang lebih adaptif, tanpa mengabaikan pembelajaran teoritis yang tetap dibutuhkan oleh peserta didik di dalam kelas. Dapat disimpulkan pula bahwa struktur dalam kurikulum merdeka didasarkan pada tiga hal utama, yaitu berfokus pada pengembangan kompetensi, menanamkan nilai-nilai karakter Pancasila, serta memberikan fleksibilitas dalam merumuskan pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan peserta didik.

Menurut Salmah, U. dkk. (2024), terdapat beberapa prinsip yang digunakan dalam pengembangan struktur kurikulum merdeka, antara lain pembelajaran yang diatur berdasarkan jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, hingga SMK/MAK. Struktur minimum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan visi dan misi masing-masing satuan pendidikan. Alokasi waktu untuk satu jam pelajaran pun disesuaikan dengan jenjang pendidikan, yaitu 35 menit untuk SD, 40 menit untuk SMP, dan 45 menit untuk SMA.

Selain itu, terdapat prinsip otonom dan kesederhanaan, yang berarti bahwa kurikulum merdeka memberikan keleluasaan bagi satuan pendidikan untuk menyusun isi struktur kurikulum, baik dalam bentuk proses maupun materi pembelajaran, selama tetap relevan, kontekstual, dan mengacu pada tujuan serta arah perubahan yang jelas. Prinsip ini bertujuan agar kurikulum mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh pihak, baik di dalam maupun di luar satuan pendidikan. Pengembangan struktur kurikulum merdeka juga dilandasi oleh prinsip gotong royong, yaitu dengan melibatkan kolaborasi antara berbagai pihak, seperti kementerian, universitas, sekolah, serta lembaga pendidikan lainnya.

Tujuan Kurikulum Merdeka

Menteri Nadiem Anwar Makarim menyampaikan bahwa penetapan Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 merupakan bagian dari upaya menyeluruh untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara berkeadilan. Upaya ini tentu harus selaras dengan tujuan kurikulum yang relevan agar rancangan kurikulum dan implementasinya dapat menghasilkan *output* yang sesuai dengan landasan pembentukannya.

Dalam regulasi tersebut, secara eksplisit ditetapkan tujuan kurikulum merdeka, yaitu mewujudkan pembelajaran yang bermakna dan efektif dalam meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia, serta menumbuhkembangkan cipta, rasa, dan karsa peserta didik sebagai pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila.

Tujuan tersebut menegaskan bahwa kurikulum merdeka tidak hanya berfokus pada pembentukan kompetensi, tetapi juga menekankan pentingnya penguatan karakter peserta didik, baik secara sosial maupun religius. Hal ini sejalan dengan arah pembelajaran di sekolah penggerak, di mana proses pembelajarannya mengacu pada profil pelajar Pancasila. Dengan demikian, kurikulum merdeka bertujuan untuk melahirkan lulusan yang tidak hanya kompeten, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai karakter yang luhur.

Adapun tujuan program "merdeka belajar" adalah memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam berpikir dan berekspresi. Selain itu, meningkatkan kualitas pendidikan melalui pemberian keleluasaan kepada sekolah dalam menyelenggarakan penilaian dan penerapan kurikulum yang sesuai dengan kondisi lingkungan masing-masing.

Hal ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran harus selalu adaptif, dengan mengutamakan pengamatan dan penilaian untuk menentukan hal-hal yang relevan dan mendesak untuk dipelajari oleh peserta didik. Dengan pendekatan ini, peserta didik didorong untuk lebih peka terhadap lingkungan sekitarnya, mampu bersikap kritis terhadap berbagai permasalahan, serta membangun sikap dan tindakan yang tepat.

Kurikulum merdeka juga memberikan fleksibilitas kepada pendidik dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan kondisi peserta didik dan satuan pendidikan. Di sisi lain, kehadiran projek penguatan profil pelajar Pancasila **(P5)** dinilai mampu mendorong pengembangan karakter peserta didik secara lebih mendalam dan kontekstual.



BAB V
IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA

"Kurikulum merdeka bertujuan untuk membuat proses belajar-mengajar menjadi lebih menyenangkan bagi siswa dan guru. Kurikulum ini dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih kreatif dan menyenangkan sehingga meningkatkan semangat belajar siswa dan inovasi dalam pengajaran oleh guru."

- Nadiem Anwar Makarim

Pendahuluan

Sistem pendidikan di Indonesia perlu diperbarui karena perubahan zaman yang cepat dan kebutuhan akan sumber daya manusia yang fleksibel dan unik. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, berbagai kurikulum telah diterapkan selama beberapa dekade. Namun, analisis pelaksanaan kurikulum sebelumnya menunjukkan bahwa pembelajaran masih berfokus pada kognitif semata dan kurang kontekstualisasi.

Sering kali, pembelajaran kurang memungkinkan kreativitas dan peluang unik setiap peserta didik.

Pandemi Covid-19 yang memicu krisis pembelajaran telah memperburuk kondisi pendidikan di Indonesia. Ketimpangan akses pendidikan antardaerah serta rendahnya tingkat literasi dan numerasi, semakin mempertegas perlunya perubahan mendasar dalam metode pendidikan.

Sebagai respons terhadap situasi tersebut, kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi meluncurkan kebijakan merdeka belajar. Salah satu komponen utama dari kebijakan ini adalah penerapan kurikulum merdeka, yang dirancang agar lebih fleksibel dan sederhana. Kurikulum ini memberikan otonomi kepada sekolah dan pendidik untuk menentukan arah pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik peserta didik.

Selain itu, kurikulum merdeka menekankan pentingnya pembelajaran berbasis proyek. Tujuannya adalah untuk mendorong pendidik mengembangkan kreativitas dalam proses pembelajaran di kelas serta menjadikan pengalaman belajar lebih kontekstual dan bermakna bagi peserta didik.

Keberhasilan kurikulum merdeka juga bergantung pada kebijakan dan bagaimana para pelaksana di lapangan memahaminya. Implementasi masih menghadapi banyak masalah, termasuk keterbatasan pemahaman, kekurangan instruksi, dan kendala infrastruktur. Oleh karena itu, panduan yang relevan, reflektif, dan kontekstual diperlukan untuk membantu para pendidik dan pemangku kepentingan melaksanakan kurikulum merdeka dengan baik.

Kurikulum merdeka merupakan komponen utama dari kebijakan merdeka belajar, yang dirancang untuk menjawab tantangan pembelajaran pascapandemi serta memperkuat kualitas pendidikan secara menyeluruh. Dalam implementasinya, kurikulum merdeka menuntut perubahan paradigma dari sistem pembelajaran yang kaku menjadi pembelajaran yang lebih fleksibel, berpusat pada peserta didik, dan kontekstual.

Ciri Utama Kurikulum Merdeka

Berikut adalah ciri utama kurikulum merdeka yang membedakannya dari kurikulum sebelumnya.

1. Pembelajaran P5

   Pembelajaran berbasis proyek (*project-based learning*) merupakan salah satu pendekatan utama dalam kurikulum merdeka, yang secara khusus diterapkan dalam kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila (P5). Tujuan utamanya adalah membentuk karakter dan kompetensi abad ke-21 pada peserta didik melalui pengalaman belajar yang bermakna, kontekstual, dan kolaboratif.

   Karakteristik utama pembelajaran berbasis proyek antara lain sebagai berikut.

   a. Mengangkat tema-tema besar seperti gaya hidup berkelanjutan, budaya lokal, demokrasi, kebinekaan global, dan kewirausahaan.
   b. Bersifat lintas mata pelajaran (*interdisipliner*) dengan fokus pada proses, bukan hasil akhir.
   c. Penilaian tidak menggunakan angka, melainkan deskripsi terhadap kualitas perkembangan peserta didik.
   d. Mendorong keterlibatan aktif peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan nyata yang terjadi di lingkungan sekitar.

   Sementara itu, dampak terhadap pembelajaran adalah sebagai berikut.

   a. Menumbuhkan kepedulian sosial dan lingkungan.
   b. Mengembangkan keterampilan abad ke-21, yaitu *critical thinking* (berpikir kritis), *communication* (komunikasi), *collaboration* (kolaborasi), dan *creativity* (kreativitas), atau dikenal dengan 4C.
   c. Menjadi ruang eksplorasi konkret untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

   Pembelajaran berbasis proyek dalam kurikulum merdeka bukan hanya menekankan pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pembentukan pribadi peserta didik yang berkarakter, reflektif, dan mampu berkontribusi dalam masyarakat.

2. Fokus pada materi esensial dan pendalaman kompetensi
Kurikulum merdeka secara eksplisit menyederhanakan beban kurikulum dengan hanya memuat kompetensi-kompetensi inti dan esensial, terutama dalam aspek literasi, numerasi, dan penguatan karakter. Penyederhanaan ini tidak sekadar mengurangi jumlah konten, tetapi bertujuan agar pembelajaran menjadi lebih mendalam dan tidak bersifat permukaan.

Karakteristik utama kurikulum merdeka antara lain sebagai berikut.

a. Capaian pembelajaran (CP) disusun berdasarkan fase (dua hingga tiga tahun), bukan per tahun ajaran.
b. Setiap fase memuat kompetensi inti yang menjadi dasar bagi capaian kompetensi di fase berikutnya.
c. Peserta didik diberikan waktu yang lebih leluasa untuk memahami dan menguasai konsep-konsep penting.

Dampak terhadap proses pembelajaran adalah sebagai berikut.

a. Pendidik memiliki lebih banyak waktu untuk menyelenggarakan pembelajaran yang mendalam (*deep learning*).
b. Proses asesmen menjadi lebih bermakna karena berfokus pada penguasaan kompetensi, bukan sekadar capaian nilai.
c. Peserta didik memiliki ruang untuk berkembang sesuai dengan potensi dan kecepatan belajarnya masing-masing.

Dengan pendekatan ini, kurikulum merdeka diharapkan mampu menciptakan pengalaman belajar yang lebih relevan, adaptif, dan berpusat pada peserta didik.

3. Fleksibilitas bagi pendidik dan satuan pendidikan
Ciri ketiga yang sangat menonjol dalam kurikulum merdeka adalah adanya fleksibilitas yang lebih besar bagi pendidik dan satuan pendidikan dalam merancang serta melaksanakan pembelajaran. Kurikulum ini menekankan pendekatan yang responsif terhadap kebutuhan peserta didik serta kontekstual terhadap lingkungan belajar.

Karakteristik utama dari fleksibilitas ini antara lain sebagai berikut.

a. Pendidik diberikan kewenangan untuk memilih atau menyusun sendiri perangkat ajar, seperti modul ajar, lembar kerja, asesmen, dan strategi pembelajaran.
b. Sekolah memiliki keleluasaan dalam menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan (KOSP) berdasarkan visi, misi, serta karakteristik peserta didik dan lingkungannya.
c. Tidak ada kewajiban untuk menggunakan buku teks tertentu atau mengikuti urutan topik yang seragam secara nasional.

Dampak terhadap pembelajaran adalah sebagai berikut.

a. Mendorong inovasi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi lokal.
b. Memberikan ruang kreativitas bagi pendidik untuk bereksperimen dan mengevaluasi berbagai pendekatan pembelajaran yang paling efektif.
c. Meningkatkan relevansi pembelajaran dengan dunia nyata dan lingkungan sekitar peserta didik.

Fleksibilitas ini menjadi landasan penting dalam menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna, personal, dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Berikut adalah tabel perbandingan antara kurikulum merdeka dan kurikulum 2013 berdasarkan tiga ciri utama kurikulum merdeka.

Aspek	Kurikulum 2013 (K-13)	Kurikulum Merdeka (KM)
1. Pendekatan Pembelajaran	Terstruktur dan berorientasi pada konten; menggunakan pendekatan saintifik dengan urutan baku (mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan).	Kontekstual dan fleksibel; menekankan pembelajaran berbasis proyek (*project-based learning*) khususnya untuk penguatan profil pelajar Pancasila.
2. Fokus Materi	Materi padat dan luas, mencakup banyak kompetensi dasar (KD) setiap tahun ajaran.	Materi disederhanakan, fokus pada kompetensi esensial dengan capaian pembelajaran (CP) per fase (2—3 tahun).

Aspek	Kurikulum 2013 (K-13)	Kurikulum Merdeka (KM)
3. Peran Pendidik	Sebagian besar mengikuti buku teks dan alur baku dari pusat; ruang inovasi terbatas.	Pendidik diberi otonomi menyusun atau memilih modul ajar sesuai kebutuhan peserta didik dan konteks lokal.
4. Perangkat Ajar	Disediakan secara nasional dan digunakan seragam; buku teks menjadi acuan utama.	Pendidik dapat menggunakan perangkat ajar dari PMM, menyusun sendiri, atau mengadaptasi sesuai kebutuhan.
5. Penilaian	Penilaian cenderung berbasis angka dan administratif (KKM, rapor).	Penilaian lebih formatif, diagnostik, dan deskriptif untuk mendorong pembelajaran yang reflektif dan personal.
6. Struktur Kurikulum	Per jenjang kelas (kelas 1—6, 7—9, 10—12); setiap tahun ada capaian tertentu.	Per fase (Fase A-F); pendekatan fleksibel terhadap capaian dalam rentang waktu lebih luas.
7. Keterlibatan Peserta Didik	Peserta didik lebih pasif, mengikuti instruksi dan kegiatan yang ditentukan pendidik.	Peserta didik aktif, kritis, kolaboratif, dan dilibatkan dalam proses eksplorasi dan pemecahan masalah.
8. Otonomi Sekolah	Kurikulum dikendalikan secara nasional; sekolah mengikuti struktur kurikulum baku.	Sekolah diberi keleluasaan menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan (KOSP) yang kontekstual dan fleksibel.

Struktur Kurikulum Merdeka

Struktur kurikulum merdeka dirancang untuk memberikan kesederhanaan, fleksibilitas, dan kedalaman belajar. Kurikulum ini menyusun pembelajaran berdasarkan fase perkembangan, bukan per tingkat kelas seperti pada kurikulum sebelumnya. Pendekatan ini memungkinkan proses pembelajaran yang lebih adaptif terhadap kecepatan dan kebutuhan belajar peserta didik.

1. Pembagian fase dalam kurikulum merdeka

   Struktur kurikulum merdeka membagi jenjang pendidikan ke dalam enam fase perkembangan sebagai berikut.

Fase	Jenjang Kelas	Usia Rata-Rata
Fase A	Kelas 1 dan 2 SD	6—8 tahun
Fase B	Kelas 3 dan 4 SD	8—10 tahun
Fase C	Kelas 5 dan 6 SD	10—12 tahun
Fase D	Kelas 7, 8, dan 9 SMP	12—15 tahun
Fase E	Kelas 10 SMA/SMK	15—16 tahun
Fase F	Kelas 11 dan 12 SMA/SMK	16—18 tahun

2. Komponen struktur kurikulum

   Struktur kurikulum merdeka terdiri dari dua komponen utama berikut.

   a. Mata pelajaran (intrakurikuler)

      Mata pelajaran (intrakurikuler) disusun berdasarkan jenjang dan fase, dengan materi yang disederhanakan dan difokuskan pada kompetensi esensial, yaitu literasi, numerasi, dan penguatan karakter. Pendidik juga diberikan keleluasaan untuk memilih atau menyusun sendiri modul ajar.

   b. Projek penguatan profil pelajar Pancasila

      Projek penguatan profil pelajar Pancasila bersifat interdisipliner dan dilaksanakan secara tematik. Kegiatan ini tidak termasuk dalam beban jam pelajaran reguler, tetapi dialokasikan waktu khusus dan dilaksanakan secara fleksibel dalam satu tahun ajaran.

3. Alokasi waktu dalam kurikulum merdeka

   Alokasi waktu pada kurikulum merdeka dibagi berdasarkan jam pelajaran (JP) per tahun, bukan per minggu. Jam pelajaran dapat dikelola secara lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan dan strategi masing-masing sekolah. Sebagai contoh, mata pelajaran Bahasa Indonesia pada Fase D (SMP) memiliki total 360 JP per tahun, yang dapat dibagi rata per minggu atau disesuaikan dengan kebijakan dan pendekatan pembelajaran sekolah.

4. Kurikulum operasional satuan pendidikan
   Setiap sekolah diminta untuk menyusun KOSP sebagai turunan dari kurikulum merdeka, yang disesuaikan dengan visi, misi, dan karakteristik sekolah, kondisi peserta didik, serta kebutuhan dan potensi lokal. KOSP menjadi dokumen utama yang memandu pelaksanaan pembelajaran, asesmen, dan kegiatan projek penguatan profil pelajar Pancasila di tingkat satuan pendidikan.
5. Fleksibilitas dalam struktur
   Beberapa bentuk fleksibilitas yang diberikan dalam struktur kurikulum merdeka antara lain sebagai berikut.
   a. Satuan pendidikan dapat menentukan model pengorganisasian pembelajaran, seperti tematik, per mata pelajaran, blok waktu, dan lainnya.
   b. SMA diberikan keleluasaan untuk memilih program lintas minat dan mata pelajaran pilihan sejak kelas XI.
   c. SMK memiliki struktur kurikulum khusus yang berbasis pada pembelajaran di dunia kerja.

Strategi Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah

Implementasi kurikulum merdeka tidak hanya menuntut perubahan secara administratif, tetapi juga memerlukan transformasi dalam cara berpikir, bertindak, dan berkolaborasi di lingkungan sekolah. Strategi implementasi yang efektif mencakup berbagai langkah sistematis yang dapat disesuaikan dengan kondisi dan tingkat kesiapan masing-masing satuan pendidikan.

1. Penguatan pemahaman dan komitmen seluruh warga sekolah
   Langkah-langkah implementasi kurikulum merdeka meliputi melakukan sosialisasi intensif kepada seluruh pemangku kepentingan (pendidik, kepala sekolah, komite sekolah, orang tua), menyusun visi dan misi sekolah yang sejalan dengan semangat kurikulum merdeka, serta mengadakan forum diskusi atau lokakarya pemahaman konsep "profil pelajar Pancasila dan nilai-nilai inti kurikulum merdeka". Tujuan dari

langkah-langkah ini adalah untuk menumbuhkan *sense of ownership* terhadap kurikulum baru serta membangun semangat kolektif dalam mengembangkan budaya merdeka belajar.

2. Penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan
   Langkah-langkah yang dilakukan meliputi mengkaji profil sekolah, kebutuhan peserta didik, dan potensi lingkungan sekitar; menyusun KOSP dengan komponen karakteristik satuan pendidikan, visi-misi, pengorganisasian pembelajaran, dan rencana pengembangan P5; serta melibatkan tim pengembang kurikulum sekolah secara kolaboratif. Tujuan dari langkah-langkah ini adalah menyesuaikan implementasi kurikulum dengan konteks lokal sekolah dan menjadi pedoman praktik pembelajaran yang lebih fleksibel serta bermakna.
3. Perencanaan pembelajaran yang adaptif dan kontekstual
   Langkah-langkah yang dilakukan meliputi pendidik menyusun atau memilih modul ajar dari platform merdeka mengajar (PMM) atau sumber lain yang relevan, mengintegrasikan elemen-elemen diferensiasi, asesmen diagnostik, dan projek berbasis masalah nyata, serta menyelaraskan RPP atau modul ajar dengan capaian pembelajaran dan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Tujuan dari langkah-langkah ini adalah mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan memberikan ruang tumbuh bagi keunikan serta potensi masing-masing peserta didik.
4. Pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila
   Langkah-langkah yang dilakukan meliputi menyusun tim pelaksana P5 lintas mata pelajaran, memilih tema P5 sesuai prioritas sekolah (contoh kewirausahaan, budaya lokal, perubahan iklim), serta menentukan alokasi waktu khusus dan mekanisme pelaksanaan (blok waktu atau mingguan). Tujuan dari langkah-langkah ini adalah mengembangkan karakter peserta didik sesuai nilai-nilai Pancasila secara aplikatif serta menumbuhkan keterampilan abad ke-21 (*critical thinking*, *communication*, *collaboration*, *creativity*).

5. Penguatan kapasitas pendidik dan kepala sekolah
   Langkah-langkah yang dilakukan meliputi mengikuti pelatihan mandiri melalui PMM atau program komunitas belajar, mengembangkan komunitas praktisi (CoP) di tingkat sekolah atau gugus, serta melakukan supervisi akademik yang membina dan reflektif, bukan sekadar kontrol administratif. Tujuan dari langkah-langkah ini adalah meningkatkan kompetensi pedagogis dan profesional pendidik serta memperkuat kepemimpinan transformasional di sekolah.
6. Monitoring, evaluasi, dan refleksi berkala
   Langkah-langkah yang dilakukan meliputi menyusun instrumen pemantauan pelaksanaan pembelajaran dan P5, melakukan refleksi kolektif setiap akhir tema atau semester, serta melibatkan peserta didik dan orang tua dalam evaluasi proses. Tujuan dari langkah-langkah ini adalah menjamin keberlanjutan dan konsistensi implementasi kurikulum serta menumbuhkan budaya perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*).
7. Kolaborasi dengan ekosistem pendidikan
   Langkah-langkah yang dilakukan meliputi membangun kemitraan dengan dinas pendidikan, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat, serta mengadakan program magang, kunjungan industri, atau proyek komunitas sebagai bagian dari pembelajaran kontekstual. Tujuan dari langkah-langkah ini adalah memperkuat keterkaitan antara sekolah dan dunia nyata serta meningkatkan relevansi pembelajaran dan kesiapan peserta didik menghadapi masa depan.

Strategi implementasi kurikulum merdeka di sekolah menekankan perubahan paradigma dari pendidikan yang seragam dan kaku menjadi pendidikan yang inklusif, adaptif, dan memberdayakan. Keberhasilan implementasinya tidak hanya diukur dari kelengkapan dokumen, tetapi dari perubahan nyata dalam proses dan hasil belajar peserta didik.

Peran Pendidik dalam Implementasi Kurikulum Merdeka

Dalam paradigma kurikulum merdeka, pendidik tidak hanya dipandang sebagai pelaksana kurikulum, tetapi sebagai agen perubahan yang memiliki kebebasan sekaligus tanggung jawab untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Pendidik menjadi aktor utama dalam memastikan kurikulum ini benar-benar menjawab kebutuhan peserta didik di abad ke-21. Peran-peran penting yang diemban pendidik dalam implementasi kurikulum merdeka antara lain sebagai berikut.

1. Memahami capaian pembelajaran setiap fase
   Pendidik harus memahami capaian pembelajaran (CP) sebagai rujukan utama dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Capaian pembelajaran memberikan arah yang jelas tentang kompetensi apa yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase perkembangan. Pendidik dapat merancang pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kesiapan dan kebutuhan mereka.
2. Menyusun modul ajar yang kontekstual
   Pendidik memiliki kebebasan untuk menyusun modul ajar sendiri yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan konteks lingkungan belajar. Modul ajar yang baik adalah modul yang fleksibel, relevan, serta mampu mengakomodasi keberagaman latar belakang dan minat peserta didik.
3. Melaksanakan asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif
   Asesmen tidak hanya dimaknai sebagai pengukuran hasil belajar, tetapi juga sebagai bagian integral dari proses pembelajaran. Pendidik perlu melaksanakan asesmen diagnostik untuk mengidentifikasi kondisi awal peserta didik, asesmen formatif untuk memberikan umpan balik yang membangun selama proses belajar, dan asesmen sumatif untuk menilai capaian akhir.

4. Menerapkan pembelajaran berdiferensiasi
   Dalam kelas yang heterogen, pendidik dituntut untuk mampu mengakomodasi perbedaan dalam kesiapan belajar, minat, dan gaya belajar peserta didik. Pembelajaran berdiferensiasi mendorong pendidik untuk menggunakan strategi yang beragam agar semua peserta didik dapat berkembang secara optimal sesuai potensi mereka.

Tantangan dalam Implementasi Kurikulum Merdeka

Meskipun kurikulum merdeka dirancang untuk memberikan fleksibilitas dan otonomi kepada pendidik, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan sebagai berikut.

1. Ketidaksiapan pendidik dalam memahami struktur dan prinsip kurikulum merdeka. Perubahan paradigma pembelajaran menuntut pemahaman baru tentang konsep CP, ATP, dan pembelajaran berbasis proyek. Banyak pendidik masih merasa bingung atau belum sepenuhnya memahami kerangka kurikulum yang baru ini.
2. Keterbatasan sarana digital dan akses internet. Ketimpangan infrastruktur teknologi, terutama di daerah 3T menjadi kendala dalam mengakses sumber belajar, platform digital, serta pengembangan profesional berbasis daring.
3. Beban administratif dan resistensi terhadap perubahan. Pendidik sering kali terbebani dengan administrasi yang menyita waktu sehingga tidak memiliki cukup ruang untuk mengeksplorasi pembelajaran yang inovatif. Selain itu, ada pula resistensi dari sebagian pendidik terhadap perubahan yang dianggap kompleks dan membingungkan.
4. Kurangnya waktu untuk kolaborasi dan perencanaan proyek. Implementasi pembelajaran berbasis proyek (*project-based learning*) memerlukan waktu untuk perencanaan lintas mata pelajaran. Namun, jadwal mengajar yang padat sering kali menjadi hambatan dalam membangun kolaborasi antarpendidik.

Solusi dan Rekomendasi Strategis

Menghadapi tantangan tersebut, dibutuhkan pendekatan yang kolaboratif, praktis, dan berkelanjutan. Beberapa strategi yang direkomendasikan untuk mendukung peran pendidik dalam implementasi kurikulum merdeka antara lain sebagai berikut.

1. Pelatihan berkelanjutan berbasis praktik nyata. Pendidik memerlukan pelatihan yang tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga berbasis praktik langsung di kelas. Model pelatihan ideal adalah yang melibatkan praktik, refleksi, serta pendampingan oleh mentor atau fasilitator berpengalaman.
2. Penguatan komunitas belajar antarpendidik dan antarsekolah. Komunitas belajar menjadi ruang strategis untuk berbagi praktik baik, menyusun perangkat ajar bersama, serta membangun solidaritas profesi. Komunitas ini juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kapasitas secara mandiri dan kolektif.
3. Pemanfaatan teknologi sederhana untuk komunikasi dan kolaborasi. Platform seperti WhatsApp group, Google Docs, atau video pembelajaran sederhana dapat menjadi media efektif untuk berdiskusi, menyebarkan informasi, dan menyusun perangkat ajar secara bersama-sama.
4. Kepemimpinan kepala sekolah dalam memfasilitasi perubahan budaya kerja. Kepala sekolah memiliki peran penting dalam menciptakan iklim kerja yang mendukung pembelajaran transformatif. Dukungan kepala sekolah dapat berupa pengurangan beban administratif, penyediaan waktu kolaboratif, dan penguatan budaya reflektif di lingkungan sekolah.



BAB VI

PENILAIAN PADA KURIKULUM MERDEKA

Pendahuluan

Kurikulum merupakan elemen penting dalam proses pembelajaran yang senantiasa mengalami perubahan guna menyesuaikan kebutuhan zaman. Pergantian kurikulum tidak hanya membawa dampak pada isi materi dan perencanaan pembelajaran, tetapi juga terhadap strategi pelaksanaan serta sistem penilaiannya. Kurikulum merdeka hadir dengan paradigma baru yang berbeda dari kurikulum 2013, khususnya dalam pendekatan penilaian. Jika sebelumnya kurikulum 2013 lebih menekankan pada penilaian autentik yang menilai proses dan hasil belajar secara menyeluruh dalam konteks nyata, kurikulum merdeka memperkenalkan penilaian yang lebih terstruktur dalam bentuk diagnostik, formatif, dan sumatif yang diarahkan untuk mendukung penguatan profil pelajar Pancasila.

Penerapan kurikulum merdeka menuntut pendidik untuk beradaptasi dan mengubah kebiasaan dalam proses evaluasi pembelajaran. Menurut

Rahayu dkk. (2022), pendekatan baru ini menjadikan pembelajaran lebih relevan dan interaktif karena berbasis proyek, yang memungkinkan peserta didik terlibat aktif dalam mengeksplorasi isu-isu nyata di lingkungan mereka. Hal ini menjadikan proses penilaian tidak hanya sebagai pengukuran hasil belajar, tetapi juga sebagai alat untuk memahami kebutuhan belajar peserta didik sejak awal melalui penilaian diagnostik, mendampingi proses pembelajaran dengan penilaian formatif, serta menilai capaian akhir melalui penilaian sumatif.

Dengan demikian, pendidik memiliki peran strategis sebagai agen perubahan dalam keberhasilan implementasi kurikulum merdeka. Cahyono (2020) menekankan bahwa kualitas sumber daya manusia, khususnya pendidik menjadi faktor dominan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Pendidik yang kompeten tidak hanya mampu merancang pembelajaran secara sistematis dan sesuai prinsip-prinsip pendidikan, tetapi juga mampu melaksanakan penilaian yang selaras dengan semangat kurikulum merdeka.

Dalam kurikulum merdeka terdapat tiga ranah penilaian, yaitu penilaian diagnostik, formatif, dan sumatif. Ketiga jenis penilaian ini memiliki peran penting dalam mendukung proses pembelajaran.

Penilaian Diagnostik

Penilaian diagnostik dalam kurikulum merdeka adalah penilaian yang bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar, kekuatan, dan kelemahan peserta didik sebelum memulai pembelajaran (Ardiansyah, 2023). Hasilnya digunakan untuk merancang pembelajaran yang lebih adaptif dan sesuai dengan kebutuhan setiap peserta didik. Adapun tujuan dari penilaian diagnostik adalah sebagai berikut.

1. Mengidentifikasi tingkat kesiapan belajar peserta didik
   Penilaian diagnostik bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran baru. Hal ini mencakup identifikasi terhadap penguasaan pengetahuan dan keterampilan dasar yang menjadi prasyarat sebelum memasuki materi selanjutnya.

Dengan mengetahui kesiapan awal ini, pendidik dapat memetakan tingkat pemahaman peserta didik secara individual.

Informasi tersebut memungkinkan pendidik untuk menyesuaikan pendekatan, strategi, serta kedalaman materi yang akan disampaikan. Dengan begitu, proses pembelajaran menjadi lebih efektif karena disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan aktual peserta didik sehingga pembelajaran tidak terlalu berat maupun terlalu mudah bagi mereka.

2. Mengetahui kelemahan dan kekuatan peserta didik
   Penilaian diagnostik memungkinkan pendidik untuk mengidentifikasi secara menyeluruh kekuatan dan kelemahan peserta didik dalam berbagai aspek, yaitu kognitif (pengetahuan), afektif (sikap atau nilai), dan psikomotor (keterampilan). Dengan pemetaan ini, pendidik mendapatkan gambaran jelas mengenai kemampuan peserta didik secara holistik tidak hanya dari segi intelektual, tetapi juga dari aspek emosional dan praktikal.

   Dengan mengetahui area yang membutuhkan perhatian khusus, pendidik dapat merancang intervensi pembelajaran yang tepat untuk menguatkan kemampuan yang lemah. Di sisi lain, pendidik juga dapat memberikan tantangan dan pengembangan lebih lanjut pada potensi peserta didik yang sudah menunjukkan kemampuan baik sehingga proses pembelajaran menjadi lebih personal serta efektif.

3. Mendeteksi gaya belajar dan kebutuhan khusus peserta didik
   Penilaian diagnostik sangat bermanfaat untuk mendeteksi gaya belajar peserta didik, apakah mereka lebih dominan dalam gaya belajar visual, auditori, atau kinestetik. Dengan mengetahui preferensi ini, pendidik dapat menyusun strategi pembelajaran yang lebih sesuai dan menarik bagi peserta didik sehingga materi lebih mudah dipahami dan proses belajar menjadi lebih menyenangkan.

   Selain gaya belajar, penilaian diagnostik juga membantu pendidik mengidentifikasi kebutuhan khusus atau hambatan belajar yang mungkin dimiliki peserta didik, seperti kesulitan membaca, gangguan pemusatan perhatian, atau faktor emosional tertentu. Dengan

pemahaman ini, pendidik bisa merancang pendekatan yang lebih inklusif dan adaptif guna memastikan bahwa semua peserta didik memperoleh akses pembelajaran yang adil dan optimal.

4. Merancang pembelajaran yang terdiferensiasi
   Penilaian diagnostik memungkinkan pendidik untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang kemampuan awal dan kebutuhan belajar peserta didik. Informasi ini menjadi fondasi penting dalam merancang pembelajaran yang terdiferensiasi, yaitu pendekatan yang menyesuaikan proses, konten, maupun produk pembelajaran dengan karakteristik peserta didik yang beragam.

   Dengan menerapkan pembelajaran terdiferensiasi, pendidik tidak lagi menggunakan satu metode yang sama untuk semua peserta didik, melainkan memberikan perlakuan berbeda sesuai dengan tingkat kesiapan, minat, serta gaya belajar. Hal ini dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran karena setiap peserta didik mendapatkan pengalaman belajar yang lebih relevan dan menantang sesuai kemampuannya.

   Pembelajaran terdiferensiasi juga mendorong terciptanya lingkungan belajar yang lebih inklusif, di mana setiap peserta didik merasa dihargai dan didukung dalam proses belajarnya. Melalui pendekatan ini, peserta didik dengan kebutuhan belajar khusus maupun yang memiliki keunggulan akademik, dapat berkembang secara optimal karena pembelajaran dirancang untuk menjangkau semua lapisan kemampuan dalam kelas.

5. Mencegah kesenjangan belajar lebih awal
   Penilaian diagnostik memainkan peran penting dalam mendeteksi potensi kesenjangan belajar sejak awal proses pembelajaran. Dengan memahami kondisi awal peserta didik, pendidik dapat mengetahui siapa saja yang mengalami hambatan dalam memahami konsep dasar atau memiliki keterbatasan tertentu yang dapat mengganggu kelancaran proses belajar ke depannya.

   Melalui informasi tersebut, pendidik dapat segera memberikan intervensi yang sesuai dan proporsional. Intervensi ini bisa berupa

pendampingan tambahan, penyusunan materi remedial, atau pengaturan ulang strategi penyampaian materi agar lebih mudah dipahami oleh peserta didik yang mengalami kesulitan. Langkah cepat dan responsif ini dapat meminimalisir risiko ketertinggalan yang lebih besar di kemudian hari.

Dengan demikian, penilaian diagnostik tidak hanya berfungsi sebagai alat pemetaan awal, tetapi juga sebagai upaya pencegahan *learning loss* secara sistematis. Kegiatan ini memastikan bahwa semua peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk memahami materi, berkembang secara optimal, dan berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran tanpa merasa tertinggal dari teman-teman sekelasnya.

6. Membantu pendidik dalam menetapkan target pembelajaran
   Penilaian diagnostik berperan penting dalam membantu pendidik merumuskan target pembelajaran yang realistis dan sesuai dengan kondisi peserta didik. Melalui data yang diperoleh dari hasil penilaian awal ini, pendidik dapat memahami sejauh mana pengetahuan, keterampilan, dan kesiapan peserta didik dalam menghadapi materi yang akan diajarkan. Informasi ini sangat krusial untuk memastikan bahwa target yang ditetapkan tidak terlalu tinggi atau justru terlalu rendah.

   Dengan menetapkan tujuan yang disesuaikan dengan kondisi aktual peserta didik, proses pembelajaran akan menjadi lebih efektif dan terarah. Pendidik tidak hanya mengajar berdasarkan asumsi, tetapi berdasarkan data konkret yang menunjukkan kemampuan dan kebutuhan peserta didik. Hal ini juga memungkinkan pendidik untuk menyusun tahapan-tahapan pembelajaran yang sistematis dan bertahap agar setiap peserta didik dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan mencapai perkembangan yang optimal.

   Selain itu, penetapan target yang realistis juga menghindarkan peserta didik dari tekanan akademik yang berlebihan. Ketika ekspektasi disesuaikan dengan kemampuan mereka, peserta didik akan lebih termotivasi untuk belajar karena merasa mampu mencapainya.

Dengan demikian, penilaian diagnostik menjadi fondasi penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang sehat, produktif, dan berorientasi pada perkembangan individu peserta didik.

Selanjutnya, terdapat dua jenis penilaian diagnostik yang digunakan untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang kesiapan dan karakteristik belajar peserta didik, baik dari aspek akademik maupun non-akademik.

1. Penilaian kognitif

   Penilaian kognitif merupakan upaya awal untuk mengetahui sejauh mana penguasaan peserta didik terhadap materi pelajaran yang menjadi dasar atau prasyarat sebelum memulai topik baru. Jenis penilaian ini mencakup pemahaman konsep dasar, fakta penting, serta kemampuan berpikir logis dan analitis yang relevan dengan mata pelajaran tertentu.

   Tujuan utama dari penilaian ini adalah untuk memetakan tingkat penguasaan peserta didik terhadap materi akademik agar pendidik dapat mengetahui peserta didik yang sudah siap melanjutkan ke materi berikutnya dan peserta didik yang masih membutuhkan penguatan. Penilaian ini umumnya dilakukan melalui tes tertulis, soal-soal pilihan ganda, uraian singkat, atau latihan-latihan berbasis kompetensi dasar.

   Dengan hasil dari penilaian kognitif, pendidikan dapat menyesuaikan metode dan pendekatan pembelajaran agar lebih efektif. Pendidik juga bisa menetapkan kelompok belajar yang heterogen atau memberikan pengayaan dan remedial sesuai kebutuhan peserta didik. Hal ini membantu menciptakan proses pembelajaran yang lebih adaptif dan terarah.

2. Penilaian nonkognitif

   Penilaian nonkognitif merupakan bagian penting dari penilaian diagnostik yang fokus pada aspek-aspek di luar kemampuan akademik. Tujuannya adalah untuk memahami latar belakang, karakter, serta kondisi psikososial peserta didik yang dapat memengaruhi proses belajarnya. Aspek yang dinilai bisa mencakup lingkungan keluarga, kondisi emosional, kebiasaan belajar, dan keterampilan sosial.

Salah satu manfaat utama dari penilaian nonkognitif adalah kemampuannya dalam mengungkapkan faktor-faktor tersembunyi yang mungkin menjadi penyebab rendahnya performa belajar peserta didik. Misalnya, kurangnya dukungan di rumah, motivasi belajar yang rendah, atau gaya belajar yang tidak cocok dengan metode pengajaran pendidik. Data ini memungkinkan pendidik untuk lebih peka dan tanggap terhadap kebutuhan individu peserta didik.

Dengan memahami sisi nonkognitif peserta didik, pendidik dapat menyusun strategi pembelajaran yang lebih menyeluruh. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan emosional dan sosial peserta didik. Hal ini penting untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman, mendukung, dan mampu membangun rasa percaya diri peserta didik dalam belajar.

Kemudian guna melaksanakan penilaian ini secara efektif, pendidik perlu mengikuti beberapa langkah utama yang mencakup beberapa hal berikut.

1. Persiapan

   Tahapan awal dalam melakukan penilaian diagnostik adalah persiapan yang matang dan terencana. Pada tahap ini, pendidik harus menentukan jenis penilaian yang akan digunakan, apakah berupa tes tertulis, angket, observasi, atau wawancara. Pemilihan jenis penilaian disesuaikan dengan tujuan dan konteks pembelajaran, serta karakteristik peserta didik yang akan dinilai agar hasilnya lebih akurat dan relevan.

   Selanjutnya, pendidik juga perlu menyusun instrumen penilaian dengan cermat, memastikan bahwa indikator yang digunakan sesuai dengan tujuan pembelajaran serta kemampuan dasar yang ingin diukur. Penyusunan instrumen yang baik akan membantu memperoleh data yang valid dan dapat digunakan sebagai dasar dalam merancang pembelajaran yang tepat serta efektif.

   Selain itu, penting bagi pendidik untuk menjelaskan tujuan penilaian kepada peserta didik sebelum pelaksanaan. Penjelasan ini

bertujuan agar peserta didik memahami bahwa penilaian diagnostik bukanlah alat untuk menghakimi atau memberikan tekanan, melainkan sebagai sarana untuk mengenali kesiapan dan kebutuhan belajar sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung dengan lebih optimal.

2. Pelaksanaan

   Setelah persiapan dilakukan dengan matang, langkah selanjutnya dalam proses penilaian diagnostik adalah pelaksanaan. Pada tahap ini, pendidik mulai mengimplementasikan penilaian sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Pelaksanaan dapat dilakukan secara individu maupun kelompok, tergantung pada bentuk instrumen dan tujuan yang ingin dicapai. Proses ini harus dijalankan dengan sistematis sehingga hasil yang diperoleh bisa valid dan digunakan untuk langkah-langkah pembelajaran selanjutnya.

   Dalam pelaksanaan penilaian, pendidik juga harus menciptakan suasana yang nyaman dan mendukung. Suasana bebas tekanan akan mendorong peserta didik menampilkan kemampuan serta karakteristik belajarnya secara lebih autentik dan jujur. Lingkungan yang kondusif akan sangat membantu peserta didik dalam mengungkapkan pemahamannya secara natural, tanpa rasa takut dinilai buruk atau dibandingkan dengan peserta didik lain. Pendekatan yang humanis ini akan memperkuat akurasi data yang dikumpulkan.

   Selain itu, pelaksanaan penilaian harus dilakukan secara cermat dan objektif. Pendidik perlu memastikan bahwa pengambilan data dilakukan dengan ketelitian tinggi agar hasilnya merefleksikan kondisi aktual peserta didik. Keobjektifan ini sangat penting agar tidak ada bias dalam menilai peserta didik, terutama apabila menyangkut aspek-aspek nonkognitif. Dengan begitu, data yang diperoleh akan menjadi dasar yang kuat dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik.

3. Tindak lanjut

   Langkah terakhir dalam pelaksanaan penilaian diagnostik adalah melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil yang telah diperoleh. Pada

tahap ini, pendidik menganalisis data penilaian untuk memahami posisi setiap peserta didik dalam hal kesiapan belajar, kekuatan, kelemahan, serta gaya belajar mereka. Proses analisis ini menjadi landasan penting dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya agar lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan individual peserta didik.

Setelah analisis dilakukan, pendidik menyusun berbagai bentuk intervensi yang relevan. Misalnya, peserta didik yang menunjukkan kelemahan dalam aspek tertentu dapat diberikan penguatan materi atau bimbingan tambahan. Bagi peserta didik yang memiliki keunggulan, pendidik bisa merancang tantangan belajar yang lebih tinggi untuk mendorong pengembangan potensi mereka. Pendekatan ini memungkinkan pendidik memberikan perlakuan yang berbeda sesuai dengan profil belajar peserta didik, yang merupakan prinsip dasar dari pembelajaran yang terdiferensiasi.

Dengan demikian, tindak lanjut dari penilaian diagnostik bukan hanya sekadar langkah administratif, melainkan bagian integral dari proses pembelajaran yang adaptif. Penilaian ini menjelma menjadi alat transformasi karena hasilnya digunakan untuk merancang pembelajaran yang lebih inklusif, humanis, dan responsif terhadap keragaman peserta didik. Melalui tindak lanjut yang tepat, pendidik dapat menciptakan pengalaman belajar yang bermakna dan mendorong setiap peserta didik untuk berkembang secara optimal.

Secara keseluruhan, penilaian diagnostik merupakan bagian penting dalam kurikulum merdeka karena membantu pendidik memahami kondisi awal peserta didik, baik dari aspek kognitif maupun nonkognitif. Informasi ini menjadi dasar untuk merancang strategi pembelajaran yang efektif, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik sehingga proses belajar menjadi lebih inklusif serta bermakna.

Penilaian Formatif

Penilaian formatif merupakan bentuk evaluasi yang berlangsung selama proses pembelajaran berlangsung. Dalam praktiknya, pendidik secara

rutin memberikan umpan balik kepada peserta didik untuk membantu mereka mengetahui sejauh mana pencapaian terhadap tujuan pembelajaran (Baird dkk., 2017). Penilaian ini memungkinkan peserta didik memahami perkembangan belajar serta mendalami materi yang sedang dipelajari.

Melalui penilaian formatif, pendidik memperoleh informasi penting tentang tingkat pemahaman peserta didik sehingga dapat menyesuaikan metode maupun materi pembelajaran. Tujuannya adalah agar setiap peserta didik memperoleh dukungan yang sesuai dengan kebutuhan guna mendorong pencapaian potensi belajar yang optimal.

Selain itu, penilaian formatif juga mendorong pembelajaran yang aktif. Interaksi antara pendidik dan peserta didik menjadi lebih intens yang dapat memicu berpikir kritis, kemampuan bertanya, serta kemampuan peserta didik dalam mengungkapkan pemahamannya (Hadi dkk., 2022). Dengan kata lain, penilaian formatif adalah proses berkelanjutan yang berfokus pada pemberian umpan balik untuk memperbaiki proses belajar dan mengajar secara menyeluruh. Berikut adalah beberapa contoh metode penilaian formatif.

1. Kuis dan tes kecil

   Kuis dan tes kecil merupakan salah satu metode penilaian formatif yang sering digunakan dalam proses pembelajaran. Dengan bentuk soal yang ringkas dan fokus pada materi yang baru diajarkan, pendidik dapat secara cepat mengetahui sejauh mana peserta didik memahami topik tertentu. Penilaian ini tidak bertujuan untuk memberi nilai akhir melainkan sebagai alat pemantau pemahaman.

   Melalui kuis dan tes kecil, pendidik mendapatkan gambaran awal tentang bagian-bagian materi yang masih perlu diperkuat. Jika banyak peserta didik mengalami kesulitan pada soal tertentu, pendidik dapat mengevaluasi kembali pendekatan penyampaian materi dan melakukan perbaikan pada pembelajaran berikutnya. Hal ini memungkinkan proses pembelajaran menjadi lebih responsif dan adaptif.

   Bagi peserta didik, kuis dan tes kecil juga berfungsi sebagai sarana untuk mengukur kesiapan dan mengidentifikasi bagian materi yang

belum dipahami secara mendalam. Dengan demikian, peserta didik terdorong untuk lebih aktif merefleksikan pemahamannya dan terlibat dalam proses belajar secara lebih kritis serta mandiri.

2. Diskusi kelas

   Diskusi kelas merupakan metode penilaian formatif yang efektif untuk mendorong keterlibatan aktif peserta didik dalam proses belajar. Melalui diskusi, peserta didik diajak untuk menyampaikan pendapat, mempertanyakan informasi, serta memberikan tanggapan terhadap pandangan teman-temannya. Hal ini melatih kemampuan berpikir kritis sekaligus memperkuat daya analisis terhadap materi yang sedang dibahas.

   Selain itu, diskusi kelas membantu peserta didik mengembangkan kemampuan komunikasi, terutama dalam menyampaikan ide secara lisan dengan jelas dan terstruktur. Suasana diskusi yang terbuka dan saling menghargai juga membangun rasa percaya diri peserta didik dalam berbicara di depan umum serta menghargai keragaman pandangan dalam kelompok.

   Diskusi juga menjadi sarana bagi pendidik untuk menilai tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi secara langsung dan autentik. Dengan mengamati argumentasi dan respons peserta didik, pendidik dapat mengidentifikasi area yang masih membingungkan serta menyesuaikan strategi pembelajaran berikutnya agar lebih tepat sasaran.

3. Jurnal refleksi

   Jurnal refleksi adalah salah satu bentuk penilaian formatif yang mendorong peserta didik untuk berpikir lebih dalam mengenai proses dan hasil pembelajaran yang mereka alami. Melalui tulisan reflektif, peserta didik diajak mengevaluasi apa yang telah mereka pelajari, sejauh mana pemahaman mereka terhadap materi, serta aspek mana yang masih perlu ditingkatkan. Aktivitas ini membantu menginternalisasi pengetahuan dengan lebih bermakna.

Selain itu, menulis jurnal refleksi memungkinkan peserta didik menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Peserta didik diajak untuk tidak hanya memahami teori, tetapi juga memikirkan bagaimana penerapan konsep-konsep tersebut dalam situasi nyata. Dengan begitu, pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan relevan bagi perkembangan pribadi peserta didik.

Bagi pendidik, jurnal refleksi menjadi sumber informasi yang bernilai untuk menilai perkembangan kognitif dan afektif peserta didik. Pendidik dapat meninjau bagaimana peserta didik memahami materi, mengenali kesulitan yang dihadapi, serta mengamati proses berpikir peserta didik secara individual. Informasi ini dapat digunakan untuk menyusun strategi pembelajaran yang lebih responsif dan mendukung kemajuan belajar peserta didik secara menyeluruh.

Secara menyeluruh, penilaian formatif merupakan alat penting dalam proses pembelajaran yang berfungsi untuk membantu pendidik dan peserta didik dalam memantau, menyesuaikan, dan meningkatkan pencapaian belajar secara berkelanjutan serta bermakna.

Penilaian Sumatif

Penilaian sumatif berbeda dengan penilaian formatif dan memiliki peran penting dalam mengevaluasi prestasi peserta didik secara menyeluruh. Penilaian ini biasanya dilakukan pada akhir periode pembelajaran seperti akhir satuan pelajaran atau semester, dengan tujuan menilai pencapaian peserta didik secara keseluruhan (Andrian dkk., 2022; Salsabila dkk., 2020). Tujuan utamanya adalah memberikan gambaran sejauh mana peserta didik telah mencapai target pembelajaran dalam rentang waktu tertentu. Selain itu, penilaian sumatif juga memberikan informasi penting mengenai kesiapan peserta didik untuk melanjutkan ke tahap pembelajaran berikutnya.

Melalui hasil penilaian sumatif, pendidik dan pihak administrasi sekolah dapat memperoleh wawasan penting mengenai efektivitas program serta metode pengajaran yang digunakan. Informasi ini menjadi dasar untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan di masa mendatang. Selain

itu, penilaian sumatif juga memberikan pengakuan atas usaha dan pencapaian peserta didik yang dapat menjadi motivasi bagi mereka untuk terus belajar dan berkembang. Penilaian ini dilakukan pada akhir unit pembelajaran atau akhir semester untuk menilai hasil belajar pendidik secara menyeluruh. Tujuan utamanya adalah mengevaluasi sejauh mana peserta didik telah menguasai materi. Berikut beberapa contoh penilaian sumatif.

1. Ujian akhir

   Ujian akhir merupakan salah satu bentuk penilaian sumatif yang umum digunakan untuk menilai penguasaan materi oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu unit atau semester pembelajaran. Melalui ujian ini, pendidik dapat mengetahui sejauh mana peserta didik memahami keseluruhan materi yang telah diajarkan secara komprehensif.

   Penilaian melalui ujian akhir memberikan gambaran menyeluruh tentang pencapaian belajar peserta didik dalam aspek pengetahuan, keterampilan, dan penerapan konsep yang telah dipelajari. Hasil dari ujian ini sangat bermanfaat untuk mengevaluasi efektivitas proses pembelajaran yang telah berlangsung.

   Selain itu, hasil ujian akhir juga menjadi acuan penting dalam pengambilan keputusan akademik, seperti penentuan nilai akhir, kelulusan, atau kebutuhan akan pengayaan dan remedial. Oleh karena itu, pelaksanaannya perlu dilakukan secara objektif dan sistematis agar mencerminkan kemampuan peserta didik yang sebenarnya.

2. Proyek akhir

   Proyek akhir merupakan bentuk evaluasi komprehensif yang menuntut peserta didik untuk mengintegrasikan seluruh pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka pelajari selama proses pembelajaran. Melalui proyek ini, peserta didik diajak untuk tidak hanya mengingat materi, tetapi juga mengaplikasikannya secara nyata dalam konteks yang relevan. Hal ini membantu mengukur tingkat penguasaan peserta didik terhadap berbagai kompetensi yang telah diajarkan.

Proyek ini dirancang untuk mencakup berbagai aspek pembelajaran, seperti pemecahan masalah, kerja tim, kemampuan riset, dan komunikasi efektif. Dengan melibatkan banyak elemen, peserta didik ditantang untuk berpikir kritis, mengambil keputusan, serta mengelola waktu dan sumber daya dengan baik. Hal ini memperkuat pengalaman belajar yang lebih bermakna dan mendalam.

Selain itu, proyek akhir memberi ruang bagi peserta didik untuk menunjukkan kreativitas dan pemahaman mereka secara personal. Peserta didik dapat mengekspresikan ide-ide orisinal, mengembangkan solusi inovatif, serta menunjukkan cara berpikir yang reflektif terhadap proses yang dijalani. Dengan demikian, proyek akhir menjadi wadah penting untuk menilai kemampuan peserta didik secara menyeluruh dan autentik.

3. Portofolio

Portofolio merupakan kumpulan dokumentasi hasil kerja peserta didik yang disusun secara sistematis untuk menunjukkan perkembangan belajar dalam kurun waktu tertentu. Melalui portofolio proses pembelajaran peserta didik dapat ditelusuri secara menyeluruh, dari tahap awal hingga hasil akhir sehingga pendidik maupun peserta didik sendiri dapat melihat sejauh mana pencapaian dan peningkatan yang telah terjadi.

Isi dari portofolio sangat beragam, mencakup berbagai bentuk pekerjaan seperti tulisan esai, laporan proyek, karya seni, hingga rekaman presentasi. Keberagaman ini memungkinkan peserta didik untuk menunjukkan kemampuan dari berbagai aspek, baik dari sisi akademik maupun kreativitas. Dengan demikian, portofolio menjadi media yang holistik untuk menilai hasil belajar secara menyeluruh, tidak terbatas hanya pada satu bentuk penilaian saja.

Selain sebagai alat evaluasi, portofolio juga berfungsi sebagai sarana refleksi diri bagi peserta didik. Mereka dapat meninjau kembali pekerjaan yang telah dilakukan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta merencanakan langkah perbaikan ke depan. Hal ini

mendorong tumbuhnya tanggung jawab dan kesadaran diri peserta didik terhadap proses belajar.

Penilaian sumatif merupakan evaluasi yang dilakukan di akhir suatu periode pembelajaran untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik secara menyeluruh. Penilaian ini mencerminkan sejauh mana peserta didik telah menguasai kompetensi yang ditargetkan dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk menentukan kelulusan atau kenaikan tingkat. Dengan hasil yang diperoleh, pendidik dapat menilai efektivitas pengajaran, sementara peserta didik memperoleh umpan balik akhir atas usaha belajarnya.



BAB VII

EVALUASI PADA KURIKULUM MERDEKA

Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu aspek fundamental dalam pembangunan bangsa yang bertujuan untuk mencetak generasi yang berkarakter, berpengetahuan, dan memiliki keterampilan yang relevan dengan tuntutan zaman. Dalam rangka merespons perubahan global dan dinamika kebutuhan masyarakat, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai pembaruan dalam dunia pendidikan, salah satunya adalah penerapan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka dirancang sebagai upaya untuk memberikan kebebasan dan fleksibilitas kepada satuan pendidikan dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik.

Kurikulum merdeka lahir sebagai bentuk penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, dengan tujuan utama untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang adaptif, kreatif, dan berdaya saing. Dalam implementasinya,

kurikulum merdeka menekankan pentingnya pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, diferensiasi pembelajaran, dan penguatan kompetensi esensial yang sesuai dengan konteks lokal serta global. Kurikulum ini juga memberikan ruang yang luas bagi pendidik untuk berinovasi dan menyesuaikan pembelajaran dengan kondisi nyata di lapangan.

Salah satu aspek krusial dalam penerapan kurikulum merdeka adalah evaluasi. Evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam perbaikan dan pengembangan proses pembelajaran secara berkelanjutan. Evaluasi pada kurikulum merdeka menekankan prinsip asesmen yang holistik, berorientasi pada proses, dan berfokus pada perkembangan individu peserta didik. Hal ini sejalan dengan semangat kurikulum merdeka yang ingin memberikan pengalaman belajar yang bermakna, menekankan partisipasi aktif, serta mendorong penguatan karakter dan kompetensi.

Dalam konteks ini, evaluasi menjadi salah satu pilar utama untuk memastikan tercapainya tujuan kurikulum merdeka secara komprehensif. Evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan dan berbasis data memungkinkan pendidik untuk mendapatkan gambaran yang utuh tentang capaian dan kebutuhan peserta didik. Selain itu, evaluasi yang dilaksanakan secara inklusif dan adaptif menjadi dasar dalam merancang langkah-langkah pembelajaran yang lebih kontekstual dan relevan. Melalui pemahaman mendalam terhadap evaluasi dalam kurikulum merdeka, diharapkan satuan pendidikan dapat mengoptimalkan peran dan fungsinya dalam mendukung pengembangan potensi peserta didik secara maksimal.

Dengan demikian, pembahasan mengenai evaluasi dalam kurikulum merdeka menjadi penting untuk dielaborasi lebih lanjut, baik dari aspek prinsip, tujuan, metode, maupun tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Pemahaman yang baik mengenai evaluasi ini akan berkontribusi pada terciptanya pembelajaran yang lebih bermakna dan berkualitas, serta mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional yang holistik dan berkelanjutan.

Evaluasi Kurikulum Merdeka

Sebelum suatu kurikulum baru diterapkan secara nasional, diperlukan tahap penting yang dikenal sebagai fase pengembangan. Fase ini berfungsi sebagai jembatan antara perumusan ide-ide kurikulum dan penerapannya dalam sistem pendidikan secara luas. Fase pengembangan ini menjadi tahap awal yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kurikulum karena di sinilah kurikulum dirancang, diuji coba dalam lingkup terbatas, dan dilakukan penyesuaian yang diperlukan sebelum akhirnya diterapkan secara menyeluruh di seluruh satuan pendidikan. Konsep ini dikenal pula sebagai fase perintisan (*pilot study*) yang pada dasarnya menekankan pentingnya menguji dan menyempurnakan setiap komponen kurikulum agar benar-benar relevan, efektif, dan adaptif terhadap kebutuhan peserta didik serta dinamika zaman (Mubarak, 2022).

Dalam kurikulum merdeka, fase pengembangan memiliki posisi yang krusial dalam memastikan bahwa kurikulum yang baru disusun dapat menjawab tantangan dan kebutuhan riil di lapangan. Berbagai upaya strategis dilakukan dalam fase ini, mulai dari penyusunan rancangan awal kurikulum, pelaksanaan uji coba, hingga proses evaluasi dan perbaikan yang terus-menerus. Evaluasi dalam fase ini bukan hanya sekadar formalitas administratif, tetapi merupakan instrumen utama untuk menilai sejauh mana rancangan kurikulum mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan apakah terdapat kelemahan atau kekurangan yang harus segera diperbaiki sebelum kurikulum diimplementasikan secara luas (Kurniati dkk., 2022).

Evaluasi pada kurikulum merdeka menjadi sebuah proses yang integral dan berkesinambungan, yang bertujuan untuk memperoleh data yang akurat dan komprehensif mengenai keberhasilan maupun kendala yang dihadapi selama fase pengembangan. Data yang diperoleh dari evaluasi ini tidak hanya menjadi dasar bagi para pengembang kurikulum untuk melakukan penyempurnaan, tetapi juga menjadi pedoman penting bagi pendidik sebagai pelaksana kurikulum di kelas. Sebab, pendidik memiliki tanggung jawab strategis dalam memastikan bahwa kurikulum tidak hanya

menjadi dokumen formal, tetapi benar-benar mampu diterjemahkan ke dalam praktik pembelajaran yang adaptif, inovatif, dan kontekstual (Firdaus dkk., 2022).

Proses evaluasi kurikulum merdeka harus dilaksanakan secara sistematis dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat, daerah, maupun satuan pendidikan itu sendiri. Misalnya, di sekolah dasar, proses evaluasi ini sudah harus mulai mempertimbangkan peminatan peserta didik sejak kelas 4, sementara di sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, perhatian khusus diberikan pada penguatan minat dan bakat peserta didik mulai dari kelas 8 dan kelas 11. Proses peminatan ini yang menjadi salah satu fokus utama kurikulum merdeka, memerlukan evaluasi yang menyeluruh dan partisipatif di mana peserta didik, pendidik, orang tua, dan pihak terkait lainnya dilibatkan secara aktif dalam pengambilan keputusan yang strategis (Izza, Falah, dan Susilawati, 2020).

Lebih lanjut, evaluasi kurikulum merdeka bukan hanya sekadar melihat capaian kognitif semata, melainkan juga aspek afektif dan psikomotorik peserta didik. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sekolah harus melakukan evaluasi secara komprehensif, seperti melalui angket, kuesioner, wawancara, hingga observasi langsung. Selain itu, pelibatan psikolog dan kalangan profesional juga menjadi penting, terutama ketika terdapat indikasi bahwa peserta didik mengalami hambatan tertentu dalam proses peminatan atau pengembangan potensinya.

Evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan, baik setiap semester maupun setiap tahun menjadi fondasi yang kuat dalam memastikan keberhasilan pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Kurikulum ini memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam memperoleh ilmu pengetahuan, sekaligus membebaskan pendidik dalam menyampaikan materi secara fleksibel (Hasim, 2020).

Prinsip merdeka belajar yang menjadi filosofi utama kurikulum merdeka, bertujuan untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih bermakna dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Program ini bukan sekadar pergantian kurikulum, melainkan upaya untuk

memperbaiki sistem pendidikan yang sudah ada. Kebijakan-kebijakan seperti penyederhanaan RPP, penerapan sistem zonasi yang lebih fleksibel, penggantian ujian nasional dengan asesmen kompetensi minimum, serta pelaksanaan asesmen berkelanjutan berbasis portofolio merupakan wujud nyata dari semangat evaluasi yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan secara berkelanjutan (Tae dan Ngongo, 2022).

Dalam praktiknya, evaluasi kurikulum merdeka juga mencakup pengembangan dan penyesuaian instrumen asesmen yang lebih autentik dan relevan dengan dunia kerja maupun persiapan karier peserta didik di masa mendatang. Penguatan asesmen autentik yang sebelumnya sudah diterapkan dalam kurikulum 2013 menjadi elemen yang tetap relevan dan perlu diintegrasikan secara harmonis dalam kurikulum merdeka. Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi bukan hanya berfungsi untuk mengukur capaian akhir, tetapi juga sebagai proses diagnostik, formatif, dan sumatif yang memungkinkan pembelajaran menjadi lebih adaptif serta sesuai dengan perkembangan zaman (Lestari dkk., 2022).

Dengan demikian, evaluasi dalam kurikulum merdeka tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur capaian hasil belajar, tetapi juga sebagai sarana penting untuk memastikan bahwa setiap langkah pengembangan dan implementasi kurikulum dilakukan secara cermat, terukur, serta berkesinambungan. Evaluasi yang dilakukan secara partisipatif, holistik, dan inklusif akan menjadi kunci utama dalam mendukung terwujudnya tujuan besar kurikulum merdeka, yaitu mewujudkan pembelajaran yang membebaskan, bermakna, dan relevan dengan kehidupan peserta didik serta kebutuhan masyarakat luas.

Teknik dan Bentuk Evaluasi Pembelajaran Kurikulum Merdeka

Dalam pelaksanaan kurikulum merdeka, teknik dan bentuk evaluasi pembelajaran dirancang dengan pendekatan yang lebih beragam, holistik, dan berfokus pada pengembangan potensi peserta didik secara menyeluruh. Evaluasi tidak lagi hanya menitikberatkan pada capaian hasil akhir

yang bersifat kuantitatif, melainkan juga menekankan pentingnya proses pembelajaran, perkembangan keterampilan, serta kemampuan adaptasi dan kreativitas peserta didik dalam menghadapi berbagai tantangan nyata (Aini dan Basith, 2024).

Teknik evaluasi dalam kurikulum merdeka diawali dengan asesmen diagnostik yang dilaksanakan sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Asesmen ini memiliki peran penting untuk memetakan secara mendalam kemampuan awal peserta didik, baik dari aspek kognitif seperti pemahaman konsep dan penguasaan materi sebelumnya maupun aspek nonkognitif yang berkaitan dengan sikap, minat, motivasi, dan kesiapan belajar peserta didik. Informasi yang diperoleh dari asesmen diagnostik ini menjadi dasar bagi pendidik dalam merancang strategi pembelajaran yang bersifat kontekstual, diferensiatif, dan sesuai dengan kebutuhan nyata peserta didik sehingga pembelajaran menjadi lebih relevan serta bermakna.

Selanjutnya, teknik evaluasi asesmen formatif diterapkan secara berkesinambungan selama proses pembelajaran berlangsung. Asesmen formatif tidak hanya berfungsi untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kemajuan peserta didik, tetapi juga memberikan umpan balik yang konstruktif serta mendorong keterlibatan aktif dalam memperbaiki dan mengembangkan pemahaman.

Melalui asesmen formatif, pendidik dapat mengevaluasi efektivitas metode pembelajaran yang digunakan, menyesuaikan pendekatan pedagogis, dan membantu peserta didik mengidentifikasi area-area yang masih perlu diperkuat. Teknik ini menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap peserta didik mendapatkan kesempatan untuk berkembang sesuai dengan potensi dan gaya belajarnya.

Di samping itu, asesmen sumatif tetap menjadi bagian dari teknik evaluasi dalam kurikulum merdeka yang dilaksanakan pada akhir periode pembelajaran (misalnya pada akhir tema, semester, atau tahun ajaran). Asesmen sumatif bertujuan untuk mengukur pencapaian hasil belajar secara keseluruhan. Dengan demikian, pendidik dan pihak sekolah dapat memperoleh gambaran mengenai ketercapaian kompetensi dasar maupun

capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Hasil asesmen sumatif ini dapat digunakan sebagai dasar pelaporan kepada orang tua dan pihak terkait, serta sebagai bahan refleksi untuk penyempurnaan kurikulum dan praktik pembelajaran berikutnya.

Lebih jauh lagi, asesmen autentik menjadi pilar penting dalam teknik evaluasi kurikulum merdeka karena berfokus pada kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari dalam situasi nyata serta kontekstual. Bentuk asesmen autentik dapat berupa tugas proyek yang menuntut kreativitas dan kolaborasi, presentasi yang mengasah kemampuan komunikasi, atau portofolio yang mencerminkan perkembangan kompetensi peserta didik secara utuh. Dengan demikian, asesmen autentik tidak hanya menilai kemampuan kognitif, tetapi juga menilai keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kemampuan bekerja sama yang menjadi bagian penting dari profil pelajar Pancasila.

Sebagai pelengkap, kurikulum merdeka juga menekankan pentingnya teknik observasi dan refleksi diri, di mana pendidik secara aktif melakukan pengamatan terhadap keterlibatan, interaksi, dan perkembangan peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Observasi yang dilakukan secara sistematis ini memungkinkan pendidik mendapatkan informasi yang lebih mendalam dan autentik mengenai kemajuan belajar peserta didik. Sementara itu, refleksi diri yang dilakukan oleh peserta didik sendiri membantu untuk menyadari kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan. Dengan demikian, evaluasi menjadi lebih bersifat kualitatif dan memberikan nilai tambah bagi perkembangan pribadi peserta didik.

Dari segi bentuk evaluasi, kurikulum merdeka menerapkan beragam instrumen yang disesuaikan dengan karakteristik materi pembelajaran dan kebutuhan peserta didik. Tes tertulis, meskipun masih digunakan tidak lagi menjadi satu-satunya bentuk evaluasi. Tes ini dapat berupa pilihan ganda yang mengukur penguasaan materi secara faktual maupun bentuk esai yang menuntut kemampuan berpikir analitis dan argumentatif. Hal

ini bertujuan untuk memberikan variasi dalam mengukur kemampuan kognitif peserta didik (Labudasari dkk., 2023).

Sementara itu, tugas proyek menjadi salah satu bentuk evaluasi yang sangat esensial dalam kurikulum merdeka karena memberikan ruang bagi peserta didik untuk menunjukkan kreativitas, inisiatif, dan penerapan materi dalam kehidupan sehari-hari. Melalui tugas proyek, peserta didik dilatih untuk merancang, melaksanakan, dan mempresentasikan hasil kerja sehingga mereka memperoleh pengalaman belajar yang lebih mendalam, autentik, serta relevan dengan kehidupan nyata.

Portofolio juga merupakan bentuk evaluasi yang menekankan proses pengumpulan hasil karya dan refleksi diri peserta didik. Dengan portofolio, pendidik dapat melihat perkembangan kompetensi peserta didik secara komprehensif dan berkesinambungan. Sementara itu, peserta didik sendiri memiliki kesempatan untuk menilai kemajuan yang telah dicapai serta merumuskan langkah-langkah perbaikan ke depan.

Selain itu, penilaian kinerja diterapkan melalui pengamatan langsung terhadap aktivitas atau tugas praktis yang dijalankan oleh peserta didik. Penilaian ini memungkinkan pendidik untuk menilai secara autentik keterampilan yang diperlihatkan peserta didik dalam konteks nyata, seperti presentasi lisan, diskusi kelompok, atau kegiatan praktik lainnya. Penilaian terhadap sikap dan keterampilan sosial merupakan bagian integral dari evaluasi, yang bertujuan untuk mengamati dan mengukur perkembangan sikap positif, tanggung jawab, kerja sama, dan empati peserta didik sebagai komponen penting dalam pembentukan karakter profil pelajar Pancasila.

Dapat disimpulkan bahwa teknik dan bentuk evaluasi dalam kurikulum merdeka dirumuskan secara komprehensif untuk memastikan tercapainya tujuan utama pendidikan, yaitu pengembangan potensi peserta didik secara optimal melalui pendekatan yang lebih manusiawi, adaptif, dan relevan dengan tuntutan zaman.

Prinsip Evaluasi Kurikulum Merdeka

Dalam kurikulum merdeka, prinsip evaluasi atau asesmen dipahami sebagai proses yang bersifat integral dan menyeluruh. Evaluasi tidak hanya berfungsi untuk mengukur capaian hasil belajar peserta didik, tetapi juga merupakan bagian esensial dari keseluruhan proses pembelajaran. Evaluasi memfasilitasi pembelajaran dan menyediakan informasi holistik sebagai umpan balik strategis bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua/wali sehingga dapat digunakan untuk memandu pengambilan keputusan dalam merumuskan strategi pembelajaran berikutnya. Hal ini tecermin dalam beberapa prinsip berikut (Syafrizal, 2023).

1. Asesmen menjadi bagian terpadu dari pembelajaran yang secara praktis diwujudkan melalui beberapa langkah sebagai berikut.
    a. Penguatan asesmen diagnostik di awal pembelajaran untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kesiapan peserta didik.
    b. Perencanaan pembelajaran yang berpijak pada tujuan yang hendak dicapai, dengan penyediaan umpan balik yang konstruktif agar peserta didik mampu menyusun langkah-langkah perbaikan ke depannya.
    c. Pemberian umpan balik dalam bentuk kalimat yang memotivasi dan menstimulasi pola pikir bertumbuh; pelibatan peserta didik dalam asesmen melalui praktik penilaian diri, penilaian antarteman, refleksi diri, serta pemberian umpan balik antarteman.
    d. Pemberian kesempatan bagi peserta didik untuk berefleksi mengenai kemampuan yang telah dicapai dan merumuskan strategi pengembangan diri selanjutnya.
    e. Perancangan asesmen disusun untuk mendorong peningkatan kompetensi secara berkelanjutan melalui tingkat kesulitan yang sesuai dan pemberian umpan balik yang mendukung. Dalam konteks PAUD, asesmen ini tidak hanya memantau aspek perkembangan yang tercantum dalam capaian pembelajaran, tetapi juga mencakup tumbuh kembang anak secara menyeluruh.

2. Menekankan bahwa asesmen harus dirancang dan dilaksanakan sesuai dengan fungsinya, serta memberikan kebebasan kepada pendidik dalam menentukan teknik dan waktu pelaksanaannya guna mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Hal ini diwujudkan melalui beberapa langkah, antara lain: merumuskan tujuan pembelajaran secara jelas saat merencanakan asesmen; menyampaikan tujuan asesmen kepada peserta didik di awal pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi aktif; memilih teknik asesmen yang beragam dan disesuaikan dengan fungsi serta tujuan asesmen, baik yang bersifat formatif maupun sumatif; serta memanfaatkan hasil asesmen formatif sebagai umpan balik pembelajaran, sementara hasil asesmen sumatif digunakan sebagai dasar pelaporan capaian belajar.
3. Menegaskan bahwa asesmen harus disusun secara adil, proporsional, valid, dan reliabel sehingga hasilnya mampu mencerminkan kemajuan belajar peserta didik, menjadi dasar pengambilan keputusan untuk tindak lanjut pembelajaran, serta menjadi landasan dalam penyusunan program pembelajaran yang lebih sesuai dan adaptif di masa depan. Hal ini tecermin dalam berbagai praktik, seperti penyediaan waktu dan durasi asesmen yang memadai agar berfungsi sebagai bagian dari proses pembelajaran bukan sekadar alat pengujian; penetapan dan penyampaian kriteria keberhasilan secara transparan agar peserta didik memahami ekspektasi yang harus dicapai; kolaborasi antarpamong belajar dalam merancang asesmen dengan kriteria yang seragam dan tujuan yang selaras; serta pemanfaatan hasil asesmen secara optimal untuk merencanakan langkah pembelajaran yang lebih tepat dan efektif.
4. Menitikberatkan bahwa laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik harus bersifat sederhana dan informatif. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang bermanfaat mengenai karakter, kompetensi yang telah dicapai, serta strategi tindak lanjut yang perlu diambil. Pendidik diwajibkan untuk menyusun laporan yang ringkas dan mengutamakan informasi yang paling penting bagi peserta didik dan orang tua/wali, memberikan umpan balik secara

berkala, mendiskusikan hasilnya bersama-sama, serta melibatkan orang tua dalam proses perbaikan dan pengembangan belajar.

5. Menggarisbawahi bahwa hasil asesmen digunakan sebagai bahan refleksi bagi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua/wali guna meningkatkan mutu pembelajaran secara keseluruhan. Praktik refleksi ini mencakup waktu yang dialokasikan untuk membaca, menganalisis, dan merefleksikan hasil asesmen, penggunaan hasil asesmen sebagai dasar diskusi untuk mengidentifikasi capaian yang telah berhasil dan area yang memerlukan perbaikan, serta penyusunan strategi di tingkat satuan pendidikan agar hasil asesmen dimanfaatkan oleh semua pihak terkait sebagai landasan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran.

Dengan demikian, secara komprehensif, prinsip evaluasi dalam kurikulum merdeka mengandung makna bahwa penilaian hasil belajar peserta didik harus dilakukan secara adil—tanpa bias terhadap latar belakang, identitas, maupun kebutuhan khusus peserta didik—serta objektif, yaitu berdasarkan informasi faktual mengenai perkembangan atau capaian peserta didik. Selain itu, penilaian juga harus bersifat edukatif, dalam arti memberikan umpan balik yang bermanfaat bagi semua pihak untuk mendukung peningkatan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan.

Jenis Evaluasi Kurikulum Merdeka

Dalam kurikulum merdeka, jenis evaluasi atau asesmen memiliki cakupan yang komprehensif dan beragam, yang dirancang untuk mendukung tercapainya tujuan pembelajaran yang adaptif dan berpusat pada peserta didik. Berdasarkan fungsi dan tujuannya, asesmen diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, yaitu asesmen diagnostik, formatif, sumatif, selektif, dan penempatan. Masing-masing jenis asesmen ini memiliki landasan teoretis, pendekatan, serta praktik pelaksanaan yang berbeda, yang secara sinergis berkontribusi pada peningkatan kualitas pembelajaran.

Pertama, asesmen diagnostik merupakan langkah awal yang sangat penting dalam kurikulum merdeka. Asesmen ini dilakukan sebelum proses

pembelajaran dimulai, dengan tujuan utama untuk memetakan kesiapan awal peserta didik, mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan mereka, serta mengungkapkan faktor-faktor penyebab yang memengaruhi hasil belajar. Hal ini sesuai dengan definisi yang tercantum dalam Keputusan Mendikbud No.719/P/2020, yang menyatakan bahwa asesmen diagnostik dilaksanakan secara spesifik untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, dan kelemahan peserta didik.

Dari hasil asesmen ini, pendidik akan memperoleh data yang sangat penting sebagai dasar untuk memodifikasi rancangan pembelajaran. Dengan demikian, pembelajaran yang direncanakan menjadi lebih relevan, kontekstual, dan sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik individual peserta didik.

Secara lebih mendalam, manfaat asesmen diagnostik menurut Brummitt (2020, dalam Wahyuddin) terbagi menjadi beberapa poin penting.

1. Asesmen diagnostik

   Asesmen ini memungkinkan pendidik merancang pembelajaran yang efisien dan realistis bagi peserta didik yang memiliki latar belakang, pengalaman, dan kemampuan yang beragam. Hasil asesmen membantu pendidik menyesuaikan metode dan strategi pembelajaran yang lebih personal serta sesuai dengan kebutuhan nyata peserta didik.

   Selain itu, asesmen diagnostik memberikan informasi lengkap mengenai kondisi individu peserta didik, mencakup kelebihan, kesulitan, dan potensi yang belum tergali. Asesmen ini juga digunakan untuk merancang *baseline* atau tolok ukur awal yang menjadi dasar bagi asesmen selanjutnya sehingga perkembangan peserta didik dapat dimonitor secara akurat dan intervensi dapat diberikan secara tepat sasaran.

2. Asesmen formatif

   Dalam kurikulum merdeka, asesmen formatif memiliki peran penting dalam memantau dan memperbaiki proses pembelajaran secara berkelanjutan. Dilaksanakan selama proses belajar berlangsung, asesmen ini

membantu mengidentifikasi sejauh mana peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran.

Berbeda dari pendekatan tradisional yang menekankan angka kriteria ketuntasan minimal (KKM), asesmen formatif berfokus pada ketercapaian tujuan secara esensial dan holistik. Ini memberikan umpan balik autentik kepada peserta didik dan mendukung refleksi serta perbaikan pembelajaran secara *real time*. Asesmen ini juga memungkinkan pendidik menyesuaikan strategi pengajaran berdasarkan kebutuhan dan hambatan yang dihadapi peserta didik.

3. Asesmen sumatif

   Asesmen sumatif dilaksanakan pada akhir periode pembelajaran, seperti akhir semester atau tahun ajaran untuk mengukur capaian peserta didik terhadap kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Dalam kurikulum merdeka, pendidik dan satuan pendidikan memiliki keleluasaan dalam memilih metode serta teknik asesmen sumatif yang sesuai. Hal ini memungkinkan hasil belajar digambarkan secara autentik, tidak terbatas pada angka semata, dan lebih merefleksikan pemahaman serta keterampilan nyata peserta didik.

4. Asesmen selektif

   Jenis asesmen ini digunakan sebagai alat untuk melakukan penyaringan, misalnya dalam memilih peserta didik untuk lomba atau penerimaan di jenjang pendidikan berikutnya. Asesmen selektif bersifat kompetitif dan fokus pada aspek-aspek yang menjadi tolok ukur seleksi, baik akademik maupun non-akademik. Tujuannya adalah memastikan bahwa peserta didik terpilih memiliki kemampuan dan kesiapan yang sesuai.

5. Asesmen penempatan

   Asesmen ini bertujuan memetakan penguasaan kompetensi prasyarat sebelum peserta didik mengikuti program pembelajaran lanjutan. Dengan asesmen penempatan, pendidik dapat memastikan bahwa peserta didik memiliki bekal yang memadai sehingga pembelajaran berjalan efisien dan sesuai dengan kemampuan awal peserta didik.

Asesmen ini penting untuk menghindari kesenjangan pemahaman yang bisa menghambat proses belajar di tahap selanjutnya.

Kelima jenis asesmen dalam kurikulum merdeka saling melengkapi dan mendukung pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kurikulum ini memberikan fleksibilitas kepada pendidik dan satuan pendidikan dalam menentukan teknik, waktu, serta pendekatan asesmen sehingga mendorong terciptanya pembelajaran yang inklusif, adaptif, dan bermakna.

Hal ini selaras dengan prinsip utama kurikulum merdeka yang menekankan kebebasan belajar (*freedom to learn*) dan beragam jalur pembelajaran (*multiple pathways to learning*). Dengan demikian, setiap peserta didik diberi kesempatan berkembang secara optimal sesuai potensi, minat, dan karakteristik individualnya.

Karakteristik Asesmen

Berikut merupakan karakteristik asesmen formatif dan sumatif.

1. Asesmen formatif

   Asesmen formatif merupakan salah satu bentuk evaluasi yang dirancang secara terpadu dengan keseluruhan proses pembelajaran. Hal ini berarti bahwa asesmen formatif tidak berdiri sendiri sebagai entitas yang terpisah, melainkan menyatu secara harmonis dalam setiap tahapan pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi. Dalam konteks kurikulum merdeka, perencanaan asesmen formatif dilakukan bersamaan dengan penyusunan rencana pembelajaran. Dengan demikian, tujuan pembelajaran dan asesmen berjalan seiring dan saling mendukung pencapaian kompetensi peserta didik (Assingkily dkk., 2021).

   Asesmen formatif menekankan pentingnya keterlibatan aktif peserta didik dalam pelaksanaannya. Keterlibatan ini dapat diwujudkan melalui berbagai mekanisme, seperti penilaian diri (*self-assessment*), penilaian antarteman (*peer-assessment*), serta kegiatan refleksi

metakognitif yang memungkinkan peserta didik untuk memahami, memantau, dan mengevaluasi sendiri proses belajarnya. Dengan demikian, asesmen formatif tidak hanya menjadi alat pengukuran bagi pendidik, tetapi juga menjadi sarana bagi peserta didik untuk membangun kesadaran dan tanggung jawab atas perkembangan belajarnya.

Dalam implementasinya, asesmen formatif memperhatikan perkembangan penguasaan peserta didik secara menyeluruh, mencakup ranah sikap (afektif), pengetahuan (kognitif), dan keterampilan (psikomotor). Oleh karena itu, pendidik perlu merancang strategi pembelajaran yang variatif serta menggunakan teknik dan instrumen asesmen yang relevan dan kontekstual. Tujuan utamanya adalah memperoleh data yang autentik dan komprehensif, yang dapat digunakan untuk memberikan umpan balik konstruktif guna mendorong perbaikan proses pembelajaran secara berkelanjutan.

2. Asesmen sumatif

Asesmen sumatif dalam kurikulum merdeka memiliki karakteristik yang berbeda dengan asesmen formatif. Asesmen ini dilaksanakan pada akhir suatu periode pembelajaran tertentu, misalnya pada akhir lingkup materi, akhir semester, atau akhir tahun ajaran. Tujuan utama asesmen sumatif adalah untuk mengukur dan menentukan sejauh mana peserta didik telah mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Hasil dari asesmen sumatif ini kemudian dibandingkan dengan kriteria capaian yang telah ditetapkan sebelumnya guna menilai tingkat keberhasilan belajar peserta didik (Budiono dan Hatip, 2023).

Selain itu, asesmen sumatif berfungsi sebagai alat bagi pendidik atau satuan pendidikan untuk mengevaluasi efektivitas program pembelajaran yang telah dilaksanakan. Dengan demikian, asesmen ini menjadi instrumen penting dalam menentukan tindak lanjut serta perbaikan program pembelajaran berikutnya agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik.

Meskipun memiliki tujuan dan waktu pelaksanaan yang berbeda, asesmen formatif dan asesmen sumatif memiliki kesamaan yang mendasar,

yaitu keduanya memberikan umpan balik yang sangat berharga. Umpan balik ini dapat dimanfaatkan, baik oleh pendidik maupun oleh peserta didik untuk melakukan intervensi pembelajaran yang lebih tepat sasaran. Bagi pendidik, umpan balik ini menjadi dasar untuk memperbaiki dan menyempurnakan proses pembelajaran. Sementara itu, bagi peserta didik umpan balik tersebut berfungsi sebagai sumber informasi untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sehingga dapat memotivasi upaya perbaikan diri secara berkelanjutan.

Pelaksanaan Evaluasi

Berikut merupakan pelaksanaan evaluasi dalam kurikulum merdeka.

1. Evaluasi formatif

   Pelaksanaan evaluasi formatif dalam kurikulum merdeka dilakukan secara terintegrasi dengan keseluruhan proses pembelajaran. Hal ini berarti bahwa evaluasi formatif tidak hanya dilakukan pada tahap akhir, tetapi secara bersamaan dengan aktivitas belajar-mengajar yang sedang berlangsung. Dengan demikian, evaluasi formatif berfungsi sebagai upaya berkelanjutan untuk memantau ketercapaian tujuan pembelajaran, sekaligus sebagai dasar untuk melakukan tindakan lanjut yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Tindak lanjut tersebut dapat berupa pemberian perlakuan khusus bagi peserta didik yang memerlukan bantuan tambahan maupun perbaikan dan penyempurnaan strategi pembelajaran yang digunakan (Barlian dan Solekah, 2022).

   Dalam rangka memperoleh data yang komprehensif dan akurat, pendidik dianjurkan untuk menggunakan berbagai teknik evaluasi yang bervariasi dan sesuai dengan karakteristik materi serta kompetensi yang ingin dicapai. Teknik-teknik evaluasi yang umum digunakan dalam evaluasi formatif meliputi observasi langsung terhadap aktivitas peserta didik, penilaian terhadap performa (baik berupa kinerja, produk, proyek, maupun portofolio), serta penggunaan instrumen tes yang relevan. Teknik-teknik tersebut diharapkan mampu memberikan

gambaran yang lebih menyeluruh mengenai perkembangan belajar peserta didik.

Selain itu, tindak lanjut dari evaluasi formatif hendaknya dilakukan secara segera dan tepat. Tindak lanjut tersebut dapat berupa pemberian umpan balik langsung yang bersifat konstruktif maupun intervensi yang lebih terarah untuk membantu peserta didik mencapai kompetensi yang diharapkan. Agar pelaksanaan evaluasi formatif berjalan optimal, pendidik disarankan untuk mempersiapkan berbagai instrumen pendukung, seperti rubrik penilaian yang jelas, catatan anekdotal yang berisi pengamatan kualitatif, serta lembar ceklis yang membantu dalam pencatatan data dan informasi yang terjadi selama proses pembelajaran berlangsung.

2. Evaluasi sumatif

   Pelaksanaan evaluasi sumatif dalam kurikulum merdeka dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang relevan dengan tujuannya, yaitu untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik pada akhir lingkup materi tertentu maupun pada akhir semester. Pelaksanaan evaluasi sumatif menjadi alat penting dalam menentukan tingkat penguasaan kompetensi yang telah ditetapkan dalam tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, pendidik dituntut untuk menggunakan teknik yang bervariasi, seperti portofolio, penilaian performa (kinerja, produk, proyek, maupun portofolio), serta berbagai bentuk tes yang sesuai dengan karakteristik materi dan tujuan evaluasi (Baruta, 2023).

Hasil yang diperoleh dari evaluasi sumatif dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan umpan balik yang spesifik dan terukur kepada peserta didik, serta untuk melakukan intervensi yang diperlukan. Selain itu, hasil evaluasi ini juga berperan dalam mengevaluasi efektivitas keseluruhan proses pembelajaran. Dengan demikian, hal ini menjadi acuan bagi pendidik dan satuan pendidikan dalam merumuskan perbaikan pada kegiatan pembelajaran selanjutnya.



Daftar Pustaka

Aini dan Basith. "Teknik dan Bentuk Evaluasi Pembelajaran Kurikulum Merdeka". *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(1): 69—74. 2024.

Ananda, Adeliya Putri dan Hudaidah. "Perkembangan Kurikulum Pendidikan di Indonesia dari Masa Ke Masa". *SINDANG: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kajian Sejarah*, 3(2): 102—108. 2021.

Ananda, Rusydi. "Evaluation of Learning Outcome: The Comparison Between the Education Unit Level Curriculum (KTSP) and the 2013 Curriculum". *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 9(2): 365—378. 2021.

Andrian, Dedek, Astri Wahyuni, dan Syarul Ramadhan. "Mathematics Teachers' Performance in the Industrial Revolution Era 4.0: A Structural Equation Model". *Journal of Innovation in Educational and Cultural Research,* 3(4): 554—563. 2022.

Anggara, A., dkk. "Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar pada Satuan Pendidikan Jenjang SMP". *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 5(1): 1899—1904. 2023.

Ardiansyah, Ardiansyah, Fitri Sagita, dan Juanda. "Assesmen dalam Kurikulum Merdeka Belajar". *Jurnal Literasi dan Pembelajaran Indonesia,* 3(1): 8—13. 2023.

Arifin, Zainal. 2017. *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Assingkily, dkk., 2021. *Desain Pembelajaran Tematik Integratif Jenjang MI/SD (Dari Konvensional Menuju Kontekstual yang Fungsional)*. Yogyakarta: Penerbit K-Media.

Awalludin, Aisyah N., I. Cahyani, dan Mustafiyanti. "Prinsip dan Faktor yang Mempengaruhi Kurikulum Merdeka". *Jurnal Yudistira: Publikasi Riset Ilmu Pendidikan dan Bahasa*, 2(3): 120—127. 2024.

Baird, Jo-Anne, dkk. "Assessment and Learning: Fields Apart?" *Assessment in Education: Principles, Policy & Practice*, 24(3): 317—350. 2017.

Barlian dan Solekah. "Implementasi Kurikulum Merdeka dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan". *JOEL: Journal of Educational and Language Research*, 1(12): 2105—2118. 2022.

Baruta. 2023. *Asesmen Pembelajaran pada Kurikulum Merdeka: Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah*. Lombok Tengah: Penerbit P4I.

Budiono dan Hatip. "Asesmen Pembelajaran pada Kurikulum Merdeka". *Jurnal Axioma: Jurnal Matematika dan Pembelajaran*, 8(1): 109—123. 2023.

Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Depdiknas.

Dewey, J. 1902. *The Child and the Curriculum*. Chicago: University of Chicago Press.

Efendi, P. M., T. Muhtar, dan Y. T. Herlambang. "Relevansi Kurikulum Merdeka dengan Konsepsi Ki Hadjar Dewantara: Studi Kritis dalam Perspektif Filosofis-Pedagogis". *Jurnal Elementaria Edukasia*, 6(2): 548—561. 2023.

Febriyenti, Dini, dkk. "Perkembangan Kurikulum di Indonesia dalam Perspektif Sejarah". *Al-Idaroh: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam*, 7(2): 195—214. 2023.

Firdaus, dkk. "Analisis Evaluasi Program Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka". *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(4): 686—692. 2022.

Fithriani, dkk. "Teacher As a Role Model in the 2013 Curriculum Development". *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 21(2): 240—255. 2021.

Fullan, M. 2007. *The New Meaning of Educational Change*. New York: Routledge.

Fuziawati, Elit. "Sejarah Perkembangan Kurikulum PAI di Indonesia dari Tahun 1947 Sampai 2013". *Dirasa Islamiyya*, 3(2): 160—178. 2024.

Glatthorn, A. A. 1987. *Curriculum Leadership*. Illinois: Scott Foresman

Hadi, Samsul, dkk. "An Instrument Development to Evaluate Teachers' Involvement in Planning the Schools' Budgeting at Elementary Schools of Yogyakarta Province". *International Journal of Instruction*, 15(2): 1087—1100. 2022.

Hamalik, O. 2011. *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Hasan, S. H. 2021. *Evaluasi Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Hasim, Evi. "Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar Perguruan Tinggi di Masa Pandemi Covid-19". *Prosiding Webinar Magister Pendidikan Dasar Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo*. 68—74. 2020.

Izza, Falah, dan Susilawati. "Studi Literatur: Problematika Evaluasi Pembelajaran dalam Mencapai Tujuan Pendidikan di Era Merdeka Belajar". *Konferensi Ilmiah Pendidikan Universitas Pekalongan 2020*: 10—15.

Kemendikbud. "Kemendikbudristek Terbitkan payung Hukum bagi Implementasi Kurikulum Merdeka secara Nasional". Kemendikbud.go.id, dilihat pada Mei 25 2025 .<(https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2024/03/kemendikbudristek-terbitkan- payung-hukum-bagi-implementasi-kurikulum-merdeka-secara-nasional/>.

Kemendikbudristek. 2022. *Buku Saku Implementasi Kurikulum Merdeka*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Kemendikbudristek. 2022. *Capaian Pembelajaran SD-SMA*. Jakarta: Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen.

Kementrian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. "Pengertian Landasan Filosofis". Kemendikbud.go.id, dilihat 21 Mei 2025.<https://lmsspada.kemdiktisaintek.go.id/pluginfile.php/145252/mod_resource/content/1/ TM11%20Landasan%20filosofis.pdf/>.

Kementrian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi. 2022. "Buku Saku Tanya Jawab Kurikulum Merdeka". Bpmpntb.kemdikbud.go.id, dilihat 29 Mei 2025.<https://bpmpntb.kemdikbud.go.id/unduhan/61/buku-saku-kurikulum-merdeka />.

Kementrian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi. 2024. "Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah". JDIH.kemendikdasmen.go.id, dilihat 19 Mei 19 2025.<https://jdih.kemendikdasmen.go.id/detail_peraturan?main=3380/>.

Kementrian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi. 2024. "Salinan Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah". JDIH.kemendikdasmen.go.id, dilihat 19 Mei 2025.<https://jdih.kemendikdasmen.go.id/detail_peraturan?main=3380/>.

Kurniati dkk., 2022. "Model Proses Inovasi Kurikulum Merdeka Implikasinya bagi Siswa dan Guru Abad 21". *Jurnal Citizenship Virtues*, 2(2): 408—423.

Labudasari dkk., 2023. *Kurikulum Merdeka: Teori dan Praktik di Sekolah*. Bandung: Indonesia Emas Group.

Lemos, R. F. 2024. *Curriculum and Learning: Towards a Competency-based Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) Curriculum Reform in Armenia*. Washington: Grup Bank Dunia.

Lestari dkk., 2022. "Kurikulum Merdeka Belajar Merujuk Pengembangan Kurikulum Abad 21 Di SMK Negeri 1 Sungai Rotan". *Jurnal PKM Ilmu Kependidikan*, 5(2): 12.

Manurung, Iramdan dan Lengsi. "Sejarah Kurikulum di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikann*, 5(2): 88—95. 2019.

Marzuqi, Badrul Munir dan Nur Ahid. "Perkembangan Kurikulum Pendidikan di Indonesia: Prinsip dan Faktor yang Mempengaruhi". *JoIEM (Journal of Islamic Education Management)*, 4(2): 99—116. 2023.

Masykur, R. 2018. *Teori dan Telaah Pengembangan Kurikulum*. Bandar Lampung: Aura Publishing.

Mawaddah, Ida. "Trend Kurikulum dalam Pendidikan Sekolah di Indonesia". *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 3(3): 293—296. 2019.

Mubarak. 2022. *Desain kurikulum merdeka untuk era revolusi industri 4.0 dan society 5.0*. Tasikmalaya: Zakimu. com.

Ningsih, N. N. dan L. Sartika. "Karakteristik Kurikulum Merdeka Belajar". *TARBIYAH: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran*, 2(2): 204—210. 2023.

Nurhayati, N., dkk. 2022. *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktik di Era Merdeka Belajar*. Lombok Tengah: Hamjah Difa Foundation.

Nurwahyuni, Katwan dan Hudaidah. "Sejarah Sistem Pendidikan di Indonesia dari Masa Ke Masa". *Berkala Ilmiah Pendidikan*, 1(2): 53—59. 2021.

Pusat Kurikulum dan Pembelajaran. 2020. "Laporan Kurikulum dan Pembelajaran". Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Rahayu, dkk. "Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah Penggerak". *Jurnal Basicedu*, 6(4): 6313—6319. 2022.

Rasid, A. "Implikasi Landasan-Landasan Pendidikan". *AL-FIKRAH: Jurnal Studi Ilmu Pendidikan dan Keislaman*, 1(1): 1—15. 2018.

Rusman. "Landasan Pengembangan Kurikulum". Lmsspada kemdiksaintek.go.id, dilihat 22 Mei 2025.<https://lmsspada kemdiktisaintek.go.id/pluginfile.php/554045/mod_resource content/4/ Modul%20Landsan%20Kurikulum.pdf/>.

Sahlberg, P. 2011. *Finnish Lessons: What Can the World Learn from Educational Change in Finland*? New York: Teachers College Press.

Salamah, U., Y. Listiyani, dan M. Mustafiyanti. "Analisis Konsep dan Struktur Kurikulum Merdeka dan Merdeka Belajar". *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 4(2): 123—129. 2024.

Salsabila, Ellis, Wardani Rahayu, dan Pinta Deniyanti Sampoerno. "Performance Assessment to Measure Student's Mathematical Proving Ability Based on the Abductive-Deductive Approach". *KnE Social Sciences*, 343—354. 2020.

Sanjaya, W. 2008. *Kurikulum dan Pembelajaran: Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*. Jakarta: Prenada Media Grup.

Setiyorini, Sri Rejeki dan Deni Setiawan. "Perkembangan Kurikulum terhadap Kualitas Pendidikan di Indonesia". *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 1(1): 1—12. 2023.

Shinta, Wurdiana dan Leberina Elviana. "Perkembangan Kurikulum di Indonesia Sejak Awal Kemerdekaan Hingga Saat Ini". *Jurnal Edudikara*, 2(2): 3—5. 2021.

Sihombing, Adison Adrianus, dkk. "Merdeka Belajar in an Online Learning During the Covid-19 Outbreak: Concept and Implementation". *Asian Journal of University Education*, 17(4): 35—48. 2021.

Solehan, S. "Konsepsi Panca Dharma Ki Hadjar Dewantara Ditinjau dari Sudut Pandang Pendidikan Islam". *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam*, 15(1): 1—30. 2010.

Sukmadinata, N. S. 2005. *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktik*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Sukmadinata, N. S. dan E. Syaodih. 2012. *Kurikulum & Pembelajaran Kompetensi*. Bandung: Refika Aditama.

Syafrizal. 2023. *Analisis Implementasi Kurikulum Merdeka dalam Perspektif Teori Belajar Humanistik di MTsN 3 dan MTsN 19 Jakarta* (Master's thesis, Jakarta: FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Taba, H. 1962. *Curriculum Development: Theory and Practice. Harcourt Brace Jovanovich*. New York: Harcourt, Brace & World.

Tae dan Ngongo. 2022. "Pentingnya Teknlogi Pendidikan di Era Merdeka Belajar". *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Guru Sekolah Dasar* 2022: 47—52.

Toffler, A. 1970. *Future Shock*. New York: Random House.

Tomlinson, C. A. 2017. *How to Differentiate Instruction in Academically Diverse Classrooms*. Alexandria, VA: ASCD.

Tunas, K. O. dan R. D. H. Pangkey. "Kurikulum Merdeka: Meningkatkan Kualitas Pembelajaran dengan Kebebasan dan Fleksibilitas". *Journal on Education*, 6(4): 22031—22040. 2024.

Tyler, R. W. 1949. *Basic Principles of Curriculum and Instruction*. Chicago: University of Chicago Press.

Wiggins, G. dan J. McTighe. 2005. *Understanding by Design*. Alexandria: ASCD.



Profil Penulis



Desy Anita Karolina Sembiring, S.Pd., M.Pd. lahir di Manokwari, Papua Barat, pada 11 Desember 1991. Dilahirkan sebagai anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan Ir. Robinson Sembiring dan Basaria Simbolon. Pendidikan formal ditempuh dengan menyelesaikan program sarjana (S-1) di Universitas Cenderawasih pada Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris dan dilanjutkan dengan pendidikan pascasarjana (S-2) di Universitas Negeri Papua dengan konsentrasi di bidang Manajemen Pendidikan.

Selain berkarier sebagai dosen, pengalaman profesional diperoleh dengan menjadi anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah (BAN-S/M) pada tahun 2022—2023, yang kemudian berganti nama menjadi Badan Akreditasi Nasional PAUD, Dasar, dan Menengah (BAN-PDM) untuk periode 2023—2024. Kontribusi dalam dunia akademis diberikan melalui peran sebagai *reviewer* di Jurnal NOKEN Manajemen Pendidikan di Universitas Cenderawasih, Papua, dan juga di *Journal of Educational Learning and Innovation* (ELIa) di Universitas Shanti Bhuana, Kalimantan.

Dalam bidang publikasi, telah dihasilkan empat buku kolaborasi, yaitu *Transformasi Pendidikan dalam Era Digital dan Merdeka Belajar*, *Manajemen Pendidikan*, *Teori Belajar dan Pembelajaran*, serta *Pendidikan*

Kewirausahaan: Praktik Baik pada Satuan Pendidikan dan Pendidikan Tinggi dalam Mewujudkan MBKM.

Penulis dapat dihubungi melalui alamat surel: desy.sembiring@fkip.uncen.ac.id .



Nani Septiana, S.E., M.M. lahir di Bandarjaya Lampung Tengah pada 20 September 1989. Penulis saat ini berdomisili di Kota Metro. Lulusan Magister Manajemen (S-2) Universitas Sebelas Maret Surakarta pada tahun 2015. Saat ini penulis aktif sebagai dosen di Program Studi S-1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Penulis merupakan asesor kompetensi BNSP pada skema "Pendampingan Kewirausahaan". Penulis juga aktif dalam beberapa kegiatan "Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penelitian".



Dr. Singgih Subiyantoro, M.Pd. adalah seorang akademisi dan praktisi di bidang Teknologi Pendidikan yang saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) di Universitas Veteran Bangun Nusantara (Univet Bantara) periode 2021—2025. Meraih gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) dalam bidang Teknologi Pendidikan dari Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) pada tahun 2012. Kemudian, melanjutkan studi dan memperoleh gelar Magister Pendidikan (M.Pd.) dalam bidang yang sama dari Universitas Sebelas Maret (UNS) pada tahun 2015. Komitmennya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan membawanya meraih gelar Doktor (Dr.) Teknologi Pembelajaran dari Universitas Negeri Malang (UM) pada tahun 2022.

Dalam bidang penelitian, penulis memiliki minat utama pada pengembangan model pembelajaran dan inovasi pendidikan. Profil Google Scholar penulis mencerminkan kontribusinya dalam publikasi ilmiah yang berfokus pada model pembelajaran instruksional dan teknologi pendidikan.

Selain menjalani perannya sebagai dosen dan pejabat struktural di kampus, penulis juga berperan aktif dalam berbagai kegiatan akademik dan profesional. Misalnya, sebagai editor dan *reviewer* jurnal nasional dan internasional serta berpartisipasi dalam seminar dan *workshop* teknologi pendidikan. Dengan latar belakang pendidikan yang kuat, penulis terus berupaya berkontribusi dalam pengembangan pendidikan di Indonesia khususnya dalam bidang teknologi pendidikan.



Ahmad Rosyid, M.Pd.I., lahir di Wonogiri pada 11 Januari 1991. Penulis pernah mendirikan TPA Ki Ageng Santri serta membentuk kelompok kajian ilmu agama bagi remaja yang dinamakan Remasta (Remasja Masjid Taman). Dalam bidang pendidikan formal, penulis pernah mengajar sebagai guru Pendidikan Agama Islam di salah satu SMK Negeri ternama di Kota Surakarta.

Salah satu prestasi yang pernah diraihnya adalah menjadi peserta terbaik dalam pelatihan Kurikulum 2013 (K-13) pada tahun 2016. Pengalaman dan pemahaman mendalamnya dalam bidang Pendidikan Agama Islam diperoleh sejak menempuh pendidikan di lingkungan pesantren, kemudian dilanjutkan dengan studi S-1 dan S-2 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.

Saat ini, penulis mengabdikan diri sebagai dosen Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) Pendidikan Agama Islam di Universitas Veteran Bangun Nusantara.



Dr. Isabel Coryunitha Panis, M. Pd. merupakan tenaga pendidik di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang pada Program Studi Pendidikan Fisika. Penulis menamatkan pendidikan S-1 hingga S-3 di Universitas Negeri Malang pada Jurusan Teknologi Pembelajaran. Penulis dapat dihubungi melalui alamat surel: isabelcoryunithapanis@unwira.ac.id.